

**EFEKTIVITAS MUSRENBANGDES
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PEDESAAN BERDASARKAN
KONDISI DAN POTENSI WILAYAH DI KABUPATEN TEGAL**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh:

**AKHMAD UWES QORONI
L4D004004**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daftar: 4408/T/mtpwk/c1
Tgl. 4-8-06

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**EFEKTIVITAS MUSRENBANGDES
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PEDESAAN BERDASARKAN KONDISI
DAN POTENSI WILAYAH DI KABUPATEN TEGAL**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

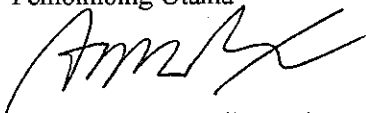
Oleh:

AKHMAD UWES QORONI
L4D004004

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal, 19 Desember 2005

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Desember 2005
Pembimbing Utama


Dr. Ir. Mochammad Agung Wibowo, MSc

Pembimbing I


Ir. Holi Bina Wijaya, MUM

Pembimbing II


Prihadi Nugroho, ST, MT

Mengetahui

Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro




Prof. Dr. H. Suziono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 2005



AKHMAD UWES QORONI
NIM L4D004004

Tuhan

*Jasmani dan RuhaniKu adalah Milik-Mu,
Satu Kesatuan Dalam Wujud Agung-Mu,
Jalanku Hanyalah Sebatas Apa Yang Kau Gariskan,
Kau Kuatkan Tekad Dan Doa'ku,
Terima Kasih Atas Semua Karunia-Mu,
Hanya Kepada-Mu Tempat Kembali Terbaik.*

*Tesis Ini Aku Persembahkan Untuk
Anakku, Akhmad Nur Imtihanul Hikam, Nur Fadilatil Atqia,
Istriku, Bihastuti Widarmawati*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang telah memberikan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses belajar ini yaitu:

1. Pihak Pusbindiklatren BAPPENAS yang telah memberikan beasiswa pendidikan sehingga penulis dapat menempuh S2 di Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota (MTPWK) Universitas Diponegoro (Undip)
2. Prof. Dr. Sugiono Soetomo, DEA selaku ketua Program MTPWK, Ir Ragil Haryanto, MSP selaku sekretaris program dan seluruh pengajar serta civitas akademik di MTPWK Undip
3. Dr. Ir. Mochammad Agung Wibowo, MSc selaku Pembimbing Utama atas bimbingan dan arahnya yang selalu membesarkan hati dan mendorong memberikan semangat penulis untuk tetap maju.
4. Ir. Holi Bina Wijaya, MUM selaku Mentor atas bimbingan dan arahnya sehingga penulis terbuka wawasannya dan bisa menyelesaikan penelitian ini dengan tetap semangat.
5. Prihadi Nugroho, ST, MT selaku co-mentor atas bimbingan dan arahnya.
6. Seluruh dosen, pengurus, staf pelaksana program MTPWK Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu memberikan motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.
7. Pendamping hidup dan permata-permata hatiku Ihan dan Dila atas perhatian dan pengertiannya yang besar.
8. Seluruh teman-teman BAPPENAS Angkatan I (MPWK Universitas Diponegoro) yang saling mendukung dan memotivasi
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan tesis ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri bagi saran-saran perbaikan agar tesis ini dapat menjadi lebih baik dan terutama lagi agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, Desember 2005

Akhmad Uwes Qoroni

ABSTRAK

Pembangunan Infrastruktur pedesaan masuk ke dalam agenda prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional, pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai pembangunan yang sangat mendesak saat ini, hal ini disebabkan kondisi Infrastruktur pedesaan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Melihat kondisi tersebut maka Pemerintah memfokuskan anggaran pembangunannya untuk membangun infrastruktur pedesaan sampai dengan 5 tahun kedepan. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan haruslah merupakan inner will, yaitu suatu proses emansipasi diri, inisiatif dan partisipasi kreatif masyarakat dalam pembangunan, karena keberhasilan pembangunan pedesaan adalah dengan mengembangkan potensi kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri, sehingga dibutuhkan perencanaan Infrastruktur Pedesaan yang berdasarkan kondisi wilayah, potensi alam dan kebutuhan masyarakat, maka pemberdayaan perencanaan partisipatif dalam konteks perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan merupakan suatu alternatif yang baik, dan perencanaan partisipatif di pedesaan adalah melalui forum Musrenbangdes.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Musrenbangdes dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah di 4 (empat) desa di Kabupaten Tegal. Metodologi penelitian ini adalah menggunakan pendekatan survey eksplanatori disajikan secara kualitatif diskriptif yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data dan analisa data yang non kuantitatif serta bertujuan untuk mengeksplorasi kondisi serta potensi wilayah dan mendiskripsikan kenyataan yang ada. Untuk mengetahui proses perencanaan partisipatif, sampel yang dipakai sejumlah 92 responden secara purposive yang memenuhi kriteria dan berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perencanaan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes sudah bisa dikatakan efektif karena perencanaan infrastruktur pedesaan yang dihasilkan didasarkan pada orientasi terhadap lingkungannya (Kondisi wilayah) dan Optimalisasi sumber dayanya (Potensi wilayah), tetapi untuk realisasi tujuannya belum terpenuhi. Perencanaan Infrastruktur Pedesaan baik melalui analisis kondisi dan potensi wilayah maupun perencanaan partisipatif usulannya berbeda-beda sesuai dengan letak geografis wilayah tetapi mempunyai kesamaan bentuk perencanaan infrastruktur pedesaannya.

Program Pembangunan infrastruktur Pedesaan adalah merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat, bentuk konkritnya adalah tersedianya akses prasarana lokal yang lebih memadai, dapat dimanfaatkan secara langsung dan cepat oleh masyarakat, diharapkan perencanaan partisipatif melalui Musrenbangdes di Kabupaten Tegal dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan infrastruktur di pedesaan.

Kata kunci : Infrastruktur pedesaan, Efektivitas, kondisi dan potensi wilayah

ABSTRACT

Rural infrastructure development was included in priority agenda of national development planning, as infrastructure development was determined by the government as the extremely urgent development today, because of the condition of rural infrastructure that very concerning about. Viewing that condition the government concentrated the national budget on developing the rural infrastructure until the next 5 years. Must be an inner will for this rural infrastructure development – because the success of rural development was rely on expanding the confidence and ability potential of that own society, so that required the rural infrastructure development based on territory condition, natural potential and society needs, then made participative planning efficiently within rural infrastructure development planning was a good alternative, and this planning was modeled through Musrenbangdes forum.

The object of this research is to acknowledge how effective the Musrenbangdes are within rural infrastructure development planning based on the territory condition and potential at 4 villages in Kabupaten Tegal. The methodology used in this research was explanatory survey approach which was presented descriptive-qualitative by collecting and analyzing non-quantitative data with intended to explore the condition and potential of territory and described existing reality. To acknowledge the proses of participative planning, 92 respondents met the criteria and related to the research picked as sample.

According the result of the research conducted, rural infrastructure planning through Musrenbangdes can be stated effective because was based on the orientation of its environment (territory condition) an maximizing the sources (territory potential), but bringing about the object haven't been fulfilled yet. Rural development planning whether through condition and potential of territory analysis or participative planning resulted different ideas in accordance with geographical location of the territory but had similarity of the rural infrastructure planning form.

Rural infrastructure development program was part of activity that increasing populace prosperity, which the concrete formis availability of local infrastructure acces that more appropriate planning through Musrenbangdes on Kabupaten Tegalcan be serve as the basis of infrastructure development planning on rural.

Key words :rural infrastucture, effective, terrytory condition and potential.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1. Pembangunan Infrastruktur Indonesia.....	1
1.1.2. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.....	4
1.1.3. Musrenbang Sebagai Wadah partisipasi Masyarakat.....	6
1.1.4. Perencanaan Infrastruktur Pedesaan Melalui Musrenbangdes.....	9
1.2. Perumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	12
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2. Sasaran Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah.....	13
1.4.2. Ruang Lingkup Materi.....	16
1.6. Kerangka Pemikiran.....	17
1.7. Pendekatan dan metode Pelaksanaan Studi.....	20
1.7.1. Metode Penelitian.....	20
1.7.2. Tahap Persiapan.....	23
1.7.3. Tahap Kompilasi Data.....	24
1.7.4. Tahap Analisis.....	25
1.7.5. Pendekatan Studi.....	26
1.7.6. Kebutuhan Data.....	26
1.7.6.1. Teknik Pengumpulan Data.....	27
1.7.6.2. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	34
1.7.6.3. Teknik Sampling.....	35
BAB II KAJIAN PUSTAKA EFEKTIVITAS MUSRENBANGDES DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	
2.1. Perencanaan Pembangunan Pedesaan.....	37
2.1.1. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	37
2.1.2. Pembangunan Pedesaan.....	41
2.1.2.1. Desa.....	41
2.1.2.2. Infrastruktur Pedesaan.....	48
2.2. Partisipasi Masyarakat.....	56

2.2.1. Pengertian Partisipasi.....	56
2.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi.....	57
2.2.3. Tipe Peran Serta Masyarakat.....	59
2.2.4. Bentuk dan Wujud Peran Serta dalam Pembangunan.....	63
2.3. Perencanaan Pembangunan partisipatif.....	64
2.3.1. Musrenbangdes.....	64
2.3.2. Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif.....	66
2.4. Efektifitas Perencanaan	68
2.4.1. Pengertian efektifitas	68
2.4.2. Tingkat efektifitas Perencanaan	69
2.4.3. Efektivitas Musrenbangdes Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan Kondisi dan Potensi Wilayah.....	71
BAB III	GAMBARAN UMUM SARANA PRASARANA PEDESAAN DAN PROSES MUSRENBANGDES DI KABUPATEN TEGAL
3.1. Gambaran Umum Kabupaten Tegal.....	74
3.2. Kondisi Geografis Desa/Kelurahan di Kabupaten Tegal...	76
3.3. Kondisi Sarana Prasarana.....	78
3.3.1. Desa Kalibakung Kecamatan Balapulang.....	78
3.3.2. Desa Gunungjati Kecamatan Bojong.....	86
3.3.3. Desa Cerih Kecamatan Jatinegara.....	95
3.3.4. Desa Bojongsana Kecamatan Suradadi.....	103
3.4. Pelaksanaan Musrenbangdes.....	110
3.4.1. Desa Kalibakung.....	110
3.4.2. Desa Gunungjati.....	111
3.4.3. Desa Cerih.....	113
3.4.4. Desa Bojongsana.....	114
BAB IV	ANALISIS EFEKTIVITAS MUSRENBANGDES DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DI KABUPATEN TEGAL
4.1. Analisis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.....	117
4.1.1. Analisis Unsur Geografis Desa.....	117
4.1.2. Analisis Bentuk dan Pola Desa.....	120
4.1.3. Analisis Kebutuhan Jenis Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan Karakteristik Wilayah	122
4.1.4. Analisis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Melalui Kondisi Geografis dan Potensi Wilayah.....	126
4.2. Analisis Perencanaan Partisipatif Dalam Musrenbangdes.	129
4.2.1. Pelaksanaan Musrenbangdes.....	129

4.2.2.	Pemanfaatan Sumber Daya Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangdes.....	134
4.2.3.	Analisis Keikutsertaan Masyarakat Dalam Kegiatan Musrenbangdes.....	139
4.2.4.	Analisis Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Musrenbangdes.....	144
4.2.5.	Analisis Pola Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Kondisi Wilayah.....	145
4.2.6.	Analisis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Melalui Musrenbangdes.....	147
4.2.6.1	Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Infrastruktur Pedesaan (JALPI).....	148
4.2.6.2.	Analisis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Melalui Musrenbangdes.....	149
4.3	Analisis Rencana Kebutuhan Infrastruktur Pedesaan.....	152
4.3.1.	Rencana Kebutuhan Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan Musrenbangdes.....	152
4.3.2.	Rencana Berdasarkan Kondisi dan Potensi Wilayah.....	154
4.3.3.	Komparasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Melalui Musrenbangdes Dan Potensi Wilayah	156
4.3.4.	Peran Desa Dalam Pembangunan infrastruktur Desa.....	157
4.4.	Analisis Efektivitas Musrenbangdes Dalam Perencanaan pembangunan Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan Kondisi dan Potensi Wilayah.....	159
4.4.1.	Analisis Orientasi Terhadap Lingkungan.....	160
4.4.2.	Analisis Alokasi Sumberdaya Secara Optimum.....	162
4.4.3.	Analisis Realisasi Tujuan.....	164
4.5.	Frame Work Serta Koridor usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan Analisis Musrenbangdes dan Analisis Kondisi Wilayah...	168
4.6.	Temuan studi.....	175
 BAB V P E N U T U P		
5.1.	Kesimpulan.....	178
5.2.	Rekomendasi.....	180
DAFTAR PUSTAKA.....		184
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	1.1.	PETA WILAYAH KABUPATEN TEGAL.....	15
GAMBAR	1.2.	KERANGKA PEMIKIRAN EFEKTIVITAS MUSRENBANG DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN ...	19
GAMBAR	1.3.	TEKNIK ANALISIS.....	29
GAMBAR	2.1.	PENGEMBANGAN DESA.....	44
GAMBAR	2.2.	BENTUK DESA PANTAI.....	45
GAMBAR	2.3.	BENTUK DESA TERPUSAT/PEGUNUNGAN.....	45
GAMBAR	2.4.	BENTUK DESA DARATAN RENDAH.....	46
GAMBAR	2.5.	BENTUK DESA MENGELILINGI FASILITAS.....	47
GAMBAR	2.6.	ENAM POLA DESA.....	47
GAMBAR	2.7.	HUBUNGAN ANTARA SISTEM SOSIAL, EKONOMI INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ALAM.....	55
GAMBAR	2.8.	SKEMA GARIS BESAR UNTUK MENGEMBANGKAN VISI PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF.....	67
GAMBAR	2.9.	PENGUKURAN EFEKTIVITAS MSURENBANGDES BERDASARKAN KONDISI DAN POTENSI WILAYAH.....	73
GAMBAR	3.1.	PETA LOKASI PENELITIAN.....	75
GAMBAR	3.2.	KLASIFIKASI PERKEMBANGAN DESA DI KABUPATEN TEGAL.....	76
GAMBAR	3.3.	KONDISI GEOGRAFIS WILAYAH PEDESAAN DI KABUPATEN TEGAL.....	77
GAMBAR	3.4.	GRAFIK KUALITAS BANGUNAN PERUMAHAN.....	84
GAMBAR	3.5.	PETA LOKASI PENELITIAN DESA KALIBAKUNG...	85
GAMBAR	3.6.	GRAFIK RUMAH TANGGA PEMAKAI LISTRIK.....	91
GAMBAR	3.7.	GRAFIK KUALITAS BANGUNAN PERUMAHAN.....	92
GAMBAR	3.8.	GRAFIK KONDISI LAHAN DESA GUNUNGJATI.....	93
GAMBAR	3.9.	PETA LOKASI PENELITIAN DESA GUNUNGJATI...	94
GAMBAR	3.10.	GRAFIK ADMINSTRASI WILAYAH DESA CERIHL...	97
GAMBAR	3.11.	PETA LOKASI PENELITIAN DESA CERIHL.....	102
GAMBAR	3.12.	GRAFIK RUMAH TANGGA PEMAKAI LISTRIK.....	107
GAMBAR	3.13.	GRAFIK KONDISI LAHAN DESA CERIHL.....	108
GAMBAR	3.14.	PETA LOKASI PENELITIAN DESA BOJONGSANA..	109
GAMBAR	4.1.	KONDISI DAN LETAK GEOGRAFIS LOKASI PENELITIAN.....	119
GAMBAR	4.2.	BENTUK DAN POLA DESA.....	122
GAMBAR	4.3.	RENCANA INFRASTRUKTUR PEDESAAN BERDASARKAN KONDISI DAN POTENSI WILAYAH.....	126
GAMBAR	4.4.	MEKANISME PELAKSANAAN MUSRENBANGDES.	132
GAMBAR	4.5.	ALUR PIKIR PROSES MUSRENBANGDES.....	134

GAMBAR 4.6.	GRAFIK USIA, PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN PESERTA MUSRENBANGDES.....	136
GAMBAR 4.7.	GRAFIK PENDAPATAN DAN MATA PENCAHARIAN INDIVIDU PESERTA MSURENBANGDES.....	138
GAMBAR 4.8.	GRAFIK DERAJAT KESUKARELAAN PESERTA MUSRENBANGDES.....	140
GAMBAR 4.9.	GRAFIK DERAJAT MOTIVASI USULAN KEGIATAN PESERTA MSURENBANG.....	143
GAMBAR 4.10.	POLA PARTISIPASI TERHADAP PERBEDAAN KONDISI GEOGRAFI.....	146
GAMBAR 4.11.	RENCANA INFRASTRUKTUR PEDESAAN HASIL MUSRENBANGDES.....	152
GAMBAR 4.12.	KOMPARASI PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN BERDASARKAN ANALISA KONDISI DAN POTENSI DAN MUSRENBANGDES.....	157
GAMBAR 4.13.	PENGUKURAN EFEKTIVITAS MUSRENBANGDES BERDASARKAN KONDISI DAN POTENSI WILAYAH.....	160
GAMBAR 4.14.	ORIENTASI USULAN MUSRENBANGDES TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN.....	162
GAMBAR 4.15.	OPTIMALISASI USULAN MUSRENBANGDES TERHADAP POTENSI WILAYAH.....	163
GAMBAR 4.16.	REALISASI TUJUAN MUSRENBANGDES.....	165
GAMBAR 4.17.	PERENCANAAN MUSRENBANGDES BERDASARKAN KONDISI DAN POTENSI WILAYAH.....	167
GAMBAR 4.18.	ARAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN BERDASARKAN MUSRENBANGDES SERTA KONDISI DAN POTENSI WILAYAH.....	169
GAMBAR 4.19.	PROSES APLIKASI MUSRENBANGDES DI LAPANGAN.....	171
GAMBAR 4.20.	SARAN PERUBAHAN PROSES MUSRENBANGDES.	173
GAMBAR 5.1.	PERUBAHAN PROSES PELAKSANAAN MUSRENBANGDES.....	182

DAFTAR TABEL

TABEL	I.1.	SASARAN DAN VARIABEL PENELITIAN.....	31
TABEL	II.1.	KOMPONEN INFRASTRUKTUR APWA DAN P3KT....	49
TABEL	III.1.	KONDISI KEPENDUDUKAN DAN ORGANISASI DESA KALIBAKUNG KECAMATAN BALAPULANG..	79
TABEL	III.2.	KONDISI INFRASTRUKTUR DESA KALIBAKUNG KECAMATAN BALAPULANG.....	80
TABEL	III.3	KONDISI KEPENDUDUKAN DAN ORGANISASI DESA GUNUNGJATI KECAMATAN BOJONG	86
TABEL	III.4	ADMINISTRASI WILAYAH DESA GUNUNGJATI KECAMATAN BOJONG.....	87
TABEL	III.5	KONDISI KEPENDUDUKAN DAN ORGANISASI DESA CERIHKECAMATAN JATINEGARA.....	95
TABEL	III.6	ADMINISTRASI WILAYAH DESA CERIHKECAMA- TAN JATINEGARA.....	96
TABEL	III.7	KONDISI SARANA PRASARANA DESA CERIHK KECAMATAN JATINEGARA.....	97
TABEL	III.8	KONDISI KEPENDUDUKAN DAN ORGANISASI DESA BOJONGSANA KECAMATAN SURADADI.....	103
TABEL	III.9	KONDISI SARANA PRASARANA DESA BOJONG- SANA KECAMATAN SURADADI.....	104
TABEL	III.10.	ADMINISTRASI WILAYAH DESA BOJONGSANA KECAMATAN SURADADI.....	105
TABEL	III.11	RENCANA KEGIATAN INFRASTRUKTUR PEDESA- AN (JALAN, AIR BERSIH, IRIGASI) DESA KALIBA- KUNG MELALUI MUSRENBANGDES.....	110
TABEL	III.12.	RENCANA KEGIATAN INFRASTRUKTUR PEDESA- AN (JALAN, AIR BERSIH) DESA GUNUNGJATI MELALUI MUSRENBANGDES.....	112
TABEL	III.13.	RENCANA KEGIATAN INFRASTRUKTUR PEDESA- AN (LISTRIK, PERUMAHAN, IRIGASI) DESA GUNUNGJATI MELALUI MUSRENBANGDES...	112
TABEL	III.14	RENCANA KEGIATAN INFRASTRUKTUR PEDESA- AN (JALAN, AIR BERSIH) DESA CERIHK MELALUI MUSRENBANGDES.....	113
TABEL	III.15.	RENCANA KEGIATAN INFRASTRUKTUR PEDESA- AN (PERUMAHAN DAN IRIGASI) DESA CERIHK MELALUI MUSRENBANGDES.....	114
TABEL	III.16.	RENCANA KEGIATAN INFRASTRUKTUR PEDESA- AN (JALAN, AIR BERSIH, IRIGASI) DESA BOJONGSANA MELALUI MUSRENBANGDES.....	116
TABEL	IV.1.	LETAK GEOGRAFIS DESA.....	118

TABEL	IV.2.	BENTUK DAN POLA DESA.....	120
TABEL	IV.3.	JENIS-JENIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH.....	124
TABEL	IV.4.	HAMBATAN-HAMBATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH.....	125
TABEL	IV.5.	PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN BERDASARKAN KONDISI DAN POTENSI DESA.....	127
TABEL	IV.6.	HAMBATAN PELAKSANAAN MUSRENBANGDES ...	133
TABEL	IV.7.	ANALISIS USIA DAN TINGKAT PENDIDIKAN PESERTA MUSRENBANGDES DI DESA KALIBAKUNG.....	135
TABEL	IV.8.	MATA PENCAHARIAN DAN TINGKAT PENDAPATAN PESERTA MUSRENBANGDES DI DESA KALIBAKUNG.....	137
TABEL	IV.9.	KELOMPOK MASYARAKAT PESERTA MUSRENBANGDES.....	138
TABEL	IV.10.	DERAJAT KESUKARELAAN PESERTA MUSRENBANGDES.....	139
TABEL	IV.11.	TINGKAT KEHADIRAN PESERTA MUSRENBANGDES.....	141
TABEL	IV.12.	TINGKAT KEAKTIFAN PESERTA MUSRENBANGDES.....	142
TABEL	IV.13.	MOTIVASI USULAN KEGIATAN PESERTA MUSRENBANGDES.....	142
TABEL	IV.14.	TINGKAT KEAKTIFAN PESERTA MUSRENBANGDES.....	144
TABEL	IV.15.	KETERLIBATAN DALAM TAHAPAN PEMBANGUNAN PESERTA MUSRENBANGDES	145
TABEL	IV.16.	POLA PARTISIPASI TERHADAP PERBEDAAN KONDISI GEOGRAFIS.....	147
TABEL	IV.17.	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN.....	148
TABEL	IV.18.	ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN (JALAN, AIR BERSIH DAN LISTRIK) MELALUI MUSRENBANGDES.....	149
TABEL	IV.19.	ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PERUMAHAN DAN IRIGASI) MELALUI MUSRENBANGDES.....	150
TABEL	IV.20.	RENCANA INFRASTRUKTUR PEDESAAN BERDASARKAN HASIL MUSRENBANGDES.....	153
TABEL	IV.21.	RENCANA INFRASTRUKTUR PEDESAAN BERDASARKAN ANALISIS KONDISI DAN POTENSI WILAYAH.....	155

TABEL	IV.22.	KOMPARASI PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN BERDASARKAN KEBUTUHAN (MUSRENBANGDES) DAN ANALISIS KONDISI DAN POTENSI WILAYAH.....	156
TABEL	IV.23.	ORIENTASI USULAN MUSRENBANGDES TERHADAP LINGKUNGAN.....	161
TABEL	IV.24	OPTIMALISASI SUMBER DAYA SECARA OPTIMUM	163
TABEL	IV.25	REALISASI TUJUAN:.....	164
TABEL	IV.26	EFEKTIVITAS MUSRENBANGDES DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN BERDASARKAN KONDISI DAN POTENSI WILAYAH.....	166
TABEL	IV.27	FRAME WORK KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN BERDASARKAN MUSRENBANGDES SERTA ANALISIS KONDISI DAN POTENSI WILAYAH.....	170
TABEL	IV.28	SARAN PERUBAHAN MEKANISME MUSRENBANGDES.....	172
TABEL	V.1.	FRAME WORK KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DALAM MUSRENBANGDES.....	181

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih sangat tertinggal dibandingkan sejumlah negeri tetangga. Ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur itu tak hanya terlihat dari tertundanya proyek-proyek besar, tapi juga dapat dirasakan langsung dari kondisi jalan yang rusak, seretnya pengadaan air bersih, dan buruknya kondisi prasarana umum.

Dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan memperparah keadaan tersebut, krisis ekonomi menurunkan kemampuan penyediaan jasa pelayanan sarana dan prasarana, terutama karena berkurangnya kemampuan pendanaan dalam memenuhi kebutuhan operasi dan pemeliharaan jaringan sarana dan prasarana fisik yang telah ada, sehingga diperlukan penanganan yang lebih efektif serta menyeluruh di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga hasilnya akan berpengaruh besar terhadap tingkat penyediaan, kualitas pelayanan jasa serta efektivitas pengelolaan infrastruktur.

Berbagai sub-sektor infrastruktur pasca-reformasi hingga saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Di sub-sektor irigasi hingga 2002, sekitar 1,5 juta hektare dari 6,7 juta hektar jaringan irigasi dalam kondisi rusak ringan dan berat dan pemerintah hanya mampu menyediakan 40-50% biaya operasi dan pemeliharaan (Bappenas, 2003). Selain itu, sekitar 15 ribu – 20 ribu hektare per

tahun lahan pertanian beririgasi teknis beralih fungsi (konversi) menjadi lahan non-pertanian. Kerusakan jaringan irigasi akan menurunkan kinerja penyediaan air irigasi sehingga dapat menurunkan luas areal tanam padi, dan bila tidak diantisipasi secara serius akan mengganggu pemenuhan produksi beras nasional.

Kerusakan parah juga terjadi pada sub-sektor jalan. Pada tahun 2000, sepanjang 140 ribu km jalan (atau 48% dari 291,5 ribu km) dalam keadaan rusak ringan dan berat, termasuk jalur urat nadi perekonomian seperti Pantura (Jawa) dan Lintas Timur Sumatera. Sepanjang 8.798 km jalan nasional dan jalan propinsi berada dalam kondisi rusak pada tahun 2000. Untuk jalan kabupaten kerusakan mencapai panjang 134.443 km (Bappenas, 2003).

Sejak 1993/94, jalan kabupaten tidak pernah berada dalam keadaan baik dan mantap, rata-rata separuhnya berada dalam kondisi rusak baik ringan maupun berat (Gie, 2003). Oleh karena biaya pemeliharaan yang jauh dari mencukupi, maka terjadi *backlog maintenance* sehingga pada tahun 2001 panjang jalan nasional dan propinsi yang rusak secara cepat menjadi dua kali kondisi tahun 2000 (16.740 km) sedangkan panjang jalan kabupaten yang rusak diperkirakan sudah mencapai sekitar 150.000 km (Gie, 2003). Selain tidak memadainya dana APBN, beberapa faktor lain menjadi penyebab, antara lain adalah *excessive overloading*, rendahnya kualitas konstruksi jalan, bencana alam, serta belum tumbuhnya kesadaran memelihara aset publik yang berbentuk jalan (Gie, 2003).

Kondisi serupa juga terjadi pada sub-sektor kelistrikan, rasio elektrifikasi masih rendah yaitu sekitar 58% pada tahun 2001. Di sisi lain, tidak adanya

investasi baru di bidang perlistrikan (pembangkit baru) mengakibatkan 28 daerah di luar Jawa-Bali mengalami krisis listrik (Bappenas, 2003).

Seperti kondisi infrastruktur lainnya, penyediaan air bersih pun masih menjadi kendala, saat ini terjadi penurunan kuantitas dan kualitas air baku. Sistem dan jaringan prasarana dan sarana masih terbatas. 65 persen PDAM saat ini mempunyai utang sebesar 4,46 triliun rupiah. Sebanyak 187 PDAM beroperasi di tingkat kabupaten dan kota melayani sekitar 39% total penduduk dengan empat juta sambungan.

Infrastruktur sebenarnya merupakan kebutuhan vital untuk menunjang kegiatan ekonomi. Kemajuan ekonomi suatu negara biasanya berkorelasi dengan pembangunan infrastruktur di negara itu. Negara yang infrastrukturnya baik biasanya makin makmur (Dewanto, 2004).

Melihat ketertinggalan Indonesia dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah kemudian menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai pembangunan yang sangat mendesak saat ini. Namun, pembangunan infrastruktur itu bukannya tanpa kendala, persoalan utamanya pada masalah pendanaan pemerintah yang sangat terbatas (Wiranto, 2004)

Dari data-data yang ada menunjukkan investasi pembangunan infrastruktur di dalam negeri terus merosot. Pada tahun 1993/1994, dana pemerintah yang dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur mencapai 5,3 persen dari PDB (produk domestik bruto), sedangkan pada tahun 1997/1998 dana yang disisihkan untuk pembangunan infrastruktur hanya 3,12 persen dari PDB, tahun 2002 lebih rendah lagi yaitu hanya 2,3 % dari PDB (Wiranto, 2004).

Selama tujuh tahun terakhir, investasi dalam pembangunan infrastruktur tak pernah mencapai angka lima persen dari PDB. Malah, belakangan anjlok sampai 1,5 - 2 persen dari PDB. Karena itulah, pembangunan infrastruktur yang tertinggal itu harus dikejar. Berdasar kajian Bappenas, Indonesia membutuhkan dana investasi untuk infrastruktur sekitar 1.500 triliun rupiah.

Seperti diketahui, dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur terbilang cukup besar. Sementara dana yang disalurkan lewat APBN sangat tidak mencukupi, pada tahun anggaran 2005 dianggarkan sebesar 13 triliun rupiah untuk banyak proyek yang dilaksanakan dan masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur.

1.1.2 Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Pembangunan pedesaan haruslah merupakan inner will, yaitu suatu proses emansipasi diri, inisiatif dan partisipasi kreatif masyarakat dalam pembangunan karena keberhasilan pembangunan pedesaan adalah dengan mengembangkan potensi kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri (Tjokroamidjojo, 1983)

Cara yang digunakan di Indonesia dalam membangun desa, adalah ,meningkatkan desa swadaya (tradisional) menjadi desa swasembada (maju) melalui desa swakarsa (transisi), diadakan peningkatan kegiatan sosial ekonomi serta membangun prasarannya yang diperlukan, sehingga pendapatan perkapita bertambah. Indikator dalam menilai, tipologi desa tadi (swadaya, swakarsa, swasembada) adalah: alam, manusia, letak desa, mata pencaharian, produksi, adat, kelembagaan, pendidikan, swadaya, gotong royong, prasarana dan administrasi.

Program Pembangunan infrastruktur pedesaan adalah merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat, bentuk desa yang ada sangat mempengaruhi usulan kegiatan infrastruktur pedesaan tersebut, bentuk-bentuk desa yang ada seperti desa memusat pegunungan, memusat fasilitas, bentuk desa linear ataupun desa tepi pantai sangat berpengaruh terhadap bentuk dan jenis kebutuhan pembangunan infrastruktur pedesaan sehingga tersedia infrastruktur lokal yang lebih memadai, dapat dimanfaatkan secara langsung dan cepat oleh masyarakat, disamping itu manfaat lain yang dapat diperoleh adalah dalam bentuk peningkatan ketrampilan (*human investment*) didalam penyelenggaraan prasarana lokal.

Kebutuhan pokok manusia pada umumnya dan manusia di pedesaan pada khususnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok. Pertama, meliputi kebutuhan akan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga yang dapat dinyatakan dapat memenuhi persyaratan untuk hidup. Kedua, yang meliputi kebutuhan berupa sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat dalam makna luas, seperti: air minum, kesehatan, pendidikan, sanitasi lingkungan, angkutan umum (Daldjoeni, 1998).

Belum ada ketentuan mengenai jenis infrastruktur pedesaan yang menjadi dasar usulan kegiatan, infrastruktur tersebut dapat berupa jalan poros desa, jalan desa/lingkungan/setapak, jalan usaha tani/inspeksi, jembatan gantung, prasarana air bersih, pasar tradisional, balai desa, lumbung desa, posyandu, sekolah dasar, tambatan perahu, dermaga, tempat penjemuran jala/ikan, sarana sanitasi dasar, pangkalan angkutan, pintu bagi air, pintu air, saluran tersier, talang,

bendung kecil atau tanggul, dan lain lain (Kimpraswil, 2001). Dari keterangan tersebut infrastruktur pedesaan dapat dikategorikan dalam lima kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan dalam pembangunan infrastruktur pedesaan yaitu: jalan desa, air bersih, listrik, perumahan, irigasi (JALPI).

Dalam kaitan dengan pembangunan infrastruktur pedesaan, pemerintah dan DPR sepakat memberikan anggaran 250 juta rupiah setiap desa pada tahun anggaran 2005, dengan komposisi maksimal 20 desa untuk kabupaten maju, dan minimal 30 desa untuk kabupaten tertinggal. Program infrastruktur desa tertinggal yang direncanakan meliputi, pembangunan jalan, jembatan, irigasi, air bersih, listrik serta kebutuhan masyarakat lainnya. Sedangkan sasaran utama yang hendak dicapai yakni membuka isolasi desa guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak, kegiatan sosial ekonomi meningkat, sehingga kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi diharapkan juga turut meningkat.

1.1.3 Musrenbang sebagai wadah Perencanaan Pembangunan melalui Partisipasi Masyarakat.

Upaya-upaya daerah untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sudah banyak dilaksanakan, seperti Kota Solok Sumatera Barat misalnya, salah satu upaya tersebut dilakukan dengan menghidupkan lagi sistem Nagari dalam perencanaan pembangunan. Di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, partisipasi masyarakat

dalam perencanaan pembangunan daerah juga dilakukan melalui forum adat, yaitu Tudang Sipulung. Di Kota Tasikmalaya dan Kota Surakarta, upaya peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dengan memperbaiki mekanisme perencanaan sehingga dinas, badan, lembaga dan kantor (DIBALEKA) pemerintahan kota bisa lebih menangkap aspirasi masyarakat.

Upaya untuk mengembangkan partisipasi masyarakat di era otonomi daerah, sejauh ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan. Mulai dari mengidentifikasi kesiapan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/BPD sebagai lembaga perencanaan pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan, mengadakan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di beberapa kelurahan untuk mengeksplorasi persepsi dan orientasi masyarakat, mengadakan pelatihan di beberapa kelurahan sebagai *pilot project* pengembangan mode perencanaan partisipatif, hingga merancang mekanisme Perencanaan Pembangunan Partisipatif (PPP) dan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah.

Dikembangkannya partisipasi masyarakat dalam perencanaan bertujuan untuk: (1) Partisipasi menjamin perlakuan pemerintah yang tidak memperlakukakan rakyat; (2) Partisipasi berlaku sebagai suatu instrument berharga untuk kegiatan memobilisasi, mengorganisasi dan mengembangkan oleh rakyat; dan (3) partisipasi berfungsi sebagai saluran lokal untuk memperoleh jalan masuk ke bidang-bidang makro pembuat keputusan (Analisis CSIS Nomor 2, 1990).

Sejak Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah, paradigma pembangunan daerah bergeser dari efisiensi struktural mengarah ke pemerintahan yang lebih demokratis dimana

dalam perencanaan, pembahasan, pelaksanaan pembangunan masyarakat diikutsertakan secara aktif didalamnya.

Merupakan sejarah baru bagi bangsa Indonesia karena untuk pertama kali memiliki Undang-undang Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu dengan ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, karena selama ini perencanaan pembangunan di daerah diatur di tingkat Menteri misalnya Kepmendagri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Daerah (P5D).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, salah satu tahapan perencanaan dan penganggaran yang harus dilakukan di tingkat daerah adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan forum lintas pelaku dimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan khususnya di daerah. Dalam Musrenbang perencanaan dari tingkat desa/kelurahan (Musrenbangdes), kecamatan (Musrenbangkec), kabupaten/kota (Musrenbangda) hingga level nasional dilakukan melalui forum musyawarah. Musrenbang merupakan salah satu wahana yang bertujuan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. (Surat Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 0259/M.PPN/I/2005 tanggal 20 Januari 2005 Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2005)

Dalam Musrenbang masyarakat mengemban peran konsolidasi partisipasi, agregasi kepentingan, menyampaikan preferensi, memilih wakil,

monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil musrenbang. Pemerintah berperan dalam penyediaan informasi, memberikan asistensi teknis, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Adapun DPRD berperan dalam penjangkaran aspirasi dan pengawasan.

Dengan demikian jalan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan daerah adalah dengan partisipasi baik proses, pengorganisasian ataupun pengembangan kapasitas masyarakat itu sendiri, sehingga keberadannya benar-benar diperhitungkan menjadi suatu instrumen yang berharga.

1.1.4 Perencanaan Infrastruktur Pedesaan Melalui Musrenbangdes

Dokumen Musrenbang disusun secara bertingkat dari Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten, data dasar perencanaan yang diusulkan bermula dari Musrenbangdes, yaitu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, diharapkan dengan hasil Musrenbangdes yang berkualitas akan dihasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang baik, tetapi pada pelaksanaannya hasil Musrenbangdes belum mempunyai landasan perencanaan yang baik.

Pembangunan dalam pandangan masyarakat desa dikonotasikan sebagai pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan lingkungan, gorong-gorong, irigasi, sekolah, penerangan dan lain-lain. Usulan-usulan kegiatan masyarakat desa dalam Musrenbangdes sebagian besar menunjukkan rencana pembangunan fisik di sekitarnya yang dianggap dibutuhkan untuk dibangun. Dalam pandangan masyarakat desa, keberhasilan atau kemajuan desa ditandai dengan tersedianya sarana prasarana yang baik sehingga segala aktifitas yang mereka lakukan berjalan dengan baik dan lancar. Belum ada ketentuan mengenai jenis

pembangunan fisik yang menjadi dasar usulan kegiatan dalam Musrenbangdes, usulan kebutuhan pembangunan fisik tersebut sangat tergantung kepada kondisi masyarakat, lingkungan dan kelengkapan sarana prasarana yang dimilikinya.

Memang pada kenyataannya fasilitas infrastruktur mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, kegiatan ekonomi dan bisnis. Pengembangan infrastruktur pedesaan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi program pengentasan masyarakat dari kemiskinan, melalui peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan dasar dan pelayanan sosial-ekonomi. Kegiatan merencanakan, membangun, dan memelihara infrastruktur pedesaan juga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha masyarakat di daerah pedesaan. "Pemerintah memang perlu serius memperbaiki infrastruktur desa, karena hal itu akan meningkatkan akses masyarakat desa pada pelayanan dan pasar akibat jalan dan transportasi yang baik, sehingga produksi masyarakat desa bisa cepat ke pasar" (Effendy, 2005). Pendapat tersebut mendukung bahwa pembangunan infrastruktur di pedesaan memang penting untuk dilaksanakan.

Pembangunan infrastruktur pedesaan dengan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan dari bawah ke atas tersebut (daerah ke pusat) itu akan mendorong partisipasi masyarakat pedesaan yang lebih luas, menyerap tenaga kerja di desa, dan menimbulkan rasa memiliki infrastruktur itu sendiri sehingga masyarakat termotivasi untuk merawatnya (Effendi, 2005). Kendala yang ada di desa adalah keterbatasan untuk mengidentifikasi serta menganalisa sumber-sumber daya yang dimiliki berdasarkan potensi wilayahnya, seperti yang diutarakan oleh

(Young, 1990) pada umumnya keterbatasan masyarakat adalah mengembangkan dan melatih kemampuan mereka dan mengekspresikan kebutuhan, pemikiran dan perasaannya.

Sehingga kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbangdes yang sebagian besar merupakan kegiatan pembangunan infrastruktur, hanya berdasarkan pada kebutuhan nyata yang ada di desanya, sehingga dibutuhkan suatu arahan (*guidance*) dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan dalam Musrenbangdes. Perencanaan yang dihasilkan, untuk lebih memantapkannya perlu bantuan para ahli dalam bidangnya, seperti yang diutarakan oleh (O'Connor, 1999, Halpern, 1995)

1.2 Perumusan Masalah

Pemberdayaan perencanaan partisipatif dalam konteks perencanaan pembangunan infrastruktur desa dalam rangka ikut membantu mengatasi permasalahan kebutuhan infrastruktur merupakan suatu alternatif yang baik, serta dalam rangka lebih memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan. Dengan optimalisasi kualitas perencanaan dan aspirasi yang ada di masyarakat berarti mendekatkan rakyat kepada tujuan yang diinginkannya.

Musrenbangdes sebagai wadah perencanaan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan perencanaan khususnya dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur pedesaan seharusnya menjadi fokus dan dasar perencanaan pembangunan daerah, tetapi kenyataannya wujud perencanaan infrastruktur yang tertuang dalam dokumen Musrenbangdes pada umumnya bersifat lokalitas.

Dari latar belakang permasalahan yang ada dapat disimpulkan beberapa masalah pokok yaitu:

1. Perencanaan partisipatif masyarakat melalui proses Musrenbangdes dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan bersifat lokalitas dan belum mempunyai dasar perencanaan wilayah.
2. Belum adanya arahan (*guidance*) yang jelas tentang kriteria- kriteria kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan yang seharusnya diusulkan melalui Musrenbangdes.
3. Pada umumnya pelaksanaan proyek/program Pemerintah yang dikucurkan di Desa belum berdasarkan hasil perencanaan Musrenbangdes.

Berpijak dari permasalahan diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah:
"Bagaimana Efektivitas Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan berdasarkan Pada Kondisi Dan Potensi Wilayah Pedesaan"

1.3 Tujuan dan Sasaran penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas Musrenbangdes dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan di Kabupaten Tegal.

1.3.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan diatas, sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Menganalisis perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan berdasarkan kondisi dan potensi pedesaan.

2. Menganalisis perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui musrenbangdes.
3. Menganalisis efektivitas Musrenbangdes dalam perencanaan infrastruktur pedesaan berdasarkan kondisi dan potensi pedesaan.
4. Memberikan arahan (*guidance*) atau koridor kriteria kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan yang diajukan melalui Musrenbangdes berdasarkan analisis kondisi dan potensi wilayah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan arahan (*guidance*) serta koridor bagi masyarakat desa dalam mengusulkan rencana pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes.
2. Memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait serta dasar perencanaan bagi Masyarakat desa tentang kriteria-kriteria kebutuhan infrastruktur pedesaan berdasarkan kondisi, potensi dana kebutuhan wilayah pedesaan, sehingga dapat merencanakan dan menentukan alokasi kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan secara efektif.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang lingkup wilayah

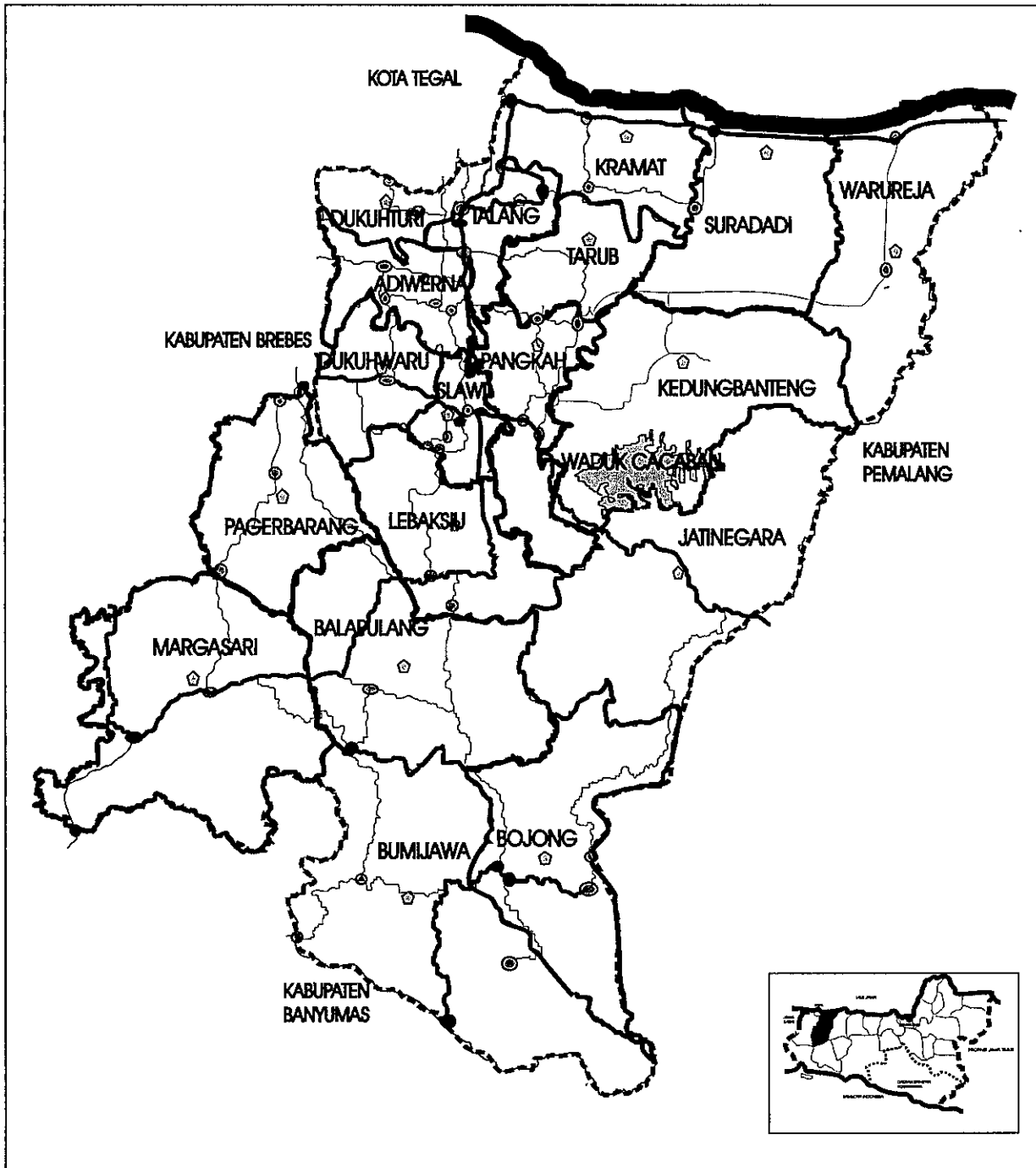
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tegal, dengan mengambil studi kasus 4 (empat) Desa di 4 (empat) Kecamatan. Wilayah yang terpilih adalah kecamatan bertopografi daerah pantai, dataran rendah-menengah dan dataran tinggi, adapun desa-desa yang dipilih adalah desa yang mempunyai







karakteristik bentuk desa: 1) memusat gunung, 2) memusat fasilitas, 3) linear dan 4) pantai.

Pemilihan lokasi ditujukan untuk dapat membedakan kebutuhan-kebutuhan infrastruktur yang berbeda-beda dengan melihat kondisi topografis dan potensi wilayahnya, dengan perbedaan ini maka diharapkan akan diperoleh bermacam kebutuhan, hambatan dan pola yang ada berdasarkan letak geografis.

Perencanaan Pembangunan haruslah berdasarkan kondisi lingkungan dan potensi wilayah seperti diutarakan oleh (Kodoatie, 2003), bahwa lingkungan alam merupakan pendukung dasar dari semua system yang ada. Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting.

Kondisi geografis wilayah ikut menentukan jenis dan kebutuhan infrastruktur pedesaan, perencanaan pembangunan infrastruktur di pedesaan mempunyai karakteristik dan jenis-jenis yang berbeda pula, dengan mengambil lokasi yang mempunyai kondisi geografis yang berbeda-beda diharapkan akan menghasilkan berbagai usulan berdasarkan kondisi dan potensi wilayahnya masing-masing.



 MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCA SARAJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO	PETA KABUPATEN TEGAL		UTARA
	LEGENDA		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Ibu Kota Kecamatan </div> <div style="text-align: center;">  Ibu Kota Kabupaten </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  Jalan Propinsi </div> <div style="text-align: center;">  Jalan Kabupaten </div> </div>			SKALA
		TESIS EFEKTIVITAS MUSRENBANGDES DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	
NO. GAMBAR			
		1.1	
		SUMBER	
		BAPPEDA KABUPATEN TEGAL	

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

1. Efektivitas merupakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dengan mempergunakan sarana dan prasarana serta sumberdaya yang tersedia dalam studi ini adalah analisis terhadap efektivitas Musrenbangdes dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan.
2. Partisipasi masyarakat dalam studi ini adalah proses perencanaan partisipatif yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) .
3. Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa. (Dalam UU No. 25 Tahun 2004 disebut Musrenbangdes, Sebelumnya disebut Rakorbangdes/Musbangdes), Untuk memudahkan substansi penulisan maka selanjutnya untuk menyebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah dengan Musrenbangdes, ditetapkan sesuai dengan istilah sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004.)
4. Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.
5. Desa tempat atau daerah yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian agraris, di mana penduduk berkumpul dan hidup bersama di mana

mereka dapat menggunakan lingkungannya setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka.

6. Pedesaan adalah suatu wilayah yang mempunyai karakteristik Desa.
7. Infrastruktur Pedesaan adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan di wilayah desa dalam penyediaan yang dikategorikan dalam Jalan, Air bersih, Listrik Perumahan dan Irigasi (JALPI) dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka.
8. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada azas prioritas.

1.6 Kerangka Pemikiran

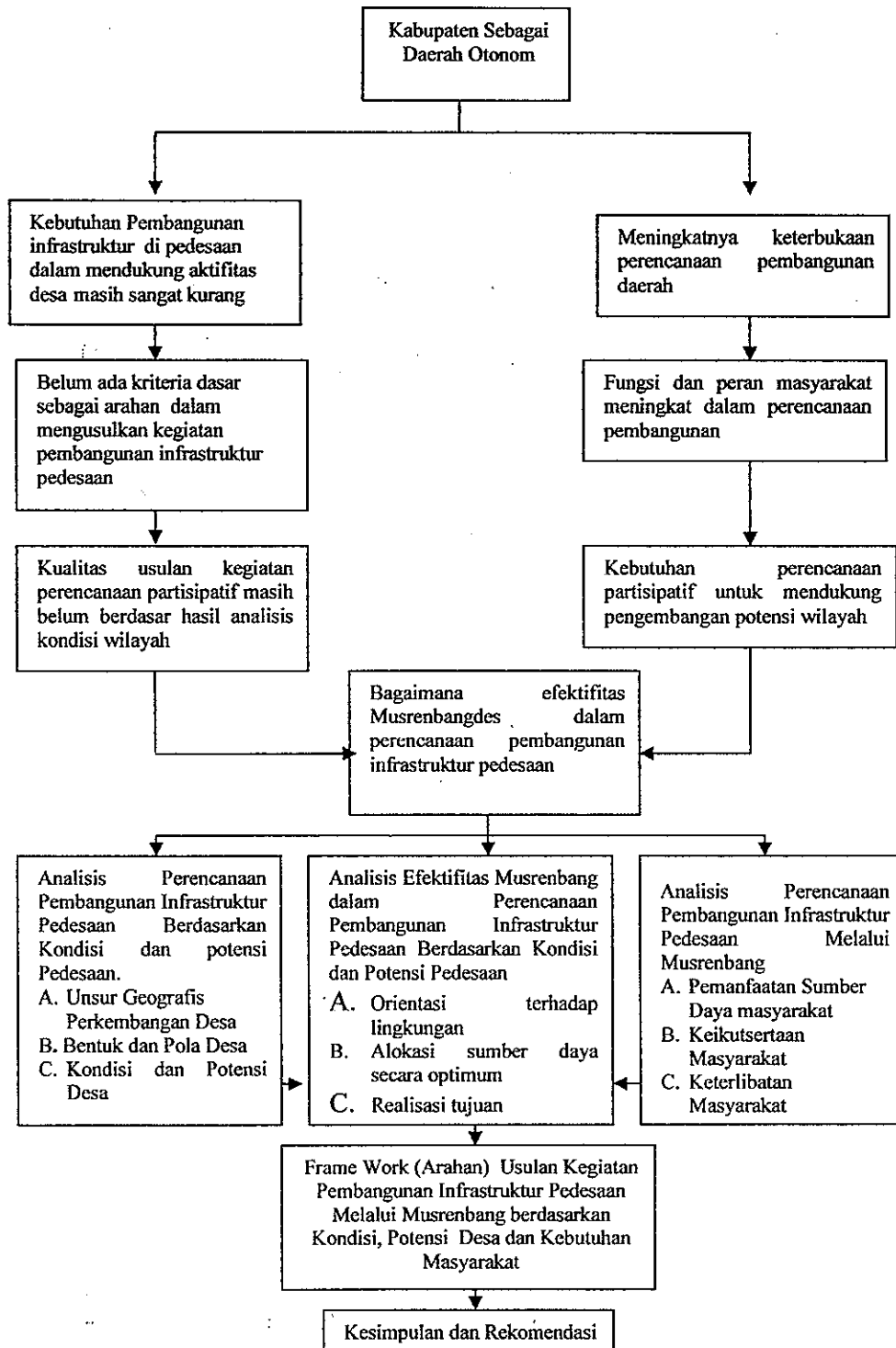
Undang-undang No. 22 tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 150 sampai dengan 154 merupakan salah satu landasan yuridis bagi perencanaan pembangunan di pedesaan. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Metode perencanaan partisipatif selanjutnya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dengan diterbitkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada proses perencanaan partisipatif yang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan. (Musrenbangdes), Kecamatan (Musrenbangkec) dan Kabupaten (Musrenbangda) yang merupakan manifestasi keinginan dari stakeholders untuk kemajuan, kesejahteraan masyarakat.

Proses panjang perencanaan partisipatif bermula dari Musrenbangdes, dalam forum ini aspirasi masyarakat disalurkan, selama ini pemahaman sebagian masyarakat desa tentang pembangunan adalah pembangunan infrastruktur, hal ini terlihat dengan usulan yang diajukan sebagian besar adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan desa/lingkungan/setapak, jembatan gantung, prasarana air bersih, pasar tradisional, balai desa dan lain-lain.

Dari proses Bottom Up melalui Musrenbang usulan Musrenbangdes hanya mencapai 5 % dari total usulan yang masuk, mayoritas (95%) adalah usulan dari Badan/ Dinas/ Instansi (Bappeda, 2004). Musrenbangdes dalam perencanaan pembangunan daerah seharusnya menjadi acuan perencanaan di tingkatan lebih lanjut sehingga dihasilkan perencanaan yang berkualitas dan komprehensif.

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengusulan kegiatan di tingkat desa menjadi acuan perencanaan kegiatan di tingkat yang lebih tinggi, kerangka pemikirannya dapat dilihat pada Gambar 1.2 dibawah ini:



GAMBAR 1.2.
KERANGKA PEMIKIRAN
EFEKTIFITAS MUSRENBANGDES DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN
BERDASARKAN KONDISI DAN POTENSI WILAYAH

Sumber: Hasil Analisis, 2005

1.7 Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Studi

1.7.1 Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan itu dilandasi oleh metode keilmuan dimana dilakukan dengan pendekatan rasional dan empiris. Pendekatan rasional memberikan kerangka berpikir yang koheren dan logis, sedangkan pendekatan empiris memberikan kerangka pengujian dalam memastikan kebenaran.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian survei eksplanatori. Penelitian survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual (Nazir, 1988) dan Eksplanatori artinya memberikan penjelasan atau hal-hal yang berkaitan dengan menjelaskan, baik menjelaskan peristiwa atau keadaan sekarang, maupun menjelaskan peristiwa atau keadaan yang akan datang.

Jenis penelitian survei termasuk ke dalam penelitian deskriptif evaluatif hal ini dijelaskan menurut (Nazir,1988) dalam metode survei juga dikerjakan evaluasi serta perbandingan-perbandingan terhadap hal-hal yang dikerjakan orang dalam menangani situasi atau masalah yang serupa dan hasilnya dapat digunakan dalam pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di masa mendatang. Hakekat dari penelitian deskriptif adalah upaya untuk mencari pemecahan masalah dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta-fakta atau bukti yang ada. Penelitian deskriptif diartikan sebagai menggambarkan dan

melukiskan keadaan subyek dan atau obyek penelitian (lembaga, masyarakat, daerah dan lain lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya (Nawawi, 1998)

Sedangkan penelitian evaluasi pada hakekatnya adalah untuk mengembangkan kerangka berpikir dalam rangka pengambilan keputusan (Arikunto, 1998), dengan demikian tujuan dari penelitian evaluasi adalah mengumpulkan data yang akan digunakan dalam rangka pengambilan keputusan.

Fungsi penelitian evaluasi dimasukan kedalam dua kategori yaitu:

1. Evaluasi formatif, yaitu penilaian atau evaluasi yang difungsikan sebagai pengumpulan data pada saat suatu program yang diteliti masih/sedang berlangsung. Data hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk “membentuk” (*to form*) dan memodifikasi program kegiatan. Jika pada pertengahan kegiatan program sudah diketahui hal-hal apa yang negatif, maka para pengambil keputusan sudah dapat mengambil sikap tentang kegiatan program tersebut sehingga pemborosan atau hal-hal negatif lainnya secara dini dapat dicegah.
2. Evaluasi sumatif, yaitu kegiatan evaluasi yang dilangsungkan jika program kegiatan sudah betul-betul selesai dilaksanakan. Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menentukan sejauh mana sesuatu program mempunyai nilai kemanfaatan. Penilaian sumatif sangat bermanfaat bagi suatu organisasi yang akan mengadopsi program yang dievaluasi berkenaan dengan hasil, program atau prosedur (Arikunto, 1998).

Berdasarkan kategori fungsi penelitian diatas, penelitian ini tergolong kedalam kategori evaluasi sumatif yang melakukan penilaian atau evaluasi pada

saat suatu program yang diteliti sudah berlangsung, penelitian ini dilaksanakan terhadap pelaksanaan musrenbang tahun 2004.

Penelitian evaluasi pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan/kebijakan karena data hasil penelitian dikumpulkan melalui prosedur yang ilmiah sehingga dapat dikategorikan handal. Karena penelitian evaluasi merupakan penelitian yang dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan maka penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis (Arikunto,1998).

Perpaduan antara jenis penelitian deskriptif dan evaluatif diatas diolah atau disajikan secara kualitatif yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data dan analisa data yang non kuantitatif serta bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan-hubungan sosial dan mendiskripsikan kenyataan seperti yang dialami responden (Sarantakos, 1993).

Studi mengenai proses partisipasi masyarakat dalam musrenbang dan efektivitas musrenbang dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan dilakukan dengan metode analisis yang dapat mendukung studi ini untuk menemukan faktor-faktor internal masyarakat yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dan kondisi potensi wilayah berdasarkan analisis kebutuhan infrastruktur pedesaan, sehingga diharapkan tercipta perencanaan partisipatif yang berdasarkan kebutuhan serta analisis kondisi dan potensi wilayah pedesaan.

Pada dasarnya dalam menganalisis efektivitas musrenbang dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan diperlukan kajian yang sifatnya

lebih ditekankan pada keterkaitan antara kondisi dan potensi wilayah dengan perencanaan partisipatif masyarakat mengenai perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Guna mendukung pencapaian tujuan studi, maka tahapan studi yang dilakukan meliputi pekerjaan sebagai berikut:

1.7.2 Tahap Persiapan

Langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahap ini adalah:

- 1) Menentukan wilayah penelitian, wilayah penelitian ditentukan dengan melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden terpilih yang bersifat purposive sesuai dengan materi penelitian dan pengamatan langsung ke lapangan, serta menentukan lokasi-lokasi yang akan menjadi objek penulisan tesis, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kunjungan instansional ke Bappeda Kabupaten Tegal, Kantor PMD Kabupaten Tegal, Kecamatan terpilih dan Kantor Statistik Kabupaten Tegal .
- 2) Perijinan untuk keperluan survei/pencairan data yang meliputi ijin dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta, Bapeda Kabupaten Tegal.
- 3) Penentuan kebutuhan data sekunder yang diperlukan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan keperluan penelitian, seperti RUTRK Kecamatan, profil desa, Kabupaten Tegal Dalam Angka, PDRB Kecamatan, Data kemiskinan di Kabupaten Tegal, Kegiatan-kegiatan yang tertuang di DSP, RAPBD dan APBD dan data-data dokumentasi proses perencanaan partisipatif

di Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

- 4) Penentuan kebutuhan data primer yang diperlukan lapangan yang disesuaikan dengan konsep dan tujuan studi. Data primer yang dibutuhkan meliputi kondisi geografis desa, bentuk dan pola desa, kondisi dan potensi infrastruktur pedesaan, tingkat partisipasi dalam proses perencanaan Musrenbang, kemudahan akses informasi masyarakat serta dan keterlibatan masyarakat dalam organisasi-organisasi masyarakat.
- 5) Menyusun teknik pengumpulan data primer dengan teknik observasi, wawancara terstruktur dan questioner. Melalui wawancara terstruktur ini, peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden terpilih berdasarkan daftar pertanyaan (Kuesioner) yang telah disusun sebelumnya dan dilengkapi dengan observasi dan wawancara terstruktur untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

1.7.3 Tahap Kompilasi data

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan jenis dan karakteristik dari data tersebut. Setelah dikelompokkan pada masing-masing jenisnya, maka data-data itu akan menjadi input bagi tahap analisis dan dapat ditampilkan dalam bentuk:

- 1) Tabulasi, yaitu dengan menampilkan data yang diperoleh melalui tabel-tabel.
- 2) Diagramatik, yaitu menampilkan data yang diperoleh dalam bentuk grafik atau diagram

- 3) Peta, untuk memperjelas kondisi geografis, bentuk, pola dan kondisi infrastruktur pedesaan maka ditampilkan dalam bentuk peta.

1.7.4 Tahap Analisis

Untuk memudahkan proses analisis maka penelitian dilakukan dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi geografis desa, kondisi dan potensi infrastruktur pedesaan.
2. Mengetahui proses perencanaan partisipatif melalui Musrenbang.
3. Mengidentifikasi perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui kondisi dan potensi infrastruktur pedesaan.
4. Mengidentifikasi perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes.
5. Menganalisis perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan berdasarkan Musrenbangdes.
6. Menganalisis perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah pedesaan
7. Mengkomparasikan perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes dan perencanaan pembangunann infrastruktur pedesaan melalui analisis kondisi dan potensi wilayah.
8. Menganalisis efektivitas Musrenbangdes dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan berdasarkan potensi dan kondisi wilayah.

9. Memberikan arahan (*guidance*) atau koridor kriteria kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes berdasarkan analisis kondisi dan potensi wilayah.

1.7.5 Pendekatan Studi

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, maka diperlukan adanya paradigma studi (Moleong, 1996). Cara kerja atau perasionalisasi studi menggunakan cara-cara sebagaimana dilakukan oleh pengembang paradigma alamiah (*naturalistic paradigm*), yang melihat realitas sebagai suatu kenyataan ganda dan merupakan suatu keutuhan. Peneliti melakukan studi dengan latar alami, bersifat deskriptif dan penafsirannya terikat ruang dan waktu. Dalam paradigma penelitian naturalistic, observasi itu interaktif antar peneliti dengan yang diteliti ada pengaruh dan hambatan timbal balik. Karena itu peneliti memandang yang diobservasi sebagai subjek, mereka beraktifitas, segala sesuatunya *inderteminan*, dan secara bersama peneliti dan yang diteliti membangun data penelitian.

1.7.6 Kebutuhan Data

Penelitian ini membutuhkan data primer yang pertama meneliti sejauh mana masyarakat terlibat dan bagaimana prosesnya sehingga tercipta perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes, dan yang kedua adalah survey lokasi mengidentifikasi dan menganalisa kondisi dan potensi infrastruktur pedesaan sebagai dasar perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Hasil dari proses musrenbang tersebut terhimpun dalam suatu usulan kegiatan berupa dokumen perencanaan di tingkat Desa dan data kondisi dan potensi pedesaan digunakan sebagai pembanding dari hasil Musrenbangdes tersebut. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung dari data primer yang nantinya akan dianalisis dan akan ditampilkan dalam bentuk tabel.

1.7.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memenuhi kebutuhan data dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data terhadap objek yang akan diteliti dalam rangka mendapatkan gambaran mengenai suatu data atau permasalahan di lokasi penelitian. Data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder, yang diuraikan sebagai berikut:

A. Data Primer

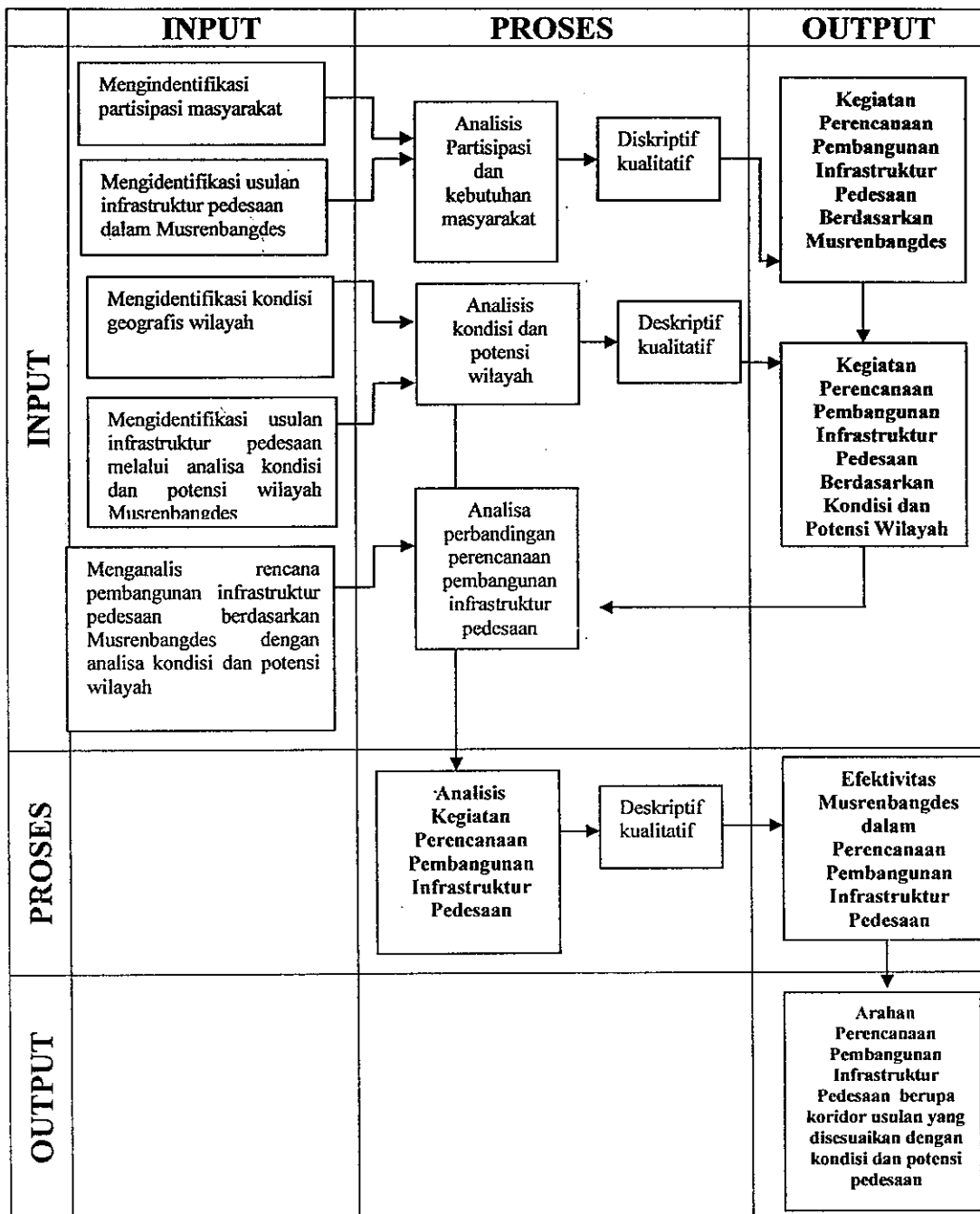
Data primer dalam studi ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya/responden dengan cara menyebarkan kuesioner atau melakukan wawancara langsung dengan panduan kuesioner dan melakukan survey lokasi di daerah penelitian. Data yang ditanyakan berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini, yaitu mengidentifikasi setiap objek-objek yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan studi.

Responden atau informan ditentukan secara purposive sesuai kepentingan dan keperluan analisis. Pengumpulan data kualitatif menggunakan purposive sampling, yaitu sample bertujuan berupa hal, peristiwa, manusia dan situasi yang diobservasi. Sampel diambil secara purposive bertalian dengan purpose atau tujuan tertentu.

Penyebaran kuesioner dilakukan terhadap objek dalam studi ini, terdiri dari: Kepala Desa/Kelurahan, Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Organisasi Kelompok Masyarakat, Tokoh Masyarakat, pengusaha, Komite sekolah. Kepala Desa/Kelurahan, perangkat desa/kelurahan, LKMD/BPD, dari keempat desa berjumlah 120 peserta, dari peserta yang ada diambil 92 responden diambil secara acak sehingga mewakili keseluruhan peserta.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*depth interview*), dilakukan dengan beberapa informan, tanpa menggunakan test standar atau instrument yang telah diuji validitasnya. Peneliti mengajukan pertanyaan dalam wawancara menurut perkembangan wawancara itu secara wajar berdasarkan ucapan dan buah pikiran yang dicetuskan oleh orang yang diwawancarai. Data yang dikumpulkan tersebut bersifat verbal dan non verbal, pada umumnya yang diutamakan adalah data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab.

Selain wawancara, pengumpulan data primer ini juga dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dari observasi ini selain untuk menunjang data-data diatas juga untuk mengetahui realisasi pelaksanaan kegiatan/program yang telah dilaksanakan. Analisis data yang dilakukan adalah menyusun data serat menginterpretasikannya, yaitu menyusun dan merakit unsur-unsur baru dan unsur-unsur lama. Interpretasi ini penting sehingga peneliti tidak hanya menyajikan data-data penelitian, tetapi lebih dari itu adalah menafsirkan temuan-temuan yang ada.



GAMBAR 1.3
TEKNIK ANALISIS

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari Gambar 1.3 dapat dijelaskan bahwa analisis yang dilakukan adalah analisis perencanaan partisipatif tentang Musrenbangdes, dari proses awal sampai dengan dihasilkannya suatu rencana kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan, kemudian analisis kondisi dan potensi wilayah yaitu mengidentifikasi kondisi infrastruktur pedesaan yang ada dengan melihat kondisi geografis wilayah dan juga potensi yang dapat dikembangkan secara optimal sehingga menghasilkan rencana pembangunan infrastruktur pedesaan berdasarkan kondisi dan potensi desanya, kemudian dari kedua analisis tersebut dibandingkan sehingga diketahui efektivitas Musrenbangdes dalam perencanaan pembangunan Infrastruktur Pedesaan berdasarkan Kondisi dan potensi wilayah.

B. Data Sekunder

- 1) Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari sumber lain, misalnya dengan menyalin atau mengutip data dalam bentuk yang sudah jadi. Data sekunder diperoleh dari referensi dan informasi yang didokumentasikan oleh kantor/dinas/instansi terkait diantaranya berupa gambaran wilayah Kabupaten Tegal dan lokasi penelitian serta peraturan-peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan musrenbang.
- 2) Kebutuhan dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan secara rinci dapat dilihat pada Tabel I.1, dalam tabel ini merangkum semua sasaran yang hendak dicapai, keluaran yang dihasilkan, variabel yang dipakai serta indikator-indikator tiap variabel sehingga dapat dilihat secara ringkas dan jelas serta membantu dalam menganalisis penelitian yang hendak dilaksanakan.

TABEL I.1.
SASARAN DAN VARIABEL PENELITIAN

No	Sasaran	Keluaran	Analisis	Variabel	Indikator	Data
1	Mengetahui kondisi dan potensi infrastruktur pedesaan	Rencana Kegiatan Pembangunan infrastruktur pedesaan berdasarkan potensi dan kondisi wilayah	Analisis Wilayah dan Kondisi Potensi	Analisis Unsur Geografis perkembangan Desa Analisis Bentuk, tipe dan Pola Desa	1) Lokasi, 2) Iklim, 3) Tanah, 4) Letak Desa 1) Bentuk desa menyusur pantai 2) Bentuk desa yang terpusat 3) Bentuk desa linier di dataran rendah 4) Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu Kondisi Infrastruktur yang ada dan rencana kegiatan untuk mengembangannya berdasarkan sumber daya yang ada. 1) Jalan Desa 2) Air bersih 3) Listrik 4) Perumahan. 5) Irigasi Rencana kegiatan infrastruktur pedesaan : 1) Jalan Desa 2) Air bersih 3) Listrik 4) Perumahan. 5) Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Data Sekunder : UU, PP, Perda, Juklak, Juknis • dokumen usulan kegiatan Desa, Kecamatan dan Kabupaten • Data Primer : Hasil wawancara dengan aparat perencanaan, Pengamatan langsung lapangan
2	Mengidentifikasi proses perencanaan partisipatif melalui musrenbang	Perencanaan Pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes	Analisis Perencanaan Partisipatif	Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangdes Analisis Keikutsertaan Masyarakat Dalam Kegiatan Musrenbangdes	<p>A. Individu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis Kelamin. 2) Usia. 3) tingkat pendidikan 4) tingkat pendapatan 5) mata pencaharian <p>B. Komunal/Kelompok</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Organisasi masyarakat 2) Tokoh masyarakat 3) LSM <p>A. Derajat kesukarelaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bentuk bebas/suka rela 2) Bentuk terpaksa karena adanya peraturan perundangan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Data primer : Hasil wawancara melalui Kuesioner, Wawancara langsung • Data Primer : Pengamatan langsung lapangan • Data sekunder : dokumen usulan kegiatan Desa, Kecamatan dan Kabupaten

		<p>peraturan perundangan yang memaksanya dalam suatu kegiatan.</p> <p>B. Intensitas dan Frekuensi Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat Kehadiran 2) Keaktifan dalam kehadiran <p>C. Motivasi keikutsertaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan lokalitas 2) Perencanaan sosial 3) Aksi Sosial <p>A. Cara keterlibatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peran serta secara langsung 2) Peran serta tidak langsung <p>B. Keterlibatan dalam tahap pada proses pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perumusan, 2) persetujuan, 3) penelitian, 4) persiapan rencana, 5) penerimaan rencana, pelaksanaan dan evaluasi. <p>C. Aktor yang terlibat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota masyarakat setempat 2) Pegawai pemerintah 3) Orang-orang luar 4) Wakil-wakil masyarakat terpilih <p>Rencana kegiatan infrastruktur pedesaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jalan Desa 2) Air bersih 3) Listrik 4) Perumahan. 5) Irigasi 	<p>Analisis Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes</p> <p>Akumulasi usulan kegiatan berdasarkan Musrenbangdes</p> <p>Analisis Perencanaan kegiatan berdasarkan Musrenbangdes (perencanaan Partisipatif)</p> <p>Analisis infrastruktur pedesaan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah pedesaan</p> <p>Analisis Komparasi perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan</p>	<p>Analisis perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan</p> <p>Usulan Kegiatan berdasarkan potensi, kondisi dan kebutuhan wilayah pedesaan</p> <p>Perencanaan infrastruktur pedesaan</p>	<p>Hasil analisis</p> <p>Jenis dan jumlah perencanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan</p> <p>Jenis dan jumlah perencanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan</p>
3	Perencanaan Pemb. infrastruktur pedesaan				

3	Mengetahui efektifitas Musrenbang des berdasarkan potensi dan kebutuhan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan	Efektifitas Musrenbang dalam pegembangan wilayah	Analisis Efektifitas Musrenbangdes dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Orientasi terhadap lingkungan	<p>Usulan kegiatan Musrenbangdes berdasarkan kondisi infrastruktur pedesaan yang ada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Jalan 2). Air Minum 3). Listrik 4) Perumahan 5) Irigasi <p>Usulan kegiatan Musrenbangdes berdasarkan potensi sumber daya yang ada.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Jalan 2). Air Minum 3). Listrik 4) Perumahan 5) Irigasi <p>Hasil rencana Musrenbangdes yang didasarkan pada analisis kondisi dan potensi wilayah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Jalan 2). Air Minum 3). Listrik 4) Perumahan 5) Irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Analisis • Data Sekunder : Dokumen perencanaan daerah, dokumen musrenbang • Data primer : Wawancara langsung dengan aparat kecamatan dan Kabupaten
4	Mengidentifikasi dan memberikan frame work atau koridor kriteria kegiatan	Frame Usulan Musrenbang dalam Musrenbang	Pola Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dalam Musrenbang	<p>Realisasi tujuan</p> <p>Frame Work serta Koridor usulan kegiatan infrastruktur pedesaan dalam Musrenbangdes berdasarkan analisis infrastruktur dan kondisi wilayah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1)Jalan 2)Air Minum 3)Listrik 4)Perumahan 5)Irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis

Sumber : Hasil Analisis, 2005

1.7.6.2 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Penelitian ini berusaha melihat bagaimana proses perencanaan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes sehingga menghasilkan rencana pembangunan infrastruktur pedesaan menjadi dokumen perencanaan di tingkat desa, dan juga melihat perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan didasarkan kepada kondisi dan potensi infrastruktur pedesaan yang dimiliki kemudian keduanya dianalisis dan dikomparasikan sehingga bisa dilihat bagaimana efektivitas Musrenbangdes dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan di wilayah.

Dengan demikian dapat diketahui efektivitas usulan melalui Musrenbangdes dengan realisasi kondisi dan potensi wilayah yang ada, selanjutnya dari hasil penelitian dapat diambil suatu arahan dan koridor usulan kegiatan yang seharusnya diajukan dalam Musrenbangdes, sehingga usulan kegiatan tersebut berkualitas dan berdasar pada kebutuhan, kondisi dan potensi desanya. Dengan demikian data primer diolah secara diskriptif-komparatif dan sebagian lagi disajikan dengan menggunakan tabel-tabel.

Penelitian ini juga membutuhkan data sekunder dan primer lainnya yang dibutuhkan untuk menambah data, khususnya mengenai dokumen-dokumen yang berada di Desa, Kecamatan dan Kabupaten .Karena itu dengan data sekunder (dan didukung dengan data primer), pengolahan data juga dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen perencanaan yang disajikan dalam bentuk gambar, peta dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyebaran kuesioner atau wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada responden. Jenis pertanyaan dapat terbuka atau tertutup. Pertanyaan terbuka berisi pernyataan yang dapat secara bebas dijawab oleh responden dengan memilih jawaban yang tersedia.
2. Observasi atau pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui kondisi geografis Desa, kondisi masyarakat, lembaga yang ada, stake holder yang terkait dalam Musrenbang. Hasil observasi ditulis secara deskriptif .
3. Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan mencatat arsip-arsip atau data-data yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai bahan menganalisis permasalahan, seperti jumlah usulan kegiatan, aktivitas yang dilaksanakan, jumlah penduduk, jumlah partisipasi masyarakat, perundang-undangan yang berlaku serta dokumen-dokumen pendukung yang dapat diperoleh dari Dinas atau Instansi terkait.

1.7.6.3 Teknik Sampling

Unit analisis adalah objek yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam sebuah penelitian. Sedangkan populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga ada didalam setiap penelitian, maka populasi yang dipilih adalah yang erat hubungannya dengan masalah yang ingin dipelajari (Singarimbun dan Efendi, 1995).

Dalam penelitian ini yang akan dipelajari adalah bagaimana efektivitas musrenbangdes dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan berdasarkan potensi dan kondisi pedesaan dengan pertimbangan:

1. Perencanaan partisipatif merupakan salah satu pilar pokok serta pintu gerbang masuknya aspirasi yang diharapkan mampu memacu pembangunan yang berdasarkan kebutuhan, potensi dan kemampuan masyarakat. Disamping itu perencanaan partisipatif merupakan alat kontrol masyarakat terhadap proses pembangunan yang dilaksanakan agar tidak menimbulkan bahaya, kerusakan dan gangguan demi kelangsungan dan kesinambungan pembangunan daerah.
2. Perencanaan partisipatif yang ada di tingkat terendah ditampung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan dasar dalam perencanaan pembangunan pada proses selanjutnya di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan Kabupaten (Musrenbangda).
3. Kegiatan yang disusulkan melalui Musrenbangdes mencerminkan kebutuhan desa sehingga usulan tersebut memerlukan landasan dan dasar yang jelas, hal tersebut memerlukan koridor/arahan dan kriteria-kriteria usulan kegiatan yang berdasarkan kondisi, dan potensi desa.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka jumlah sampel yang dipilih dalam analisis efektivitas Musrenbangdes dalam Perencanaan Pembangunan infrastruktur pedesaan adalah stake holder yang terlibat dalam musrenbangdes di desa lokasi penelitian dari populasi sejumlah 120 peserta Musrenbangdes yang tersebar di 4 lokasi penelitian, penulis mengambil secara purposive 92 responden yang memenuhi kriteria dan berkaitan dengan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

EFEKTIVITAS MUSRENBANG DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN

2.1 Perencanaan Pembangunan Pedesaan

2.1.1 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses dimana tujuan-tujuan, bukti-bukti faktual dan asumsi-asumsi diterjemahkan sebagai suatu proses argumen logis ke dalam penerapan kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan (Rose, 1994). Perencanaan diartikan sebagai perwujudan kebutuhan dasar dari penduduk asli (Friedmann, 1987)

Definisi lain menurut para ahli perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program-program dari beberapa alternative yang ada (Hasibuan, 1988). Pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki (Kartasasmita, 1997)

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan terdapat hal-hal pokok yaitu: 1) Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta, 2) Adanya alternative-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan, 3) Adanya tujuan yang ingin dicapai, 4) Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan

yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan, 5) Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Kartasasmita, 1994), selain itu pembangunan diartikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (Siagian, 1994).

Pembangunan pada awalnya diidentifikasi sebagai perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi bahkan pembangunan dengan westernisasi., namun dari keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang mendasar, karena masing-masing mempunyai prinsip, azas, hakikat dan latar belakang yang berbeda.

Sebelum mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah perlu dipahami terlebih dahulu makna perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam suatu proses pembangunan. Dalam tahap awal perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*). Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga

studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat, baik yang dilakukan secara konseptual/dokumentasi maupun eksperimental.

Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan diatas meja, tanpa melihat kondisi realitas dilapangan. Data yang ada di lapngan sebagai data primer merupakan bagian penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternative-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental/spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. (Bratakusumah, 2004)

Dari definisi perencanaan pembangunan diatas kita dapat melihat gambaran tentang apa yang dimaksud dengan perencanaan, pembangunan dan proses yang ada didalamnya, dalam hubungannya dengan daerah sebagai area (wilayah) pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan, pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang teguh pada azas skala prioritas (Bratakusumah, 2004). Perencanaan Pembangunan

Daerah (PPD) akan meliputi perencanaan komunitas menyangkut suatu area/wilayah (daerah) dan pemanfaatan sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Tetapi keterbatasan sumber daya yang dimiliki tidak memungkinkan pembangunan langsung menyentuh dan mengatasi seluruh permasalahan pembangunan serta tuntutan secara sekaligus. Dalam hal ini penentuan prioritas perlu dilakukan, di dalam prakteknya dilakukan melalui proses perencanaan.

Perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks tadi, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya yang lainnya (Jensen, 1995). Dalam konteks ini ia menyebutnya dengan istilah pembangunan *endogen*, atau dengan kata lain pembangunan yang berbasis potensi, perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antar sumber daya manusia dengan sumber daya lain, termasuk sumber daya alam dan lingkungan melalui investasi. (Prisma, 1996).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat diartikan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

2.1.2 Pembangunan Pedesaan

2.1.2.1 Desa

Dalam arti umum desa adalah permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian agraris, desa dalam arti lain adalah bentuk kesatuan administrative yang disebut juga kelurahan, dan lurah disebut sebagai kepala desa, dengan demikian di dalam kota-kota pun dikenal sebutan desa.

Adapun desa yang tersebar di luar kota dengan lingkungan fisisbiotisnya adalah gabungan dukuh, dukuh sendiri dapat mewujudkan suatu unit geografis karena tersebar seperti pulau di tengah persawahan atau hutan. Kesatuan administrative Desa, sebutan di luar jawa dapat beraneka: gampong (Aceh), huta (Tapanuli), nagari (Sumatera Barat), marga (Sumatera Selatan), wanus (sulawesi Utara) dan dusun dati (Maluku).

Definisi lain mengenai desa berangkat dari desa sebagai permukiman yaitu suatu tempat atau daerah di mana penduduk berkumpul dan hidup bersama di mana mereka dapat menggunakan lingkungannya setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka (Daldjoeni,1998), dalam definisi tersebut tersirat adanya tiga unsur yaitu penduduk, tanah dan bangunan. Karena masing-masing unsur itu cepat atau lambat mengalami perubahan maka desa sebagai pola permukiman bersifat dinamis, hal tersebut diakibatkan karena manusia sebagai penghuni desa selalu melakukan adaptasi spatial dan ekologis sejalan dengan kegiatannya yang bermatapencaharian agraris.

A. Unsur-unsur Desa

Desa sebagai kesatuan masyarakat memiliki tiga hal yaitu wilayah (rangkah), satu keturunan (darah), dan ajaran atau adat (warah) (Daldjoeni,1998), hingga kini tiga unsur yang berkembang di desa-desa Jawa adalah daerah, penduduk dan tata kehidupan.

1). Daerah

Daerah adalah tanah-tanah pekarangan dan pertanian beserta penggunaannya, termasuk pola aspek lokasi, luas, batas, yang kesemuanya itu merupakan lingkungan geografis setempat.

2). Penduduk

Jumlah penduduk, penambahan, kepadatan, penyebaran serta mata pencahariannya.

3). Tata kehidupan

Ajaran tentang tata hidup, tata pergaulan dan ikatan-ikatan sebagai wara masyarakat desa, dengan sendirinya tata kehidupan itu tak dapat dilepaskan dari seluk beluk usaha penduduk untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraannya.

Kesimpulannya bahwa setiap desa memiliki *geographical setting* dan *human effort*-nya masing-masing yang berbeda-beda. Ada desa bersumberdaya menguntungkan tetapi semangat membangun, ketrampilan dan pengetahuan masyarakatnya seba kurang, sehingga desa tersebut tak dapat maju. Sebaliknya ada desa yang meski sumber dayanya serba terbatas, tetapi dapat maju ekonomisnya, berkat kemampuan penduduknya mengatasi berbagai hambatan

alam lain, dipengaruhi oleh unsur-unsur geografis wilayah yang ditempati, sehubungan hal tersebut ada empat unsur geografis yang ikut menentukan persebaran/perkembangan desa yaitu lokasi, iklim, tanah dan air.

1) Lokasi

Letak secara fisiografis mengenai jauh dekatnya dengan jalan raya, sungai, rawa, pegunungan, pantai, kota dan sebagainya, yang kesemuanya akan mempengaruhi ekonomi desa.

2) Iklim

Iklim desa bergantung terutama pada ketinggian letak desa secara topografis di atas permukaan laut, sehingga pengembangannya bisa berupa kawasan wisata, peristirahatan atau pertanian yang cocok dengan topografi tersebut.

3) Tanah

Jenis tanah mempengaruhi keberhasilan mata pencaharian petani : tanah berkapur, berpasir, berlempung, bertanah liat dan sebagainya, memiliki ciri-ciri perekonomian tertentu yang dapat kita hubungkan dengan budidaya tanaman yang sesuai.

4) Letak Desa

Letak desa terhadap daerah-daerah lain dengan kota ataupun dengan sesama desa, makin terpencil letak dan jarak dengan kota juga semakin jauh makin terbelakang desa itu, dari situ kita mengerti pentingnya peranan sarana transportasi dan komunikasi sebagai factor-faktor pendorong kemajuan ekonomi maupun pendidikan.

Dilihat secara menyeluruh, desa untuk dapat berkembang harus ditelaah unsur-unsurnya seperti terdapat pada Gambar 2.1. , yakni tanah, sumber air, warga desa, tata kehidupan desa serta tanaman dan hewan.



GAMBAR 2.1
PENGEMBANGAN DESA

Sumber : Bintarto, *Interaksi desa-Kota, 1998*

Dari Gambar 2.1. diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga pilar penting yaitu sumber daya alam yaitu: tanah, tanaman, hewan, sumber daya Air dan sumber daya manusia yaitu: warga desa serta kondisi lingkungan yaitu : tata kehidupan desa.

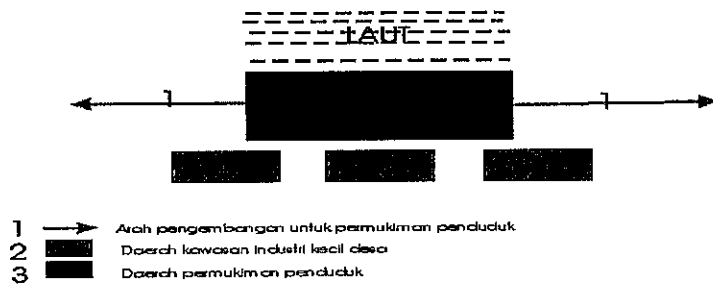
B. Bentuk dan Pola Desa

1. Bentuk Desa

Bentuk-bentuk desa secara sederhana dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Bentuk desa menyusur pantai

Didaerah-daerah pantai yang landai dapat tumbuh suatu permukiman, yang mata pencaharian penduduknya di bidang perikanan, perkebunan kelapa, dan perdagangan

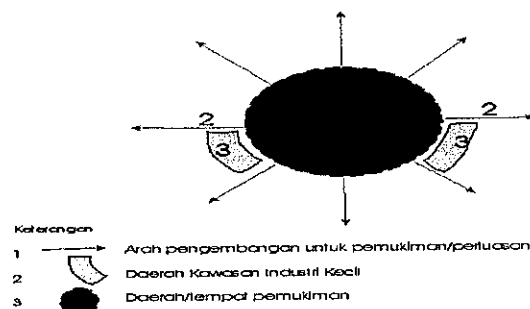


GAMBAR 2.2
BENTUK DESA PANTAI

Sumber : Beratha p.16, dalam Daldjoeni, 1998

Jika Desa pantai seperti itu berkembang, maka tempat tinggal meluas dengan cara menyambung yang lama dengan menyusur pantai, sampai bertemu dengan desa pantai lainnya. Adapun pusat-pusat kegiatan industri kecil (perikanan dan pertanian) tetap dipertahankan di dekat tempat tinggal penduduk yang mula-mula.

b. Bentuk Desa yang terpusat



GAMBAR 2.3
DESA TERPUSAT/PEGUNUNGAN

Sumber : Beratha p.17, dalam Daldjoeni, 1998

Bentuk desa terdapat di daerah pegunungan, penduduk umumnya terdiri atas mereka yang seketurunan, pemusatan tempat tinggal tersebut didorong oleh kegotongroyongan mereka, jika jumlah penduduk kemudian bertambah lalu

pemukaran desa pegunungan itu mengarah ke segala jurusan, tanpa adanya rencana. Sementara itu pusat-pusat kegiatan penduduk pun dapat bergeser mengikuti pemekaran.

c. Bentuk desa linier di dataran rendah



Keterangan
 1 → Arah pengembangan pemukiman penduduk
 2 → Jalan Tembus
 3 → Daerah industri kecil
 4 → Lahan pertanian

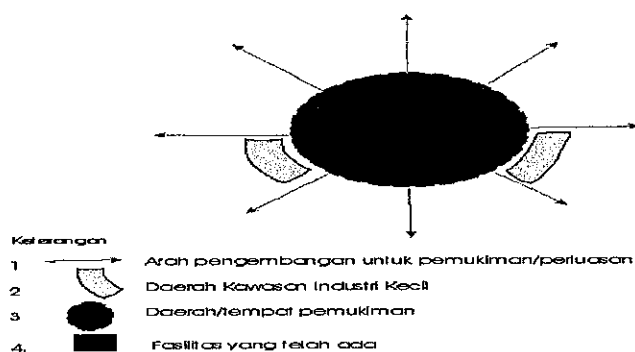
GAMBAR 2.4
BENTUK DESA DARATAN RENDAH

Sumber : Beratha p.18, dalam Daldjoeni, p.62, 1998

Pemukiman penduduk di dataran rendah umumnya memanjang sejajar dengan rentangan jalan raya yang menembus desa yang bersangkutan. Jika kemudian secara wajar artinya tanpa direncanakan desa mekar, tanah pertanian di luar desa sepanjang jalan raya menjadipemukiman baru. Memang ada kalanya juga pemekaran kearah pedalaman setelah menyeberang jalan raya. Maka kemudian harus dibuatkan jalan baru mengelilingi desa, semacam ring road dengan maksud agar kawasan pemukiman baru tak terpencil.

d. Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu

Jenis ini juga terdapat di dataran rendah. Yang dimaksudkan dengan fasilitas misalnya mata air, waduk, lapangan terbang dan lain-lainnya. Arah pemekarannya dapat ke segala jurusan, sedang fasilitas-fasilitas untuk industri kecil dapat disebarakan di mana-mana sesuai dengan keinginan setempat.

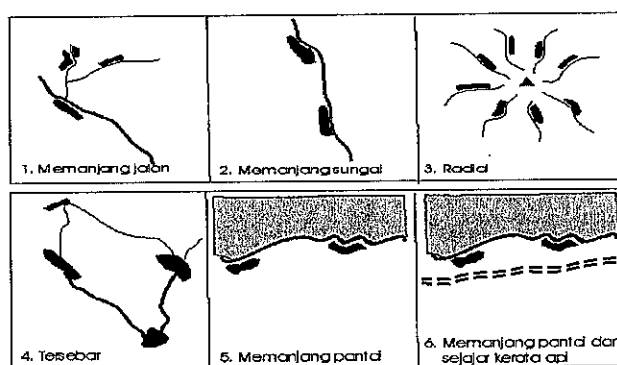


GAMBAR 2.5
BENTUK DESA MENGELILINGI FASILITAS

Sumber : Beratha p. 19, dalam Daldjoeni, 1998

Bentuk-bentuk desa seperti diuraikan diatas bertalian erat dengan usaha pengembangan dan penggalan sumber dayanya secara optimal. Dengan cara bijaksana perkembangan desa juga harus direncanakan secara khusus, sehingga terjamin wajah desa yang lebih baik dalam arti menguntungkan dalam perkembangan baik ekonomi, manusianya maupun sosial budayanya.

Disamping adanya berbagai bentuk desa masih ada pula yang disebut pola desa. Ada 6 (enam) pola dengan perincian: memanjang jalan, memanjang sungai, radial, tersebar, memanjang pantai dan memanjang pantai dan sejajar jalan kereta api (Bintarto, 1977)



GAMBAR 2.6
ENAM POLA DESA

Sumber : Bintarto 1977

Pada Gambar 2.6 diatas gambar nomor 1 (satu) dan 2 (dua) susunan desanya mengikuti jalur-jalur jalan dan sungai. Contoh ini terdapat di daerah Bantul-Yogyakarta dan merupakan "*Line Village*" atau pola desa yang memanjang, gambar 3 9tiga0 pola desa ini berbentuk radial terhadap Gunung Slamet dan memanjang sepanjang sungai di lereng Gunung Slamet, Gambar 4 (empat) pola desa daerah karst gunung kidul-yogyakarta adalah tersebar atau scattered merupakan nucleus yang berdiri sendiri, gambar 5 (lima) dan 6 (enam) terdapat didaerah pantai susunan desa nelayan berbentuk memanjang sepanjang pantai. Contoh ini terdapat di daerah Rengasdengklok Jawa Barat dan Tegal.

2.1.2.2 Infrastruktur Pedesaan

A. Infrastruktur

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup social dan ekonomi (Grigg, 1988)

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem social dan system ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya system sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 2000).

Infrastruktur dapat juga didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah,

transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan social (kodoatie, 2003). Oleh *American Public Works Association (APWA)*, infrastruktur dikelompokkan menjadi 13 kategori (Stone, 1974). Sedangkan komponen-komponen yang tercakup dalam P3KT dan yang menjadi tanggung jawab Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah ditunjukkan dalam Tabel II.1.

TABEL II.1
KOMPONEN INFRASTRUKTUR APWA DAN P3KT

No.	APWA	No.	P3KT
1	Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air	1	Perencanaan Kota
2	Sistem pengelolaan air limbah : pengumpul, pengolahan, pembuangan, daur ulang	2	Peremajaan Kota
3	Fasilitas pengelolaan limbah (padat)	3	Pembangunan Kota Baru
4	Fasilitas pengendalian banjir, drainase dan irigasi	4	Jalan Kota
5	Fasilitas lintas air dan navigasi	5	Air Bersih
6	Fasilitas transportasi : jalam, rel, Bandar udara. Termasuk didalamnya adalah tanda-tanda lalu lintas, fasilitas pengontrol	6	Drainase
7	Sistem transit public	7	Air Limbah
8	Sistem kelistrikan : produksi dan distribusi	8	Persampahan
9	Fasilitas Gas alam	9	Pengendalian Banjir
10	Gedung Publik : Sekolah, rumah sakit	10	Perumahan
11	Fasilitas perumahan public	11	Perbaikan Kampung
12	Taman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain, termasuk stadion	12	Perbaikan Prasarana Kawasan Pasar
13	Komunikasi	13	Rumah Sewa.

Sumber : Stone, 1974 dalam *American Public Works Association (APWA)*

B. Infrastruktur Pedesaan

Kebutuhan pokok manusia pada umumnya dan manusia di pedesaan pada khususnya dapat dibedakan menjadi 2 kelompok. Pertama, meliputi kebutuhan akan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga yang dapat dinyatakan dapat memenuhi persyaratan untuk hidup. Kedua, yang meliputi kebutuhan berupa sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat dalam makna luas, seperti: air minum, kesehatan, pendidikan, sanitasi lingkungan, angkutan umum (Daldjoeni, 1998). Dari kedua kebutuhan tersebut harus berjalan bersama-sama tetapi diprioritaskan adalah penyediaan kebutuhan sarana prasarana sebagai dasar pemenuhan kebutuhan hidup yang lain.

Dalam pembangunan pedesaan haruslah merupakan *inner will*, yaitu suatu proses emansipasi diri, inisiatif dan partisipasi kreatif masyarakat dalam pembangunan karena keberhasilan pembangunan pedesaan adalah dengan mengembangkan potensi kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri (Tjokroamidjojo, 1983)

Cara yang digunakan di Indonesia dalam membangun desa, adalah meningkatkan desa swadaya (tradisional) menjadi desa swasembada (maju) melalui desa swakarsa (transisi), diadakan peningkatan kegiatan social ekonomi serta membangun prasarananya yang diperlukan, sehingga pendapatan perkapita bertambah. Indikator dalam menilai, tipologi desa tadi (swadaya, swakarsa, swasembada) adalah: alam, manusia, letak desa, mata pencaharian, produksi, adat, kelembagaan, pendidikan, swadaya, gotong royong, prasarana dan administrasi.

Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan adalah merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat, bentuk konkritnya adalah tersedianya akses prasarana lokal yang lebih memadai, dapat dimanfaatkan secara langsung dan cepat oleh masyarakat, disamping itu manfaat lain yang dapat diperoleh adalah dalam bentuk peningkatan ketrampilan (*human investment*) didalam penyelenggaraan prasarana lokal.

Belum ada ketentuan mengenai jenis prasarana/sarana pedesaan yang menjadi dasar usulan kegiatan dalam Musrenbangdes, infrastruktur tersebut dapat berupa jalan poros desa, jalan desa/lingkungan/setapak, jalan usaha tani/inspeksi, jembatan gantung, prasarana air bersih, pasar tradisional, balai desa, lumbung desa, posyandu, sekolah dasar, tambatan perahu, dermaga, tempat penjemuran jala/ikan, sarana sanitasi dasar, pangkalan angkutan, pintu bagi air, pintu air, saluran tersier, talang, bendung kecil atau tanggul (Kimpraswil,2001).

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1984 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1984 dan tindak lanjutnya sampai terbentuk Tim Teknis Penyempurnaan Tipologi dan Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa pada tahun 1986, Oleh Tim tersebut dihasilkan ketentuan baru tahun 1986 dan diberlakukan sejak Juli 1987 (berdasarkan surat Direktur Jendral Pembangunan Desa tanggal 30-7-1987 Nomor: 414.1/1289), sehingga ada tipologi dan Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa yang sekarang.

Dalam tipologi dan Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa yang meliputi empat bagian, pada bagian keempat yaitu Faktor Pengembangan Desa terdapat faktor tata ruang yang didalamnya membahas mengenai Prasarana dan

Sarana Desa (Infrastruktur Desa) yang telah ada, dan variable dididalamnya diantaranya Pelistrikan, Penyediaan Air Bersih, Perumahan Sehat Perhubungan an Komunikasi (jalan) dan Pengairan sawah.

Dari keterangan tersebut diatas dapat dikategorikan ada lima kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan dalam pembangunan infrastruktur pedesaan yaitu:

1. Jalan Desa

Jaringan jalan yang ada desa adalah sebagai berikut:

- a) Jaringan jalan lokal primer, yaitu jalan yang menghubungkan antara blok-blok lingkungan di wilayah desa dan akses regional dengan pusat pemerintahan (baik kecamatan ataupun kabupaten).
- b) Jaringan jalan lokal sekunder, adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar lingkungan satu dengan lingkungan (sub-blok) lainnya dalm suatu desa, jalan ini sudah diperkeras baik dengan aspal maupun dengan makadam.
- c) Jalan lingkungan adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar lingkungan/gang-gang (kampung) dimana pada umumnya menghubungkan antar satuan pemukiman atau jalan masuk ke masing-masing lngkungan kecil yang ada di wilayah perencanaan. Jalan ini sebagian sudah diperkeras tetapi masih banyak berupa jalan tanah.

2. Air bersih

Kebutuhan masyarakat akan air bersih yang dapat dikategorikan sebagai wilayah pedesaan, memakai pola pengembangan bagi kawasan dengan ketetntuan dan keuntungan antara lain:

- a) Waktu pendistribusian air dapat diatur dalam waktu tertentu (12 jam atau 24 jam)
- b) Jaringan pemipaan murah dengan diameter kecil.
- c) Sistem sambungan pada langganan menggunakan pembatas aliran (*restrictor*).
- d) Pembayaran air langganan setiap bulan dengan jumlah tetap.
- e) Sistem operasional secara sederhana dan murah.
- f) Kebutuhan akan tenaga tidak besar.

Dengan kriteria tersebut pembangunan jaringan air bersih di pedesaan dapat dilakukan dengan biaya yang terjangkau.

3. Listrik

Kriteria perencanaan diarahkan berdasarkan berbagai pertimbangan antara lain:

- a) Dipenuhinya ketentuan yang ada di dalam Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 1977 dan ketentuan perundangan yang berlaku serta mengikat dalam perencanaan jaringan listrik, termasuk didalamnya petunjuk pengajuan rencana instalasi listrik dan perlengkapan bangunan. Pembidangan perencanaan instalasi listrik dan syarat-syarat penyambungan listrik tahun 1978.
- b) Jaringan listrik/trafo yang telah diinterjesing, kapasitas/daya yang dapat dan telah dioperasikan.

- c) Skala prioritas pengadaan jaringan sesuai dengan urgensitas pengembangan jaringan listrik, dalam kaitannya dengan radius pelayanan dan kemungkinan dikembangkan/ditingkatkan.
- d) Untuk rumah tinggal/permukiman, daya listrik yang didistribusikan dalam batas tertentu, minimal untuk keperluan penerangan, termasuk didalamnya kebutuhan penerangan lingkungan dan jalan.

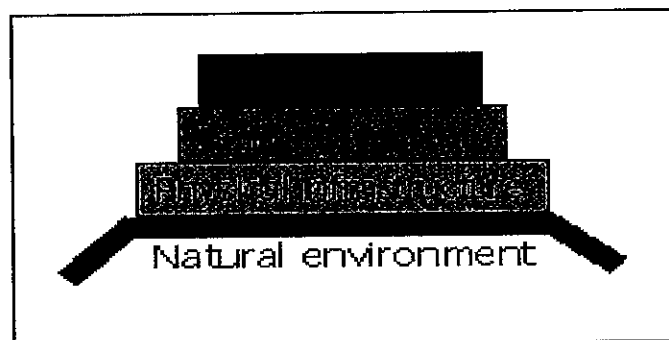
Rumusan teknis untuk pengembangan dan peningkatan disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Jarak jaringan listrik yang masuk ke bagian wilayah perencanaan, termasuk didalamnya jarak antar tiang sekitar 50 m dan jarak kawat penghantar (konduktor) yang dipertimbangkan terhadap unsur-unsur pada lingkungan, seperti bangunan, pohon, jarak tiang harus sesuai dengan aturan PLN yang berlaku
- b) Penerangan untuk pemukiman diarahkan sebagai berikut:
 - 1) Tiap satu unit rumah tinggal minimal disediakan daya sebesar 450 VA (watt) dengan perhitungan 1 KK terdiri atas 5 jiwa.
 - 2) Besarnya daya setiap luas ruang, disesuaikan dengan kebutuhan dan diharapkan dapat memnuhi fungsi yang direncanakan.
 - 3) Setiap tipe unit permukiman, batas penggunaan daya listriknya disesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur oleh PLN.
- c) Kebutuhan listrik untuk penerangan jalan disesuaikan dengan model/pola pengembangan lingkungan.

- d) Jumlah dan sebaran tiang-tiang listrik untuk penerangan jalan diatur sesuai dengan urgensitas/ketentuan penataannya.

Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak, kegiatan social ekonomi meningkat, sehingga kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi meningkat.

Sebagai salah satu konsep pola pikir, dibawah ini diilustrasikan diagram sederhana bagaimana peran infrastruktur, diagram ini menunjukkan bahwa secara ideal lingkungan alam merupakan pendukung dari sistem infrastruktur, dan sistem ekonomi didukung oleh sistem infrastruktur. Sistem sosial sebagai objek dan sasaran didukung oleh sistem ekonomi.



GAMBAR 2.7
HUBUNGAN ANTARA SISTEM SOSIAL, EKONOMI,
INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ALAM

Sumber : Grigg,, dalam Kodoatie,2003

Dari gambar di atas dapat dikatakan bahwa lingkungan alam merupakan pendukung dasar dari semua system yang ada. Peran infrastruktur sebagai mediator antara system ekonomi dan social dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting (Kodoatie, 2003).

2.2 Partisipasi Masyarakat

2.2.1 Pengertian Partisipasi

Terdapat beberapa pengertian dasar mengenai proses partisipasi masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang memandang masyarakat dalam konteks dinamis yang mampu memobilisasi sumber daya sesuai dengan kepentingan, kemampuan dan aspirasi yang dimiliki, baik secara individu maupun komunal (Hall, 1986).
- b. Partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijakan hingga pelaksanaan program. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa keuangan, pemikiran dan material yang diperlukan (Wibisana, 1989).
- c. Partisipasi merupakan keterlibatan aktif dan bermakna dari masa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda, yaitu:
 - 1) Dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
 - 2) Dalam pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara sukarela.

- 3) Dalam pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau proyek (sesuai dengan azas pembangunan yaitu pembagian yang merata atas hasil pembangunan).

Definisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan pada semua tahapan dalam proses pembangunan, dari tahapan perencanaan pembangunan, tahapan pelaksanaan pembangunan, sampai tahapan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan (Slamet, 1992).

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Menurut Schubeler, tingkat peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan tergantung pada sikap warga dan efektivitas organisasi masyarakat (Schubeler, 1996). Disamping itu faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan serta mata pencaharian (Slamet, 1993).

- Jenis Kelamin.

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita akan berbeda dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita. Perbedaan kedudukan dan derajat ini akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Meskipun dewasa ini kesetaraan antara pria dan wanita sudah mulai berkembang dalam kehidupan masyarakat, tetapi di pedesaan hal ini belum bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki sejumlah hak istimewa

dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya kelompok pria akan lebih banyak ikut dalam partisipasi (Soedarno, 1992).

- Usia.

Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda yang berbeda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan (Soedarno, 1992). Dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman atau senior akan lebih banyak memberikan pendapat dan dalam hal menetapkan keputusan.

- Tingkat pendidikan

Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi. Dengan demikian dapat dipahami bila ada hubungan antara tingkat pendidikan dan peran serta. Salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha peran serta yang diberikan masyarakat dalam pembangunan (Litwin, 1986). Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya tentu mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan.

- Tingkat pendapatan

Tingkat pendapatan juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, penduduk yang lebih kaya biasanya membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga. Dalam proyek-proyek pembangunan penduduk yang lebih berada kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kegiatan fisik sendiri. Sementara penduduk miskin melakukan banyak pekerjaan namun tidak memberi kontribusi uang. Besarnya tingkat pendapatan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Suparlan, 1993).

- Mata pencaharian

Mata pencaharian akan berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencaharian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti, diskusi dan lain sebagainya. Faktor jenis mata pencaharian/pekerjaan berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi derajat aktifitas dalam kelompok dan mobilitas individu. (Slamet, 1994).

2.2.3 Tipe Peran Serta Masyarakat

Ada beberapa tipe-tipe peran serta masyarakat yang ada dimasyarakat terutama sekali untuk menggolongkan kesediaan masyarakat didalam pembangunan pada pemerintah yang demokratis. Karena peran serta tidak dapat terwujud dengan sebenar-benarnya tanpa adanya dukungan pemerintah sebegitu

juga sebaliknya tanpa ada dukungan rakyat, pemerintah demokrasi didalam pembangunan partisipatif tidak dapat terwujud.

Beberapa tipe peran sera masyarakat menurut Duseldorp (Slamet, 1993) mengklasifikan sebagai berikut:

a. Tipe berdasarkan derajat kesukarelaan

Berdasarkan bentuk derajat kesukarelaan, tipe ini mempunyai dua bentuk:

- 1) Bentuk bebas: bentuk peran serta bebas ini terjadi apabila seseorang melibatkan dirinya dalam suatu kegiatan partisipatif dilakukannya dengan ketulusan dan keiklasan (secara sukarela). Pada peran serta ini dapat dilakukan secara spontan ini seseorang melakukannya berdasarkan keyakinan dan tanpa dipengaruhi oleh pihak lain baik melalui ajakan ataupun penyuluhan maupun desakan lembaga lain. Sedangkan peran serta yang dilakukan karena terbujuk adalah karena seseorang individu mulai berperan setelah diyakinkan melalui program penyuluhan ataupun pengaruh dari pihak lain.
- 2) Bentuk terpaksa: bentuk peran serta ini terjadi karena terpaksa baik oleh hukum maupun oleh karena keadaan sosial ekonomi. Kegiatan peran serta terpaksa ini dilakukan karena adanya peraturan perundangan yang memaksanya dalam suatu kegiatan.

b. Tipe berdasarkan pada cara keterlibatan

Pada tipe ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Peran serta secara langsung: terjadi apabila seseorang menampilkan kegiatan tertentu didalam proses peran serta, misalnya: menyumbangkan tenaga, diskusi, mengambil peran dalam pertemuan dan lain-lain.
- 2) Peran serta tidak langsung: apabila seseorang menyerahkan haknya kepada orang lain untuk mewakilinya didalam suatu kegiatan partisipasi misalnya pengambilan keputusan pada dewan/senat, DPR, MPR dewan-dewan koperasi dan lain sebagainya.

c. Tipe berdasarkan keterlibatan dalam berbagai tahap pada proses pembangunan

Di dalam tipe terdapat beberapa langkah perwujudannya 6 (enam) langkah yaitu: perumusan persetujuan, penelitian, persiapan rencana, penerimaan rencana, pelaksanaan dan evaluasi. Peran serta pada tipe ini disebut peran serta lengkap dimana seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat secara penuh didalam proses tersebut. Sedangkan dikatakan peran serta sebagian, bila dikatakan keterlibatan seseorang secara langsung maupun tidak langsung tidak terlibat secara langsung proses tahapan tersebut.

d. Tipe berdasarkan pada tingkatan organisasi

Tipe ini berdasarkan peran serta yang terorganisasi dan yang tidak terorganisasi. Peran serta yang terorganisasi dapat dilihat dari strukturnya dan mempunyai seperangkat tata kerja yang dilaksanakan maupun dalam proses persiapannya. Sedangkan peran serta yang tidak terorganisasi lebih tercermin pada kegiatan temporer saja, tetapi akan menjadi peran serta yang terorganisir apabila kegiatannya berulang-ulang sehingga diperlukan adanya pengorganisasian.

e. Tipe berdasarkan pada intensitas dan frekuensi kegiatan

Berdasarkan intensitas kegiatan, peran serta akan menjadi intensif bila diperlukan aktivitas dan interval waktu yang diperlukan menjadi panjang.

f. Tipe berdasarkan pada lengkap kegiatan

Berdasarkan peran serta pada tipe terbagi menjadi dua macam pertama peran serta terbatas yaitu apabila seluruh kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi komunitas tertentu dapat diawasi oleh dan dijadikan sasaran kegiatan yang membutuhkan peran serta anggota pada komunitas tersebut. Kedua adalah peran serta terbatas, yang terjadi bila hanya sebagian kegiatan sosial, politik, administrasi dan lingkungan fisik yang dapat di pengaruhi melalui kegiatan partisipatif.

g. Tipe berdasarkan pada efektivitas

Pada tipe ini tingkat efektivitas menjadikan ukuran tingkat peran serta pada suatu kegiatan. Peran serta efektif bila kegiatan-kegiatan partisipatif telah menghasilkan perwujudan seluruh tujuan yang mengusahakan aktivitas peran serta. Sedangkan peran serta tidak efektif bila terjadi sebagian besar ataupun tidak satupun dari tujuan aktivitas partisipatif dari kegiatan yang dicanangkan tidak terwujud (kurang maksimal keberhasilan dari rencana yang telah dicanangkan atau dirembukan).

h. Tipe berdasarkan kepada siapa yang terlibat

Berdasarkan tipe ini, jelas sekali siapa-siapa yang terlibat didalam peran serta pada suatu kegiatan. Hal ini dapat dibedakan antara lain:

- Anggota masyarakat setempat
- Pegawai pemerintah

- Orang-orang luar
- Wakil-wakil masyarakat terpilih

i. Tipe berdasarkan gaya peran serta

Pada tipe ini lebih ditekankan pada pengorganisasian masyarakat, pada peran serta ini dibedakan menjadi tiga model, yaitu:

- a. Pembangunan lokalitas: lebih memiliki maksud melibatkan orang-orang mereka sendiri didalam pembangunan dan dengan ini akan lebih menumbuhkan energi sosial serta dapat mengarahkan pada kegiatan yang menolong diri sendiri.
- b. Perencanaan sosial: melibatkan peran serta masyarakat yang memiliki tujuan utama untuk mencocokkan kebutuhan yang dirasakan sehingga mereka didalam membuat program akan lebih selektif sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka sendiri.
- c. Aksi Sosial: memiliki tujuan utama untuk memudahkan hubungan kekuasaan dan pencapaian terhadap sumber-sumber (sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal dan teknologi).

2.2.4 Bentuk dan Wujud Peran Serta dalam Pembangunan

Partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan (Panudju, 1999). Pada umumnya keterbatasan masyarakat adalah mengembangkan dan melatih kemampuan mereka dan mengekspresikan kebutuhan, pemikiran dan perasaannya (Young, 1990). Untuk merubah keadaan,

keterbatasan tersebut dapat diwadahi melalui perencanaan (Hibbard and Lane, 2005).

Bentuk peran serta masyarakat sebenarnya sudah terbentuk sejak berjalan suatu proses, mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi dari suatu pembangunan dan kemudian dilanjutkan lagi sampai pada pemeliharaan untuk tetap berkelanjutan sehingga pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat tidak akan berhenti hanya pada titik pemanfaatan saja tetapi berputar terus tanpa ujung.

2.3 Perencanaan Pembangunan Partisipatif

2.3.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Merupakan sejarah baru bagi bangsa Indonesia karena untuk pertama kali memiliki Undang-undang Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, karena selama ini perencanaan pembangunan di daerah diatur di tingkat Menteri misalnya Kepmendagri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Daerah (P5D).

Selain Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya dari ke 3 Undang-undang tersebut mengatur tentang perencanaan pembangunan.

Hal yang sangat mendasar dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa proses pembangunan di daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan nasional. Oleh karena itu baik mekanisme, penganggaran dan

substansinya harus mencerminkan keterkaitan antara pusat dan daerah. Dasar Pelaksanaan Musrenbang adalah Surat Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negari Nomor 0259/M.PPN/I/2005 tanggal 20 Januari 2005 Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005.

Musrenbang dilaksanakan secara bertingkat dari tingkat Desa, Kecamatan, SKPD dan Kabupaten.

A. Tujuan.

1. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya.
2. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya.
3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.

B. Keluaran.

1. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa/Kelurahan yang bersangkutan
2. Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa, secara swadaya maupun melalui pendanaan lainnya.
3. Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten dan APBD Propinsi.

4. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang desa/Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.

D. Peserta.

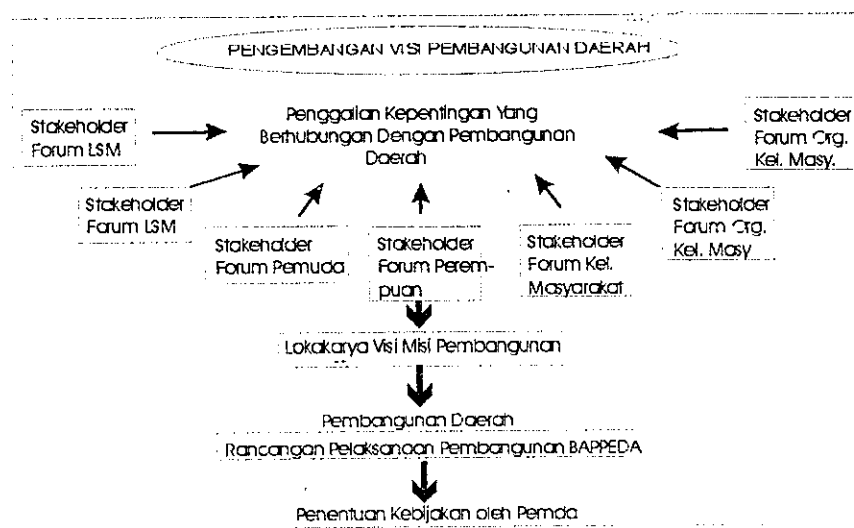
Komponen Masyarakat (Individu/Kelompok) yang berada di desa/Kelurahan seperti: Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ketua Adat, Kelompok perempuan, Kelompok Pemuda, Organisasi Masyarakat, Pengusaha, Kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain.

2.3.2 Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Kegiatan perencanaan tingkat daerah harus diarahkan berdasarkan isu yang dianggap relevan bagi pembangunan. Dimulai dengan perumusan visi dan tujuan umum pembangunan jangka panjang berdasarkan masukan dari kelompok stakeholder terkait, sehingga visi misi menjadi milik bersama dan acuan untuk semua pelaku pembangunan di daerah.

Pemahaman terhadap proses perencanaan partisipasi penting untuk mendorong pemerintahan daerah agar memiliki kesepahaman tentang mekanisme dan formulasi proses Musrenbang. Meskipun “Event Musrenbang” bukan merupakan barang baru bagi semua pihak di tingkat Kabupaten, namun kenyataannya menunjukkan bahwa sampai saat ini hanya 1 – 5 % saja usulan dari bawah (hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan) yang tertuang dan diakomodir dalam APBD. Untuk itu penyegaran tentang Proses Musrenbang partisipatif yang efektif perlu dilaksanakan sebelum pra-Musrenbang dimulai. Sehingga ada kesamaan pandangan dan kebutuhan serta konsisten terhadap suatu proses partisipasi yang nyata.

Dasar dari ketegangan ini adalah antara prakarsa dan kepercayaan yang terjadi diatas 2 (dua) konflik kerangka pikir dalam pelaksanaannya, yang melekat dalam struktur organisasi dan proses perencanaan yang melingkupinya. Di salah satu sisinya sebagai ideologi dari hubungan tindakan dan demokrasi lokal yang dilakukan oleh pergerakan "grass root" dan tindakan suka rela, disisi lainnya sebuah kesetiaan pada perencanaan yang rasional, dan essensinya dilakukan oleh pendekatan birokrasi di dunia pemerintahan, philantropi dan keahlian (Chaskin, 2005).



GAMBAR 2.8
SKEMA GARIS BESAR UNTUK MENGEMBANGKAN VISI
PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF.

Sumber : Arif Roesman Effendy dan Birgit Kerstan-PROMIS-NT, 2003

Dari Gambar 2.8. dapat dijelaskan bahwa penentuan kebijakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD bertitik tolak pada Visi Pembangunan Daerah dimana penggalian kepentingan yang berhubungan dengan pembangunan daerah didasarkan pada hasil lokakarya berdasarkan visi-misi pembangunan daerah.

Tetapi untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas selain mengacu pada visi pembangunan daerah juga didukung oleh para ahli, perencanaan yang dihasilkan sudah berdasarkan kondisi dan potensi wilayahnya tetapi untuk lebih memantapkannya perlu bantuan para ahli dalam bidangnya, seperti yang diutarakan oleh (O'Connor, 1999, Halpern, 1995).

2.4 Efektivitas Perencanaan

2.4.1 Pengertian Efektivitas

Didalam berbagai bidang keahlian, pengertian efektivitas sangat beragam dan tergantung kepada konteks yang bagaimana efektivitas tersebut digunakan. Tetapi pada umumnya para ahli sependapat bahwa pengertian efektivitas pada prinsipnya adalah seberapa besar hasil guna yang dicapai dengan mempergunakan semaksimal mungkin sarana dan prasarana serta sumber daya yang tersedia.

Menurut Barnard (Gypson, 1996), efektivitas adalah mempunyai pencapaian sasaran dari upaya bersama, dimana derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat keefektivan yang dicapai. Sedangkan menurut (Drucker, 1974) bahwa efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secara empiris dalam suatu sistem dengan keluaran (out-put) yang diharapkan. Jadi efektivitas berkaitan erat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yang lebih baik sesuai dengan tujuan semula.

Bahkan menurut (Harvey & Blanchard, 1996), bahwa efektivitas bila dihubungkan dengan konteks manajemen adalah tercapainya suatu tujuan yang konsisten dengan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok pada tingkatan

yang lebih bawah dan berlaku juga bahwa efektivitas tampak seperti kontinum yang beranjak sangat efektif sampai kepada sangat tidak efektif.

Kalau dilihat dari beberapa pengertian dan penjelasan tersebut diatas, maka pengertian efektivitas dapat disimpulkan sebagai berikut: Efektivitas merupakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dengan mempergunakan sarana dan prasarana serta sumberdaya yang tersedia. Dengan demikian, suatu kegiatan akan dikatakan efektif apabila sumber daya yang digunakan (sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya), dapat seimbang dengan hasil dan manfaat yang dihasilkan. Jadi sasaran yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan (input sama dengan output) atau lebih dikenal dengan teori keseimbangan

2.4.2 Tingkat Efektivitas Perencanaan

Untuk mengukur tingkat efektivitas suatu kelompok, perlu adanya pengukuran dan menurut (Etzioni, 1980) indikator-indikator pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Orientasi terhadap lingkungan
- b. Alokasi sumber daya secara optimum
- c. Realisasi tujuan

Lebih lanjut dijelaskan (Argyris, 1980) yang menjadi indikator tingkat efektivitas kelompok/organisasi adalah:

- a. Adaptasi terhadap lingkungan luar kelompok
- b. Pengawasan intern kelompok
- c. Pencapaian tujuan

Jika masyarakat benar-benar diberi kesempatan dan peluang serta haknya, untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan diperkirakan akan berlangsung efektif dan efisien, jadi tujuan dari pembangunan itu dapat benar-benar tercapai misalnya peningkatan kualitas atau pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana akan lebih baik.

Partisipasi masyarakat yang demikian akan membangkitkan semangat kemandirian dan kerjasama antara masyarakat. Masyarakat sendiri akan berusaha meningkatkan partisipasinya, swadayanya, yang pada akhirnya akan mengurangi beban kebutuhan sumber daya pemerintah.

Disisi lain segi efektivitas dan efisiensi peran serta masyarakat perlu juga diwaspadai, dimana peran serta masyarakat jangan hanya tercipta pandangan dari sumbangan sumber daya yang bersifat nyata dan terukur (uang, tanah dan tenaga). Akan tetapi, peran serta masyarakat bisa juga terlihat dari sumbangan sumber daya yang tidak terlihat/tidak tampak yaitu pengetahuan (sumber daya, kebutuhan, prioritas dan daerah masyarakat tersebut), kreativitas, ketrampilan dan organisasi.

Jadi dengan demikian, agar masyarakat diberi kesempatan untuk menyumbangkan sumber daya yang ada didalam masyarakat baik yang tampak maupun yang tidak nampak agar mereka tidak kehilangan motivasi, kemauan dan kreativitas serta keantusiasan mereka didalam mewujudkan peran sertanya.

Tingkat peran serta dalam pembangunan akan efektif dan efisien bila telah berada pada jenjang *degrees of citizen Power*, dimana masyarakat memiliki kekuatan mayoritas didalam pengambilan keputusan (Arnstein, 1995).

2.4.3 Efektivitas Musrenbangdes Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan Kondisi dan Potensi Wilayah.

Perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes haruslah berdasarkan kondisi lingkungan dan potensi wilayah seperti diutarakan oleh (Kodoatie, 2003), bahwa lingkungan alam merupakan pendukung dasar dari semua system yang ada. Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting. Perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antar sumber daya manusia dengan sumber daya lain, termasuk sumber daya alam dan lingkungan melalui investasi (Prisma, 1996).

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg,2000).

Dengan demikian perencanaan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes harus berorientasi terhadap lingkungan (kondisi wilayah) dan mengoptimalkan sumber daya yang ada (potensi wilayah). Dalam pelaksanaannya perencanaan infrastruktur pedesaan harus memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang teguh pada azas skala

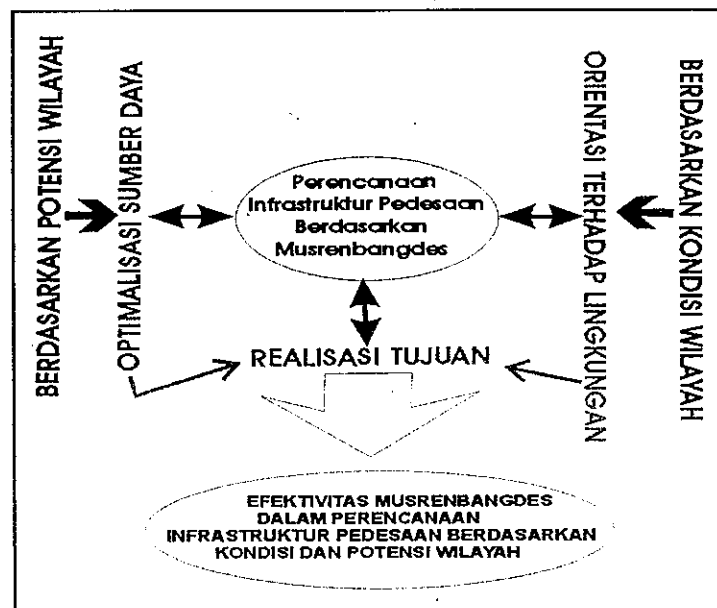
prioritas (Bratakusumah,2004). Dengan demikian Perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks , sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya yang lainnya (Jensen,1995).

Menurut Barnard (Gypson, 1996), efektivitas adalah mempunyai pencapaian sasaran dari upaya bersama, dimana derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat keefektivan yang dicapai. Sedangkan menurut (Drucker, 1974) bahwa efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secara empiris dalam suatu sistem dengan keluaran (out-put) yang diharapkan. Jadi efektivitas berkaitan erat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yang lebih baik sesuai dengan tujuan semula.

Maka untuk menentukan tingkat tingkat efektivitas pelaksanaan Musrenbangdes dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan, didasarkan pada indikator-indikator efektivitas yang ada yaitu: 1) Berorientasi terhadap lingkungan, 2) Optimalisasi sumber daya, 3) Realisasi Tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan teori-teori, untuk mengukur efektivitas Musrenbangdes berdasarkan kondisi dan potensi wilayah melalui indikator-indikator efektivitas maka, indikator orientasi terhadap lingkungan dalam Musrenbangdes didasarkan pada kondisi geografis wilayah, indikator optimalisasi sumber daya didasarkan pada potensi wilayah, dan indikator realisasi tujuan didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di wilayah yang bersangkutan, lebih jelasnya

pengukuran tingkat efektivitas melalui Musrenbangdes dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



GAMBAR 2.9.
PENGUKURAN EFEKTIVITAS MUSRENBANGDES BERDASARKAN
KONDISI DAN POTENSI WILAYAH.

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari Gambar 2.9 dapat dijelaskan bahwa efektivitas perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes berdasarkan kondisi dan potensi wilayah diukur melalui indikator-indikator efektivitas yaitu berdasarkan kondisi wilayah (berorientasi terhadap lingkungan), berdasarkan potensi wilayah (optimalisasi sumber daya), dan realisasi tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah. Sehingga diketahui efektivitas Musrenbangdes dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah.

BAB III

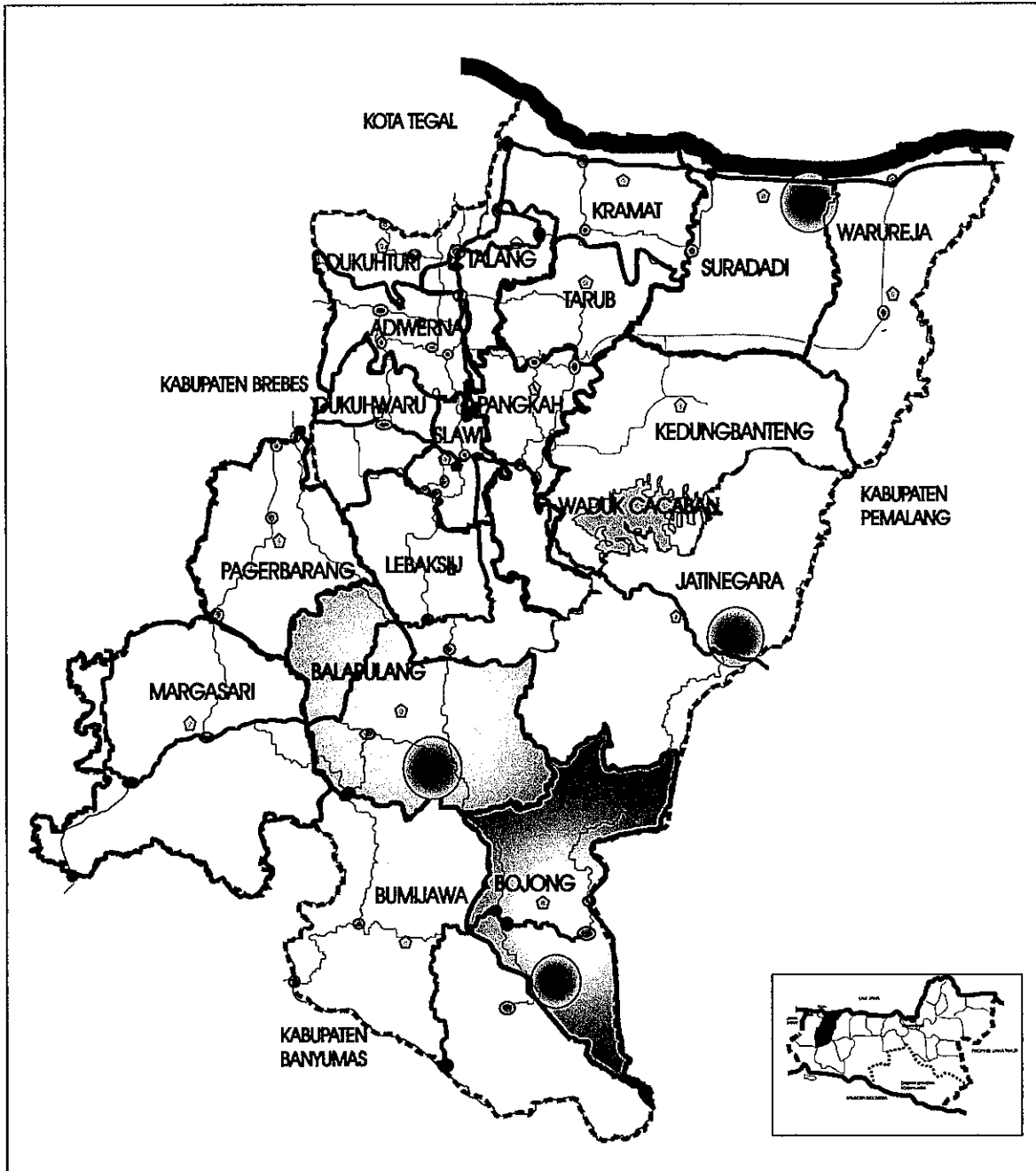
GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR PEDESAAN DAN PROSES MUSRENBANGDES DI KABUPATEN TEGAL








3.1 Gambaran Umum Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan Ibu kota di Slawi, dibatasi oleh laut Jawa disebelah Utara, Kabupaten Pemalang disebelah Timur dan Selatan, dan Kabupaten Brebes di sebelah barat

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 1950, Jo PP. No. 2 tahun 1984 dan PP. No. 7 tahun 1986, pembagian wilayah administrasi dan bidang pemerintahan kabupaten Tegal yang meliputi luas wilayah 87.879 ha dengan pusat pemerintahan di Slawi dibagi menjadi 18 Kecamatan meliputi 281 Desa dan 6 Kelurahan dari wilayah tersebut diatas meliputi 931 Dusun 1.343 RW (Rukun Warga) dan 6.414 RT (Rukun Tetangga).

Secara geografis Kabupaten Tegal terletak diantara $6^{\circ} - 7^{\circ}$ LS dan $108^{\circ} - 109^{\circ}$ BT. Oleh karena Kabupaten Tegal termasuk kota pesisir, struktur tanah terdiri dari pasir dan tanah liat. Dengan ketinggian 3 (tiga) meter dari permukaan air laut dan memiliki temperature rata rata 27,1 dengan curah hujan 1700 – 3000 mm/tahun. Jumlah penduduk Kabupaten Tegal mencapai 1.379.180 jiwa, dengan mata pencaharian terbesar sebagai pedagang, yaitu 18.627 jiwa atau 14,40%. Selebihnya buruh, petani, nelayan, PNS, TNI dan pelajar.

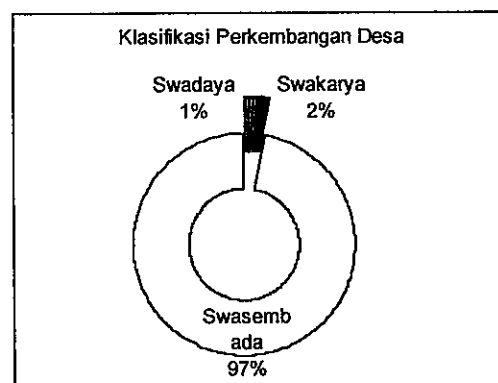


 MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCA SARAJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO	LOKASI PENELITIAN		UTARA 
	LEGENDA		SKALA 1 : 10.000
TESIS EFEKTIVITAS MUSRENBANGDES DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	 Ibu Kota Kecamatan	 Ibu Kota Kabupaten	NO. GAMBAR 3.1.
	 Jalan Proprietal	 Lokasi Penelitian	SUMBER BAPPEDA KABUPATEN TEGAL
	 Jalan Kabupaten		

3.2 Kondisi Geografis Desa/Kelurahan di Kabupaten Tegal

Kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan telah dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Tegal, pembangunan tersebut dilaksanakan dengan biaya swadaya masyarakat, bantuan pemerintah daerah dan bantuan dari Pemerintahan Pusat.

Dengan melihat Gambar 3.2. dibawah ini bisa dilihat bahwa desa swasembada sudah mencapai 96,06 %, desa swakarya 1,74% hal ini menunjukkan bahwa desa-desa di Kabupaten Tegal telah menunjukkan pembangunan yang baik.



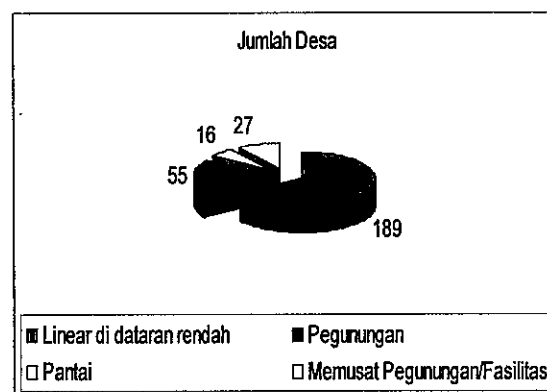
Sumber : Kantor PMD Kab. Tegal, 2003

GAMBAR 3.2
KLASIFIKASI PERKEMBANGAN DESA DI KABUPATEN TEGAL

Masalah utama dalam usaha membangun dan merencanakan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah perbedaan potensi dan sumber daya antar dan intra wilayah. Oleh karena itu tugas utama dalam usaha pembangunan atau pengembangan Desa/Kelurahan adalah bagaimana mengurangi ketimpangan tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam suatu sistem penataan ruang secara fungsional maupun teritorial.

Dari letak geografis wilayah, Kabupaten Tegal terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan, perbedaan ini menghasilkan adanya pertumbuhan dan pengembangan pembangunan di wilayah Desa/Kelurahan sesuai dengan kondisinya. Perbedaan perkembangan yang terjadi menunjukkan adanya dinamika pembangunan di daerah pedesaan di Kabupaten Tegal.

Dengan melihat Gambar 3.3 dibawah ini bisa dilihat bahwa letak desa berdasarkan kondisi wilayah adalah sebagai berikut, dari 287 desa/kelurahan yang termasuk kategori didaerah pantai sebanyak 16 desa (5,6 %), linear didataran rendah sebanyak 189 desa (65,9 %), pegunungan 55 desa (19,2 %) dan memusat fasilitas baik pegunungan maupun fasilitas sebanyak 27 desa (9,4 %) hal ini menunjukkan bahwa desa-desa di Kabupaten Tegal mempunyai perbedaan karakteristik berdasarkan kondisi geografisnya.



GAMBAR 3.3
KONDISI GEOGRAFIS WILAYAH PEDESAAN
DI KABUPATEN TEGAL

Sumber : Kantor PMD Kab. Tegal, 2003

Berdasarkan data tersebut maka dari tiap kondisi geografis wilayah diambil satu desa sebagai lokasi penelitian, diharapkan walaupun tidak mewakili

secara keseluruhan tetapi paling tidak dapat menggambarkan kondisi pedesaan di Kabupaten Tegal berdasarkan perbedaan letak geografis wilayah, desa-desa tersebut adalah Desa Kalibakung Kecamatan Balapulang, Desa Gunungjati Kecamatan Bojong, Desa Cerih Kecamatan Jatinegara dan Desa Bojongsana Kecamatan Suradadi.

3.3 Kondisi Sarana Prasarana

Dari hasil pengamatan ke lapangan pemilihan lokasi penelitian di tingkat desa dari masing-masing kecamatan terpilih adalah dengan pertimbangan bahwa desa tersebut mempunyai kategori serta karakteristik yang termasuk dalam 4 (empat) bentuk desa yang ada yaitu Desa Pantai, Desa Memusat Pegunungan, Desa Memusat Fasilitas dan Desa Linear di Dataran Rendah.

3.3.1 Desa Kalibakung Kecamatan Balapulang

Desa Kalibakung mempunyai akses transportasi yang baik, yaitu dengan dilalui oleh jalan kabupaten dari arah Kecamatan Balapulang menuju Bojong dan dari Kecamatan Lebaksiu ke Kecamatan Bojong, dengan bertemunya dua jalan lokal primer ini Desa Kalibakung mempunyai lokasi yang strategis dalam kegiatan ekonomi.

Kondisi topografi Desa Kalibakung terletak di wilayah dataran tinggi, khususnya berada di kaki Gunung Slamet dengan kemiringan 2% sampai 10%, mengingat kondisi lahan yang berkontur. Kondisi tanah di Desa Kalibakung secara umum cukup baik, hanya saja ada satu kendala yang menjadi keluhan warga yaitu tidak adanya saluran irigasi. Kondisi ini mengakibatkan hampir

seluruh sawah yang ada merupakan sawah tadah hujan, dengan demikian dalam satu tahun sebagian warga hanya dapat memanen padi sebanyak satu kali.

Pengembangan wilayah Desa Kalibakung tidak bisa lepas dari pengaruh Kota Kecamatan Balapulang sebagai Ibukota Kecamatan Balapulang. Orientasi ekonomi Desa Kalibakung langsung kearah pusat Kota Balapulang, dan Kota Lebaksiu serta ke arah selatan ke Kota Bojong.

Sebagai desa yang menghubungkan antara jalur utama Kecamatan Balapulang dan Kecamatan Lebaksiu yaitu dengan adanya jalan lokal primer yang menghubungkan Balapulang-Kalibakung-Bojong, merupakan *outlet* bagi kegiatan sosial ekonomi yang sangat baik, sehingga disekitar jalan tersebut perkembangannya relatif cepat, namun secara umum sebagian wilayah lainnya mempunyai aksesibilitas yang cukup sulit.

TABEL III.1
KONDISI KEPENDUDUKAN DAN ORGANISASI DESA KALIBAKUNG
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

No	Kegiatan	Keterangan
1	2	3
1	Klasifikasi Desa	Swasembada
2	Kategori LKMD	Kategori 3
3	Jumlah Dusun/Lingkungan	3 dusun
4	Jumlah RK/RW	3 RW
5	Jumlah RT	16 RT
6	Jumlah Penduduk	2576 jiwa
7	Jumlah Rumah Tangga	559 KK
8	Jumlah Rumah Tangga Pertanian	141 KK

Sumber : Statistik Potensi Desa Kabupaten Tegal, 2003

Desa Kalibakung termasuk desa swasembada kategori 3 yang berarti bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah baik. Jumlah penduduk sebesar 2.576 yang terbagi dalam 3 (tiga) RW dan 16 (enam belas) RT mempunyai karakteristik yang beragam karena hanya 25% rumah tangga berprofesi sebagai petani.

Luas Desa Kalibakung 307,6 ha dan luas lahan sawah 53,2 ha dan kesemuanya non irigasi karena tidak adanya sumber mata air, sehingga lahan pertanian merupakan ladang, tegalan atau kebun, dengan data tersebut dapat dikatakan bahwa kondisi irigasi yang ada kurang baik atau potensi lahan yang ada cukup dengan pengairan non-irigasi.

TABEL III.2
KONDISI INFRASTRUKTUR DESA KALIBAKUNG
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

No.	Kegiatan	Keterangan
1	2	3
1	Penerangan Jalan Utama	Ada (PLN)
2	Banyaknya Rumah Tangga Pelanggan Listrik	503 rumah
3	Jumlah Rumah	
	a. Jumlah Rumah Permanen	475 rumah
	b. Jumlah Rumah tidak Permanen	53 rumah

Sumber : Statistik Potensi Desa Kabupaten Tegal, 2003

Kondisi sarana prasarana baik listrik ataupun perumahan sudah cukup baik, tetapi kondisi fasilitas kesehatan dan pendidikan kurang menunjang, dan air bersih yang ada masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3.3.1.1 Jalan

Dari hasil pengamatan di lapangan Desa Kalibakung memiliki jalan berpola rangka daun, dengan jalan utama yang merupakan jalan lokal primer. Dari

keadaan pola jaringan jalan yang ada bila ditinjau secara lokal dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu:

1. Jaringan jalan lokal primer, yaitu jaringan jalan Kabupaten yang menghubungkan antara Desa Kalibakung dengan Kecamatan Bojong dan Kecamatan Balapulang.
2. Jaringan jalan sekunder, adalah jaringan jalan yang menghubungkan antar pedukuhan di Desa Kalibakung.
3. Jaringan jalan lingkungan, yaitu jalan kampung yang berada di dalam satu blok lingkungan, baik yang menghubungkan antar satuan lingkungan (RW/RT) ataupun dalam satu satuan lingkungan yang bisa berupa gang masuk lingkungan perumahan.

Prioritas rencana pembangunan jalan adalah pengaturan dan pengembangan jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder yang ada di Desa Kalibakung, sehingga mampu merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data tahun 2003 serta pengamatan dilapangan mengenai kualitas jaringan jalan di desa Kalibakung, apabila dikaitkan dengan rencana pola dan fungsi jalan maka rencananya adalah sebagai berikut:

1. Jalan lingkungan, direncanakan jaringan jalan ini memiliki jenis perkerasan sebagian aspal, makadam atau paving blok.
2. Jalan lokal sekunder, direncanakan jaringan jalan ini memiliki jenis perkerasan sebagian aspal atau makadam.
3. Jalan lokal primer, direncanakan jaringan jalan ini memiliki perkerasan aspal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas jalan baik dimensi maupun perkerasannya sesuai dengan fungsinya.

3.3.1.2 Air Bersih

Berdasarkan data yang ada, Desa Kalibakung belum mendapatkan pelayanan air bersih yang terkelola dengan sistem jaringan perpipaan (PDAM). Kebutuhan air bersih didapatkan dari sumur dan sumber mata air. Dari hasil tinjauan lapangan dan pengamatan langsung terdapat beberapa sumber air bersih yang bisa dimanfaatkan baik untuk air minum maupun air irigasi, tetapi belum dioperasikan karena beberapa alasan, mekanisme penyaluran dan pengelolaannya, jaringan yang belum memadai serta permasalahan pompa yang belum ada sehingga membutuhkan dana yang cukup besar. Apabila dikembangkan lebih lanjut bisa dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, disamping sumber lain.

Dalam pengembangannya, penyediaan air bersih yang terkelola diprioritaskan pada daerah-daerah di sekitar jalan utama, sedang selebihnya dipertimbangkan pengembangannya.

Kebutuhan air bersih saat ini dari sumur gali relatif sudah memadai, pengembangan jaringan air bersih yang direncanakan adalah untuk mengantisipasi penambahan kebutuhan air bersih karena bertambahnya jumlah penduduk.

3.3.1.3 Listrik

Rencana penyediaan listrik di Desa Kalibakung meliputi kebutuhan pemakaian dan pengembangan distribusi jaringan. Sedangkan rencana pengembangan jaringan listrik diarahkan untuk menentukan prioritas sebaran

lokasi di wilayah perencanaan yang memungkinkan diadakan penyambungan-penyambungan baru, terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi penduduk yang sampai saat ini belum terjangkau fasilitas ini maupun untuk memenuhi kebutuhan akibat penambahan penduduk ditahun-tahun mendatang. Dalam analisis diasumsikan bahwa daya yang tersambung ke perumahan saat ini adalah 450 watt tiap rumah.

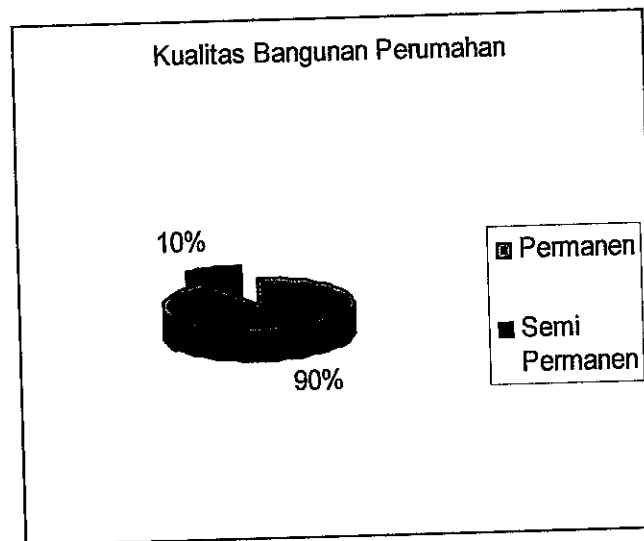
Berdasarkan data tahun 2003 yang ada, maka jumlah rumah yang ada di Desa Kalibakung adalah sebanyak 503 rumah terdiri dari 559 KK atau setiap rumah dihuni ± 5 jiwa. Dari data yang sama, hampir seluruh perumahan di Desa Kalibakung sudah menikmati fasilitas listrik .

Berdasarkan hasil pengamatan, masih terdapat beberapa unit rumah yang belum terjangkau listrik, terutama daerah-daerah permukiman baru yang merupakan perkembangan dari lingkungan permukiman yang sudah ada.

3.3.1.4 Perumahan

Keadaan struktur dan kualitas bangunan rumah di Desa Kalibakung dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu bangunan permanen (berdinding tembok) dan bangunan sederhana/tidak permanen (berdinding kayu dan bambu).

Berdasarkan data pada tahun 2004 dan pengamatan di lapangan, bahwa sebagian besar tempat tinggal yang ada sudah berdinding tembok. Dari 528 rumah yang ada 475 sudah berdinding tembok sisanya 53 rumah tidak permanen tetapi sudah layak sebagai tempat hunian yang sehat.



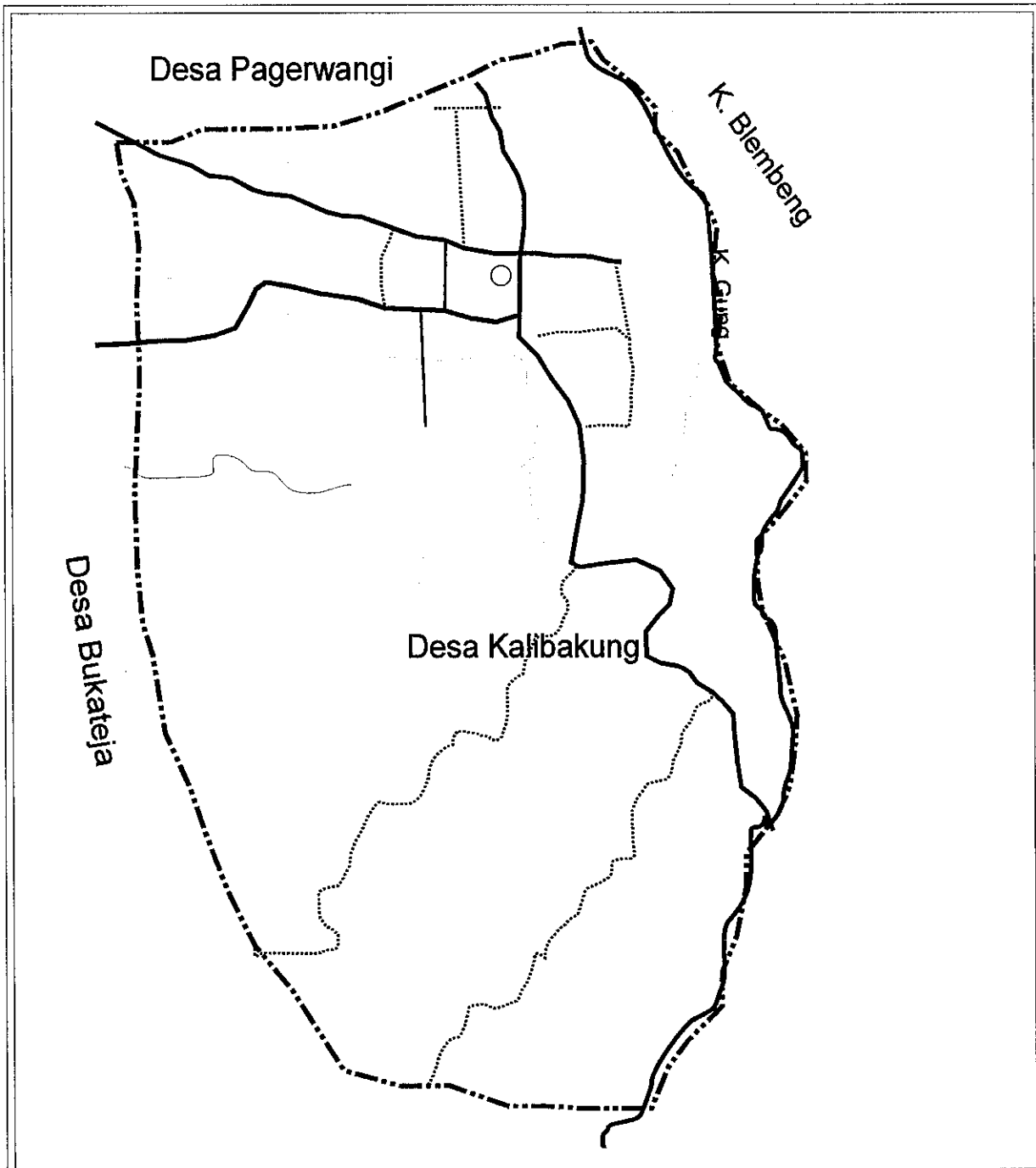
GAMBAR 3.4
GRAFIK KUALITAS BANGUNAN PERUMAHAN











Sumber : Statistik Potensi Desa Kabupaten Tegal, 2003

3.3.1.5 Irigasi

Dari total luas desa 307,6 ha, 17,3 % lahan, merupakan lahan sawah non-irigasi, petani hanya mengandalkan tanaman palawija dan air hujan untuk mengairi tanah sawah mereka.

Keberadaan jaringan irigasi sangatlah berpengaruh terhadap hasil panen masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, dengan hanya mengandalkan air hujan saja hasil panen tidak dapat maksimal, tetapi ada pembangunan irigasi dengan mengoptimalkan lagi sumber air dari mata air yang dulu ada petani bisa panen dua kali dalam setahun, hasilnya bisa dirasakan masyarakat yaitu berwujud peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.



 PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2005	LOKASI PENELITIAN DESA KALIBAKUNG KECAMATAN BALAPULANG		UTARA 
	LEGENDA		SKALA  0 500 m
TESIS EFEKTIFITAS MUSRENBANGDES DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	 Jalan Kabupaten	 Batas Kabupaten	NO. GAMBAR Gambar 3.5. SUMBER Peta Desa
	 Jalan Desa	 Sungai	
	 Jalan Lingkungan	 Balai Desa	
	 Batas Desa		

3.3.2 Desa Gunungjati Kecamatan Bojong

Wilayah Desa Gunungjati masih sangat bersifat pedesaan dengan fasilitas sarana pendukung yang masih belum memadai sehingga perkembangan wilayah ini relatif lambat, letaknya yang berbatasan dengan Kabupaten Pemalang mempengaruhi pergerakan masyarakat dalam aktifitas ekonomi.

Jalan lokal primer yang menghubungkan dengan Kota Bojong sebagai ibukota Kecamatan Bojong sudah cukup baik, tetapi belum didukung oleh sarana transportasi yang memadai, jalur ini hanya dilalui oleh kendaraan yang mengangkut hasil bumi dari para petani.

Pola daerah terbangun (permukiman) yang terbentuk masih kurang menyatu (sprawl) sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan prasarana baik air bersih, listrik maupun fasilitas jalan.

TABEL III.3
KONDISI KEPENDUDUKAN DAN ORGANISASI DESA GUNUNGGJATI
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL

No	Kegiatan	Keterangan
1	Klasifikasi Desa	Swasembada
2	Kategori LKMD	kategori 2
3	Jumlah Dusun/Lingkungan	2 Dusun
4	Jumlah RK/RW	2 RW
5	Jumlah RT	12 RT
6	Jumlah Penduduk	2040 jiwa
7	Jumlah Rumah Tangga	438 KK
8	Jumlah Rumah Tangga Pertanian	314 KK

Sumber : Statistik Potensi Desa Kabupaten Tegal, 2003

Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah petani, hal tersebut dapat dilihat bahwa 61% dari total rumah tangga merupakan rumah tangga pertanian.

Kondisi topografi sebagian wilayahnya miring dan merupakan perbukitan, hal ini dapat terlihat dari kemiringan tanah yang bervariasi dari 0% hingga lebih dari 40%, ketinggian dari permukaan laut wilayah ini mempunyai ketinggian 650 m – 1.000 m dari permukaan laut (dpl).

Desa Gunungjati letaknya jauh dari kota besar, baik Kota Tegal maupun slawi yang mengakibatkan kurangnya tarikan perekonomian antar kota , sehingga mengakibatkan pengembangan wilayah desa belum ditangani., hal ini terlihat dengan kondisi perumahan dan pendidikan yang masih kurang memadai.

TABEL III.4
ADMINISTRASI WILAYAH DESA GUNUNGJATI
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL

No.	Kegiatan	Keterangan (Ha)
1	Luas Desa	158.5
2	Luas lahan Sawah	
	a. Irigasi	42.5
	b. Non Irigasi	20
3	Luas Lahan Bukan Sawah	
	a. Ladang, huma, Tegalan, Kebun	73.5
	b. Perumahan dan permukiman	20
	c. Lainnya	2.5

Sumber : Statistik Potensi Desa Kabupaten Tegal, 2003

Dengan melihat proporsi wilayah Desa Gunungjati merupakan desa pertanian hal ini membutuhkan penanganan khusus dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pendukungnya.

3.3.2.1 Jalan

Berdasarkan pengamatan di lapangan jaringan jalan di Desa Gunungjati memiliki pola jalan daun, dengan jalan utama yang merupakan jalan lokal primer,

dari keadaan jalan yang ada bila ditinjau secara lokal dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu:

1. Jaringan jalan lingkungan adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar lingkungan/gang-gang dimana pada umumnya menghubungkan antar satuan permukiman atau jalan masuk ke masing-masing lingkungan kecil yang ada di desa Gunungjati. Jalan ini sebagian besar masih berupa jalan tanah tetapi sebagian ada juga yang sudah diperkeras. Lebar jalan ini rata-rata sangat sempit dan dibatasi dengan pekarangan, pagar pohon atau menyatu dengan halaman rumah penduduk.
2. Jaringan jalan lokal sekunder, adalah jalan-jalan yang menghubungkan antar lingkungan satu dengan lingkungan yang lain di Desa Gunungjati. Pada umumnya kondisi jalan sudah diperkeras baik dengan aspal atau makadam.
3. Jaringan jalan lokal primer, yaitu jalan yang menghubungkan antara blok\blok lingkungan dengan akses ke regional ke pusat ibukota Kecamatan Bojong dan Kabupaten Tegal. Akses Regional antara lain yaitu menghubungkan ruas jalan Gunungjati-Sangkanayu-Suniarsih-Moga, Gunungjati-Bojong, maupun jalan Gunungjati-Batunyana-Lengkong-Bojong, Gunungjati-Sangkanayu, Suniarsih-Kedawung-Tuwel-Bojong dan Gunungjati-Pucangluwuk -Jatinegara. Kondisi jalan ini sudah diaspal dan cukup baik, hanya masih sempit dan perlu dilebarkan lagi, dan hanya sebagian kecil kondisi jalan yang rusak.

Berdasarkan data tahun 2003 serta pengamatan dilapangan mengenai kualitas jaringan jalan di Desa Gunungjati , apabila dikaitkan dengan rencana pola dan fungsi jalan maka rencananya adalah sebagai berikut:

1. Jalan lingkungan, direncanakan jaringan jalan ini memiliki jenis perkerasan sebagian aspal, makadam atau paving blok.
2. Jalan lokal sekunder, direncanakan jaringan jalan ini memiliki jenis perkerasan sebagian aspal atau makadam.
3. Jalan lokal primer, direncanakan jaringan jalan ini memiliki perkerasan aspal

Jaringan jalan yang sudah ada secara umum sudah mampu membangkitkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang cukup kuat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas jalan baik dimensi maupun perkerasannya sesuai dengan fungsinya. Selain pengembangan jalan yang direncanakan, sebagian lainnya terjadi secara alamiah karena perkembangan pemukiman yang sebagian besar adalah jalan lingkungan.

3.3.2.2 Air Bersih

Hasil pengamatan dilapangan sera berdasarkan data-data yang ada di Desa Gunungjati sampai saat ini belum tersedia pengadaan air bersih yang dikelola secara teratur dari PDAM, di sekitar Desa Gunungjati terdapat beberapa sumber mata air baik kecil maupun besar antara lain Tuk Kemadu di Desa Sangkanayu (tepi kali rambut) dengan debit +/- 50 l/detik dan Tuk Balekambang di Kabupaten Pematang. Selain itu kebutuhan air bersih diambil dari sumber-sumber mata air kecil yang diambil disekitar Desa Gunungjati. Penyaluran air bersih dilakukan oleh masyarakat melalui pipa-pipa pralon/selang dimana penyediaan air bersih ini dilakukan sendiri oleh penduduk dengan swadaya dan sebagian pipa penyalur sudah usang dan rusak, selain itu penduduk untuk memnuhi kebutuhan air bersih menggunakan sumur gali.

Permasalahan yang lain adalah pola pembagian yang kurang terkendali dan kecilnya debit mata air yang adakecilnya debit air yang ada sehingga pola pembagian tidak merata, apalagi pada saat musim kemarau. Namun demikian untuk sementara cakupan pelayanan masih mencukupi.

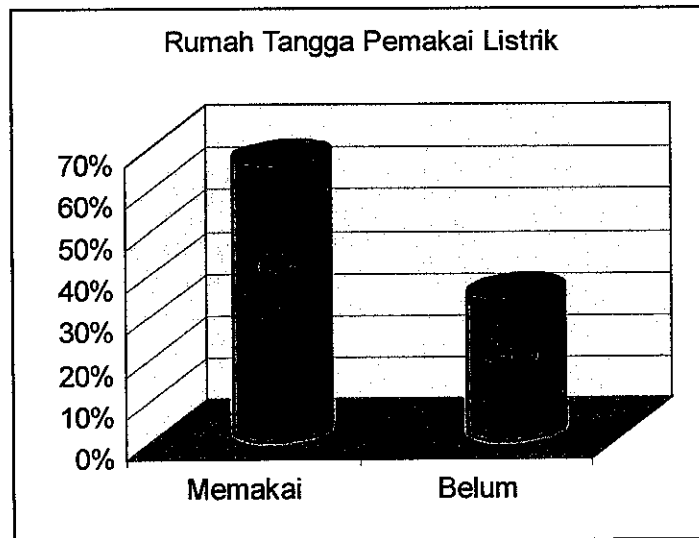
Untuk rencana pengembangan penyediaan airbersih dengan pengelolaan yang lebih baik, diprioritaskan pada daerah-daerah yang belum terjangkau dan meningkatkan debit dengan jalan mencari sumber-sumber mata air baru serta pemeliharaan sarana prasarana perpipaan yang sudah ada.

3.3.2.3 Listrik

Rencana penyediaan listrik di Desa Gunungjati meliputi kebutuhan pemakaian dan pengembangan distribusi jaringan. Sedangkan rencana pengembangan jaringan listrik diarahkan untuk menentukan prioritas sebaran lokasi di wilayah perencanaan yang memungkinkan diadakan penyambungan-penyambungan baru, terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi penduduk yang sampai saat ini belum terjangkau fasilitas ini maupun untuk memenuhi kebutuhan akibat pertambahan penduduk ditahun-tahun mndatang. Dalam analisis diasumsikan bahwa daya yang tersambung ke perumahan saat ini adalah 450 watt tiap rumah.

Berdasarkan data tahun 2003 yang ada, maka jumlah rumah yang ada di Desa Gunungjati adalah sebanyak 387 rumah terdiri dari 438 KK atau setiap rumah dihuni \pm 5 jiwa. Dari data yang sama, jumlah KK yang sudah menikmati fasilitas listrik di Desa Gunungjati adalah 258 rumah. Dari data tersebut, jumlah

rumah yang belum/tidak menikmati fasilitas listrik di Desa gunungjati adalah 129 rumah



GAMBAR 3.6
GRAFIK RUMAH TANGGA PEMAKAI LISTRIK

Sumber : Statistik Potensi Desa Kabupaten Tegal, 2003, Dianalisis

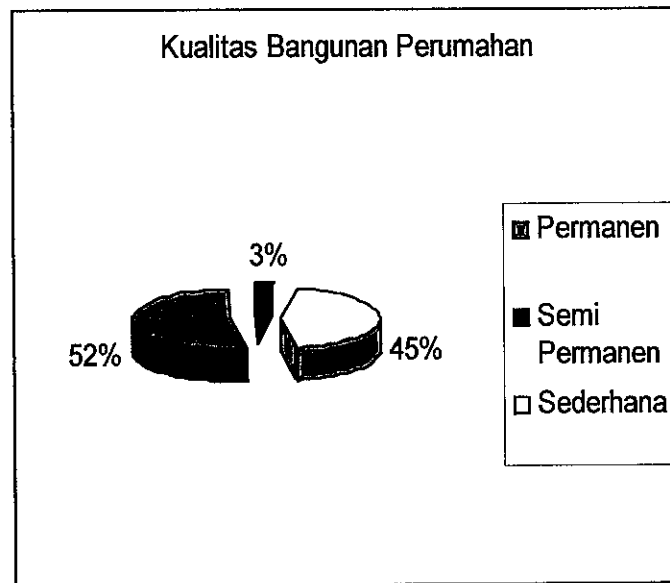
Berdasarkan hasil pengamatan, jangkauan pelayanan listrik ini relatif sudah menjangkau sebagian besar lingkungan permukiman yang ada. Akan tetapi masih terdapat beberapa unit lingkungan yang belum terjangkau listrik, terutama daerah-daerah permukiman baru yang merupakan perkembangan dari lingkungan permukiman yang sudah ada.

3.3.2.4 Perumahan

Berdasarkan data tahun 2003 jumlah penduduk Desa Gunungjati sebesar 2040 dengan 438 KK, maka dapat dikatakan bahwa tingkat hunian rata-rata jumlah jiwa dalam rumah adalah 5 jiwa.

Dilihat dari jumlah dan kualitas bangunan perumahan di Desa Gunungjati pada tahun 2003 dari 387 rumah yang ada Rumah permanen 34 unit,

Rumah Semi Permanen 19 unit dan rumah sederhana 334 unit, dapat dikatakan bahwa sebagian besar rumah masih sangat sederhana, hanya sebagian kecil rumah yang sudah berupa bangunan permanen dan semi permanen.



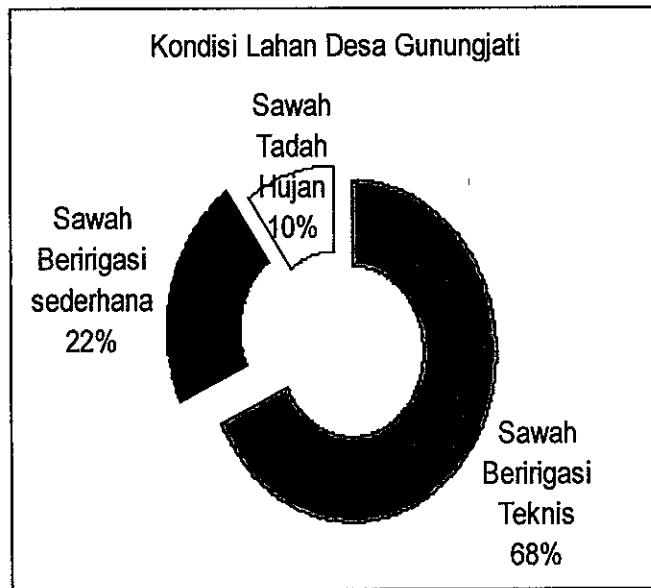
GAMBAR 3.7
GRAFIK KUALITAS BAGUNAN PERUMAHAN

Sumber : Statistik Potensi Desa Kabupaten Tegal, 2003

Dari jumlah penambahan rumah yang diperkirakan bertambah sampai pada tahun 2014 diperkirakan sebanyak 69 rumah, dalam perencanaan sebaiknya direncanakan terlebih dahulu perbaikan perumahan sederhana yang sangat membutuhkan sehingga dapat berfungsi sebagai rumah sehat.

3.3.2.5 Irigasi

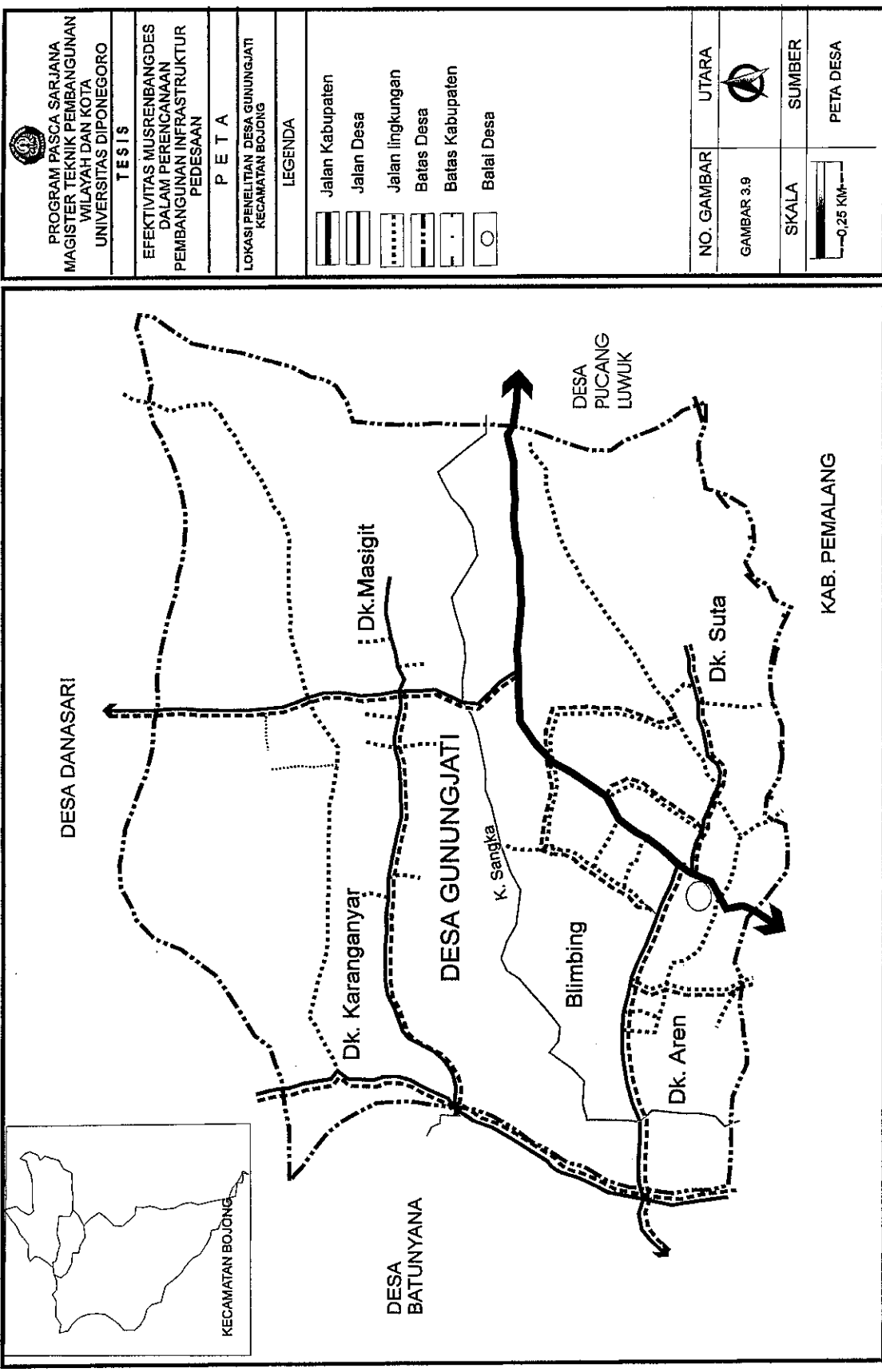
Dalam faktor pengembangan desa kondisi lahan berupa sawah, pekarangan, tegalan/hutan dan perumahan sangat penting karena merupakan sumber pangan bagi masyarakat di wilayahnya selain itu juga sebagai faktor industri yang mendorong tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakatnya.



GAMBAR 3.8
GRAFIK KONDISI LAHAN DESA GUNUNGGATI

Sumber : Statistik Potensi Desa Kabupaten Tegal, 2003

Dengan luas 158.550 ha, 39,5% berupa tanah sawah yaitu seluas 62.5 ha dan dari lahan persawahan yang ada 68% (42,5 ha) sudah beririgasi teknis, 22% (13,75 ha) beririgasi sederhana dan 10% (6,25) merupakan sawah tadah hujan, hal ini dikarenakan wilayah Desa Gunungjati memiliki daerah yang terjal dan berbukit-bukit, sehingga saluran irigasi mengalami kesulitan dalam mengelola alirannya. Sehingga diperlukan pembinaan dan penyuluhan dalam pengelolaannya.



3.3.3 Desa Cerih Kecamatan Jatinegara

Desa Cerih dikelilingi Jalan Kabupaten sebagai Jalur Primer, sudah tersedia angkutan pedesaan sehingga aksesibilitas kawasan ini relatif mudah, pola daerah terbangun (permukiman) yang terbentuk kurang menyatu (*sprawl*) sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan baik air bersih, listrik maupun fasilitas jalan.

Karena lokasinya yang jauh dari pusat kota mengakibatkan tumbuhnya pusat perkonomian di Desa Cerih, tetapi belum ada perencanaan pengembangan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah. Wilayah ini dilewati oleh beberapa sungai baik yang relatif besar maupun sungai-sungai kecil. Sungai-sungai yang cukup besar antara lain Kali Janaka, Kali Gondang, Kali Cerih, Kali Srengseng, Kali Bengkong, Kali Jambu dan Kali Rambut

TABEL III.5
KONDISI KEPENDUDUKAN DAN ORGANISASI DESA CERIH
KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL

No	Kegiatan	Keterangan
1	Klasifikasi Desa	Swasembada
2	Kategori LKMD	kategori 2
3	Jumlah Dusun/Lingkungan	7 Dusun
4	Jumlah RK/RW	2 RK
5	Jumlah RT	18 RT
6	Jumlah Penduduk	5229 jiwa
7	Jumlah Rumah Tangga	949 KK
8	Jumlah Rumah Tangga Pertanian	450 KK

Sumber : Statistik Potensi Desa Kabupaten Tegal, 2003

Desa Cerih mempunyai kemiringan tanah yang bervariasi antar 0% sampai dengan 35%, tinggi dari permukaan laut wilayah ini mempunyai ketinggian 500 – 525 m (dpl).

Sebagian besar tanah merupakan tanah pertanian tadah hujan, hal ini dikarenakan saluran irigasi kurang berfungsi dengan baik, hal ini terlihat dengan tidak terpakainya saluran irigasi secara optimal karena keadannya rusak, sehingga dibutuhkan perbaikan.

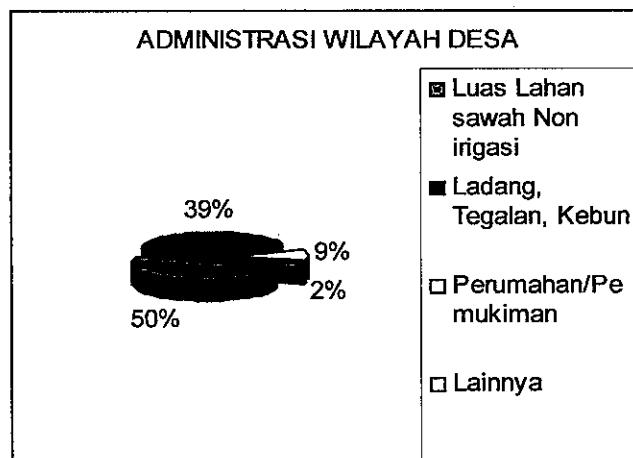
Kondisi topografis wilayah yang berbukit serta jumlah penduduk yang meliputi 7 (tujuh) dusun memerlukan perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan yang lebih komprehensif.

TABEL III.6
ADMINISTRASI WILAYAH DESA CERIH
KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL

No.	Kegiatan	Keterangan (Ha)
1	2	3
1	Luas Desa	295.6
2	Luas lahan Sawah	
	a. Irigasi	-
	b. Non Irigasi	146.4
3	Luas Lahan Bukan Sawah	
	a. Ladang, huma, Tegalan, Kebun	116
	b. Perumahan dan permukiman	28
	c. Lainnya	5.2

Sumber : Statistik Potensi Desa Kabupaten Tegal, 2003

Luas lahan sawah yang non-irigasi seluas 146,4 ha, dan penduduk sebagian besar merupakan rumah tangga petani menunjukkan Desa Cerih merupakan tipe desa pertanian, tetapi kondisi penunjang pertanian masih dirasakan sangat kurang.



GAMBAR 3.10
GRAFIK ADMINISTRASI WILAYAH DESA CERIH

Sumber : Statistik Potensi Desa Kabupaten Tegal, 2003

Luas lahan sawah non-irigasi mencapai 50%, dan tegalan mencapai 39% kalau dilihat bahwa sebagian besar penduduknya merupakan petani maka seharusnya infrastruktur irigasi direncanakan sebagai skala prioritas yang utama.

TABEL III.7
KONDISI SARANA PRASARANA DESA CERIH
KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL

No.	Kegiatan	Keterangan
1	Penerangan Jalan Utama	Ada (PLN)
2	Banyaknya Rumah Tangga Pelanggan Listrik	476 KK
3	Jumlah Rumah	
	a. Rumah Permanen	498 rumah
	b. Rumah tidak Permanen	222 rumah
	c. Rumah Sederhana	204 rumah

Sumber : Statistik Potensi Desa Kabupaten Tegal, 2003

Kondisi perumahan masih banyak yang belum permanen sehingga diperlukan usaha-usaha untuk merencanakan perbaikan dan peningkatan kualitas perumahan, sehingga diharapkan kesehatan masyarakat akan meningkat.

3.3.3.1 Jalan

Rencana pengembangan jaringan jalan dengan melihat kondisi wilayah dan bentuk serta struktur jalan, Desa Cerih memiliki pola jaringan jalan berbentuk rangka daun, dengan jalan utama yang merupakan jalan lokal primer. Dari keadaan jaringan jalan yang ada bila ditinjau secara lokal dapat dikelompokkan dalam 3 kriteria, yaitu:

1. Jaringan jalan Kolektor Primer, yaitu berupa jalur jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Cerih dengan desa-desa di sekelilingnya, yaitu yang menghubungkan Desa Cerih dengan - Desa Sumbarang- Desa Sitail dan Jatinegara – Desa Cerih – Desa Mokaha.
2. Jaringan Jalan Lokal Primer dan Sekunder, adalah jalan kampung di wilayah Desa Cerih yang menghubungkan Desa Cerih dan desa di Sekitarnya.
3. Jaringan jalan lingkungan, yaitu jalan kampung yang berada di Desa Cerih , yaitu yang menghubungkan satu pedukuhan dengan pedukuhan lainnya (RW/RT) ataupun berupa gang masuk kawasan perumahan.

Pengembangan pola dan fungsi jalan yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah nantinya tidak hanya untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian penduduk, akan tetapi juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan wilayahnya. Untuk merealisasikan hal tersebut yaitu menumbuhkan kegiatan perekonomian, prioritas utama adalah pengaturan dan pengembangan jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder yang melalui Desa Cerih dan yang menghubungkan dengan desa-desa disekitarnya, sehingga mampu merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat.

Jaringan jalan yang sudah ada secara umum sudah mampu merangsang kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang cukup kuat pengaruhnya terhadap perkembangan Desa Cerih.

Jaringan jalan yang sudah ada secara umum sudah mampu membangkitkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas jalan baik dimensi maupun perkerasannya sesuai dengan fungsinya.

3.3.3.2 Air Bersih

Kebutuhan akan air bersih penduduk masih tergantung pada penyediaan dari sumber-sumber mata air terdekat dengan cara pemipaan oleh swadaya masyarakat sendiri. Namun demikian untuk sementara masih cukup layak dengan mempertahankan pemanfaatan sumber-sumber air tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan akan air bersih. Dalam pengembangan selanjutnya untuk melayani air bersih perlu pengelolaan dan prioritas daerah-daerah jalan utama dan selebihnya dipertimbangkan pengembangannya.

Permasalahan yang ada adalah pola pembagian yang kurang terkendali dan kecilnya debit mata air yang ada sehingga pola pembagian tidak merata, apalagi pada saat musim kemarau. Namun demikian untuk sementara cakupan pelayanan masih mencukupi.

Untuk rencana pengembangan penyediaan airbersih dengan pengelolaan yang lebih baik, diprioritaskan pada daerah-daerah yang belum terjangkau dan meningkatkan debit dengan jalan mencari sumber-sumber mata air baru serta pemeliharaan sarana prasarana perpipaan yang sudah ada. Perencanaan jaringan

air bersih di Desa Cerih hendaknya memaki pola pengembangan sistem operasionalnya sederhana dan murah.

3.3.3.3 Listrik

Analisis rencana kebutuhan penyediaan listrik meliputi volume kebutuhan pemakaian dan pengembangan pendistribusian jaringan, rencana jaringan pengembangan listrik diarahkan untuk menentukan prioritas sebaran lokasi di lokasi wilayah perencanaan yang memungkinkan diadakan penyambungan-penyambungan baru, terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi penduduk yang sampai saat ini belum terjangkau fasilitas listrik.

Berdasarkan data yang ada , pada tahun 2004 jumlah rumah yang ada di Desa Cerih sebanyak 924 rumah, dari jumlah rumah tersebut yang sudah menikmati pelayanan listrik baru sebanyak 51% yaitu sebanyak 476 rumah. Penyediaan kebutuhan listrik untuk rumah tangga yang belum/tidak terjangkau listrik dan proyeksi pertambahan jumlah rumah baru diharapkan secara bertahap dapat terlayani, sehingga sebagian besar masyarakat/rumah tangga dapat menikmati pelayanan listrik.

Dari hasil pengamatan dan data yang ada, jangkauan pelayanan listrik sudah menjangkau sebagian besar lingkungan permukiman yang ada. Akan tetapi masih terdapat beberapa permukiman yang belum terjangkau jaringan listrik, terutama permukiman baru yang merupakan perkembangan dari permukiman yang sudah ada.

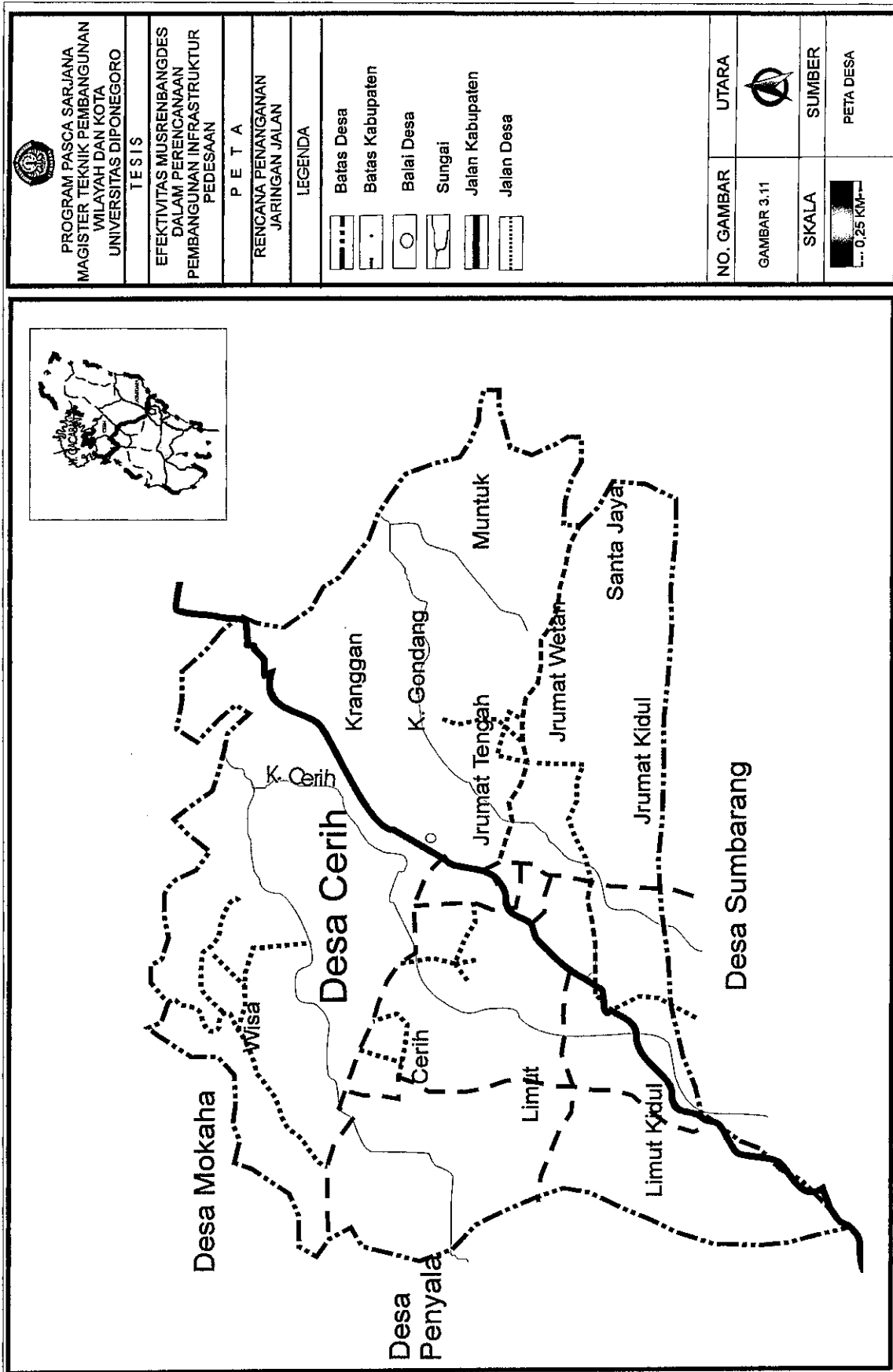
3.3.3.4 Perumahan

Berdasarkan data pada tahun 2004 jumlah penduduk sebesar 5229 jiwa dengan jumlah rumah 924, maka dapat dikatakan tingkat hunian rata-rata jumlah jiwa dalam 1 rumah adalah 5 jiwa, kondisi perumahan dari hasil pengamatan dan data-data yang ada menunjukkan bahwa 54% (498 rumah) sudah merupakan rumah permanen, 24% (222 rumah) semi permanen dan hanya 22% (204 rumah) yang kondisinya sederhana.

Dengan melihat kondisi tersebut sehingga perlu direncanakan perbaikan perumahan yang masih masuk dalam kategori rumah sederhana melalui rencana program perbaikan perumahan.

3.3.3.5 Irigasi

Dari pengamatan di lapangan dan data yang ada, kondisi irigasi di Desa Cerih sudah tidak terpakai lagi, hal ini berkaitan dengan tingkat kerusakan saluran irigasi sudah sangat rusak, sehingga 146.369 ha sawah (100%) hanya merupakan sawah tadah hujan, dari data yang sama juga menunjukkan bahwa mata pencaharian pokok Desa Cerih adalah petani. Sehingga perlu direncanakan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi baru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan mengoptimalkan kondisi tanah sawah.



3.3.4 Desa Bojongsana Kecamatan Suradadi

Desa Bojongsana terletak di Jalan Pantura (Pantai Utara Jawa), mempunyai panjang pantai 600 m, sehingga penduduk sebagian bermatapencaharian sebagai nelayan, di sebelah selatan jalan pantura Desa Bojongsana memiliki lahan persawahan yang luas, sehingga sebagian masyarakat juga bermatapencaharian sebagai petani.

TABEL III.8
KONDISI KEPENDUDUKAN DAN ORGANISASI DESA BOJONGSANA
KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL

No	Kegiatan	Keterangan
1	Klasifikasi Desa	Swasembada
2	Kategori LKMD	kategori 1
3	Jumlah Dusun/Lingkungan	3 Dusun
4	Jumlah RK/RW	3 RW
5	Jumlah RT	10 RT
6	Jumlah Penduduk	4835 Jiwa
7	Jumlah Rumah Tangga	940 KK
8	Jumlah Rumah Tangga Pertanian	750 KK

Sumber : Statistik Potensi Desa Kabupaten Tegal, 2003

Sebagian penduduk bermata pencaharian petani, fasilitas sarana prasarana irigasi bagi pertanian sudah mencukupi, hal ini terlihat bahwa 440 ha sawah sudah teraliri irigasi, sehingga masyarakat benar-benar terlayani dengan infrastruktur pedesaan di bidang irigasi.

Kondisi topografi Desa Bojongsana merupakan daerah pantai, hal ini terlihat dari letak desa yang langsung menghadap ke Laut Jawa, sebagian besar penduduk bermatapencaharian petani, wilayah ini mempunyai ketinggian 0-10 m

(dpl). Kondisi tanah dibagi menjadi dua kategori yaitu disebelah utara jalan utama merupakan tanah pasir karena merupakan wilayah pantai, dan daerah di sebelah selatan jalan utama merupakan daerah pertanian, sebagian besar penduduk Desa Bojongsana bermukim di sepanjang jalur Pantura, dan tanah persawahan memanjang dari sebelah selatan jalan ke arah selatan.

Kondisi lahan pertanian merupakan sawah tadah beririgasi teknis, tetapi pada kenyataannya, distribusi air masih sangat kurang, hal ini akibat kondisi saluran irigasi banyak yang sudah tidak berfungsi juga pasokan air yang semakin berkurang.

TABEL III.9
KONDISI SARANA PRASARANA DESA BOJONGSANA
KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL

No.	Kegiatan	Keterangan
1	Penerangan Jalan Utama	Ada
2	Banyaknya Rumah Tangga Pelanggan Listrik	305
2	Jumlah Rumah	
	a. Jumlah Rumah Permanen	862 rumah
	b. Jumlah Rumah tidak Permanen	90 rumah

Sumber : Statistik Potensi Desa Kabupaten Tegal, 2003

Kondisi perumahan sudah cukup baik, fasilitas pendidikan sudah cukup memenuhi, tinggal kondisi listrik yang belum tercukupi dan pemenuhan akan air bersih masih sangat kurang.

Dari keseluruhan luas wilayah 82% merupakan persawahan, diharapkan kondisi irigasinya dapat menunjang kebutuhan sesuai dengan luas lahan persawahan yang ada.

TABEL III.10
ADMINISTRASI WILAYAH DESA BOJONGSANA
KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL

No.	Kegiatan	Keterangan (ha)
1	Luas Desa	535
2	Luas lahan Sawah	
	Irigasi	440
3	Luas Lahan Bukan Sawah	
	a. Ladang, huma, Tegalan, Kebun	0.7
	b. Perumahan dan permukiman	82
	c. Bangunan lainnya	1.1
	d. Lainnya	11.2

Sumber : Statistik Potensi Desa Kabupaten Tegal, 2003

3.3.4.1 Jalan

Kondisi wilayah dan bentuk serta struktur jalan, Desa Bojongsana memiliki pola jaringan jalan berbentuk linear, yaitu searah dengan dengan jalan utama yang merupakan jalan lokal primer. Dari keadaan jaringan jalan yang ada bila ditinjau secara lokal dapat dikelompokkan dalam 3 kriteria, yaitu:

1. Jaringan jalan primer, yaitu berupa jalur jalan Propinsi yaitu sebagai Jalan Pantai utara Jawa (Pantura).
2. Jaringan jalan lokal sekunder, adalah jalan desa yang menghubungkan antara permukiman nelayan dan permukiman penduduk yang berada di selatan jalan Pantura.
3. Jaringan jalan lingkungan, yaitu jalan kampung yang berada di Desa Bojongsana, yaitu yang menghubungkan RW/RT ataupun berupa gang masuk kawasan perumahan.

Dari hasil tinjauan ke lapangan kondisi jalan desa yang diaspal baru mencapai 3 (tiga) km, sedangkan lainnya berupa jalan makadam dan jalan tanah.

Pengembangan pola dan fungsi jalan yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah nantinya tidak hanya untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian penduduk, akan tetapi juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan wilayahnya.

3.3.4.2 Air Bersih

Hasil pengamatan dilapangan sera berdasarkan data-data yang ada di Desa Bojongsana sampai saat ini belum tersedia pengadaan air bersih yang dikelola secara teratur dari PDAM, untuk kebutuhan MCK masyarakat memanfaatkan sumber air dari sumur, tetapi untuk kebutuhan air minum masyarakat membeli dari penjual-penjual yang ada.

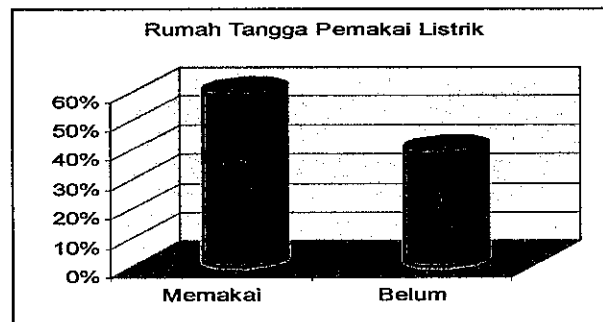
Sistem perpipaan hanya menjangkau sebagian kecil wilayah Desa Bojongsana yaitu pada daerah-daerah di tepi jalan utama (Pantura), sedangkan sebagian besar masyarakat lainnya memenuhi kebutuhan air bersih melalui sumber air dan sumur gali

Untuk rencana pengembangan penyediaan airbersih dengan pengelolaan yang lebih baik, diharapkan campur tangan pemerintah daerah untuk memprioritaskan pengelolaan air bersih pada daerah-daerah yang belum terjangkau PDAM dan mencari sumber-sumber mata air baru, sehingga masyarakat bisa menikmati air bersih secara layak.

3.3.4.3 Listrik

Pelayanan listrik di Desa Bojongsana sudah menjangkau ke seluruh perumahan yang ada, permasalahan yang ada adalah bukan kepada penyediaan jaringan ataupun penambahan kapasitas tetapi pada upaya meningkatkan

pendapatan masyarakat agar mampu mengkonsumsi (berlangganan) listrik dalam upaya menunjang kapasitas produksi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup. Hal tersebut dilihat dengan pengamatan dan data yang ada dari 752 rumah yang ada hanya 40% rumah yang mengkonsumsi listrik atau baru 305 rumah.



GAMBAR 3.12
GRAFIK RUMAH TANGGA PEMAKAI LISTRIK

Sumber : Data Dianalisis, 2005

Dari hasil pengamatan dan data yang ada, jangkauan pelayanan listrik sudah menjangkau sebagian besar lingkungan permukiman yang ada. Akan tetapi masih terdapat beberapa permukiman yang belum terjangkau jaringan listrik, terutama permukiman baru yang merupakan perkembangan dari permukiman yang sudah ada. Kondisi jaringan listrik yang ada di Desa Bojongsana dapat dilihat pada berikut ini:

3.3.4.4 Perumahan

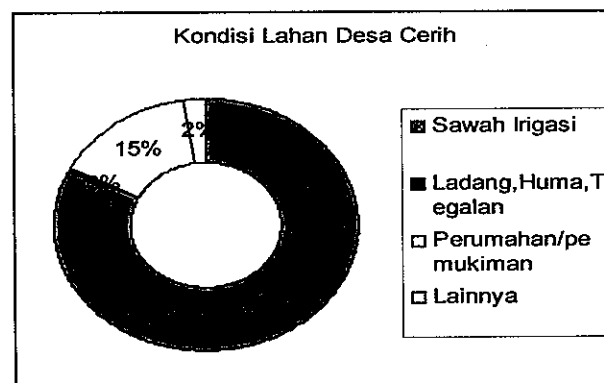
Permukiman di Desa Bojongsana secara morfologi tersebar secara berkelompok dan tumbuh secara inkremental sepanjang jalur-jalur aksesibilitas utama. Sehingga pertumbuhannya membentuk pola linear mengikuti pola jaringan jalan. Dari 752 rumah hanya 12% (90 rumah) berkonstruksi Non Permanen, dapat

dikatakan bahwa semua rumah sudah tergolong mempunyai kondisi yang baik dan layak.

Karakteristik permukiman di kawasan ini dapat dibagi menjadi permukiman desa pertanian, permukiman nelayan dan permukiman perkotaan. Sebagian besar permukiman merupakan permukiman desa pertanian, sedangkan permukiman nelayan hanya pada sebagian kecil kawasan, yaitu disekitar lokasi pengelolaan sumber daya kelautan (perikanan).

Secara umum kondisi perumahan dan permukiman di desa Bojongsana sebagai desa pesisir menunjukkan hunian lingkungan yang relatif cukup baik, kecuali pada beberapa lokasi yang kurang didukung ketersediaan sarana prasarna sanitasi.

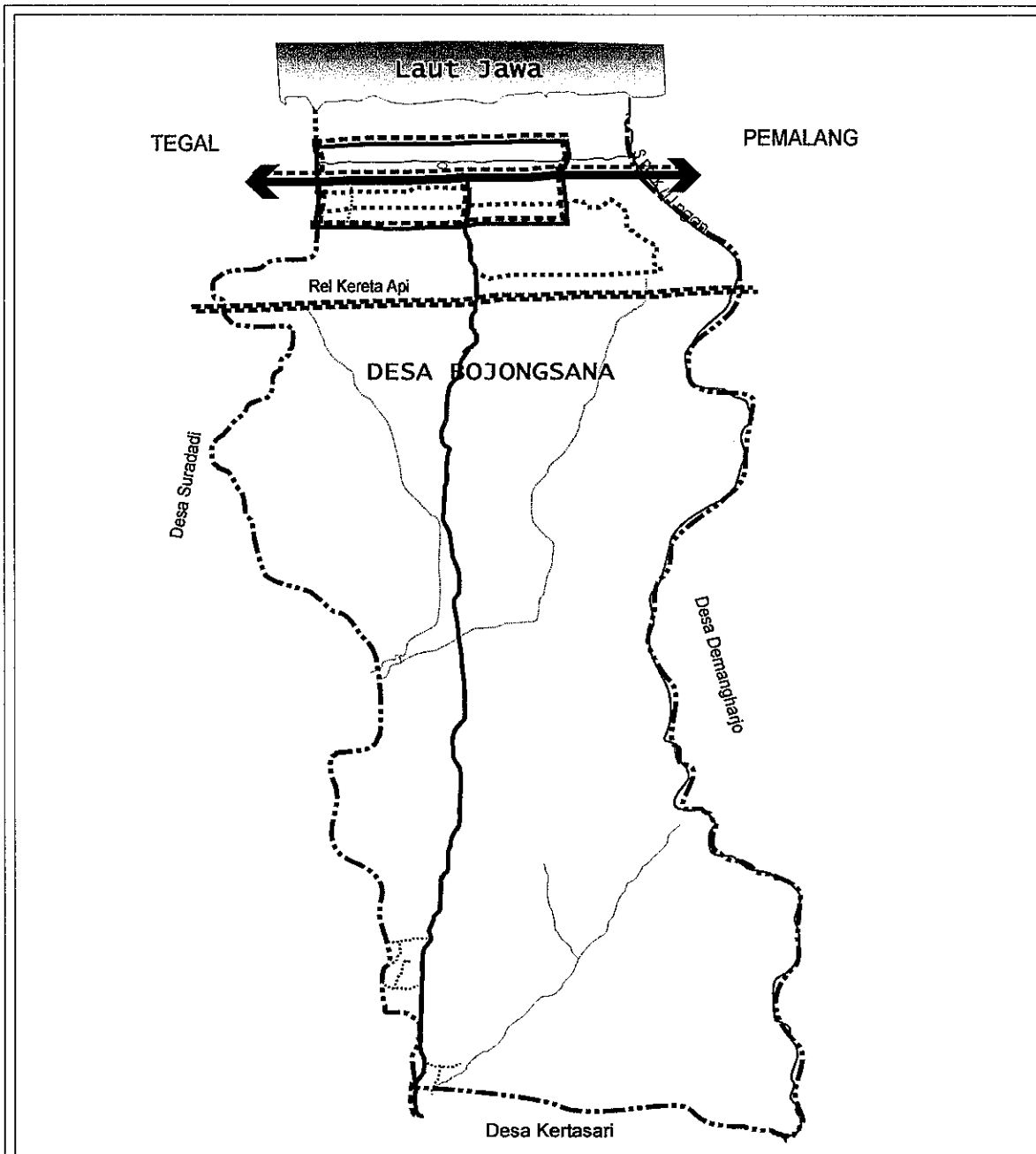
3.3.4.5 Irigasi



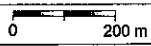









GAMBAR 3.13
GRAFIK KONDISI LAHAN DESA CERIH

Sumber : Data Dianalisis, 2005

Dengan 83% sawah tercukupinya kebutuhan jaringan irigasinya diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak, kegiatan social ekonomi meningkat, sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat.



 PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2005	P E T A LOKASI PENELITIAN DESA BOJONGSANA KECAMATAN SURADADI		UTARA 
	LEGENDA		SKALA 
TESIS EFEKTIFITAS MUSRENBANGDES DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	 Jalan Propinsi	 Sungai	 Batas Desa
	 Jalan Desa	 Rel Kereta Api	 Saluran Irigasi
	 Jalan Lingkungan		NO. GAMBAR Gambar 3.14.
			SUMBER Hasil Analisis

3.4 Pelaksanaan Musrenbangdes

Peserta Musrenbangdes meliputi semua *stakeholder* yang berada di Desa, pemberdayaan semua komponen yang ada dalam masyarakat dimaksudkan akan mewujudkan perencanaan partisipatif yang baik dan hasil keputusan mendapat legalitas dari warga masyarakat.

3.4.1 Desa Kalibakung

Dari data yang ada partisipasi masyarakat cukup baik, hal ini ditandai dengan kehadiran seluruh peserta Musrenbangdes dari kapasitas 40 peserta, dari data-data yang ada peserta yang menghadiri mencapai 46 orang, hal ini disebabkan dari pihak RT yang sedianya diwakilkan kepada Ketua RT rata-rata membawa pendamping, demikian juga dengan organisasi masyarakat, ataupun lembaga-lembaga kependidikan yang ada di desa, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik dalam ikut serta merencanakan pembangunan desanya.

TABEL III.11
RENCANA KEGIATAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN
(JALAN, AIR BERSIH DAN IRIGASI)
DESA KALIBAKUNG MELALUI MUSRENBANGDES

Desa	No.	Jalan	Air bersih	Irigasi
1	2	3	4	5
Kalibakung	1	Peningkatan dari jalan tanah ke jalan macadam dari depan bailai desa ke Rt/w 06/02	Perbaiki saluran air bersih dari sumber mata air	Pembangunan dan perbaikan saluran irigasi
	2	Pengaspalan Jalan Desa Bukateja 3 m x 1.500 m	Pengadaan pompa untuk pengadaan air bersih	
	3	Pengerasan jalan lingkungan perumahan di Rt/w 02/03 3 m x 550 m		
	4	Pengaspalan Jalan lingkungan Rt/w 01/02 2 m x 500 m		

	2	3	4	5
	5	Pengaspalan jalan penghubung jalan Kabupaten dan jalan lingkungan di Rt/4 04/01 3 m x 250 m		
	6	Pengaspalan jalan di lingkungan perumahan 3 m x 200 m Rt/w 01/03		

Sumber : Data Musrenbangdes Desa Kalibakung dan Hasil Analisis, 2005

Dari dokumen yang ada usulan kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan meliputi Jalan, Air Bersih dan Irigasi untuk usulan kegiatan Listrik dan Perumahan tidak terdapat dalam usulan, hal itu disebabkan karena jaringan listrik sudah menjangkau keseluruhan wilayah desa, dan untuk perumahan sudah relatif baik dan memenuhi standar kesehatan yang ditentukan.

Dari berbagai usulan yang diajukan sebagian besar mengharapkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, hanya sebagian kecil yang memperhatikan permasalahan air bersih dan irigasi, karena dianggap bahwa kewenangannya ada di Kabupaten dan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun jaringannya

3.4.2 Desa Gunungjati

Dari hasil wawancara dengan perangkat desa dan peserta Musrenbangdes tingkat kehadiran hanya 85% dari 30 peserta yang diundang, hal ini disebabkan sebagian besar warga bekerja di kota, dan kembali ke desa rata-rata 1 (satu) sekali setiap bulannya, sedangkan yang tinggal di desa kebanyakan hanya orang tua dan anak-anak, sehingga dalam pelaksanaan musrenbangdes kurang mendapat perhatian dari warga.

Usulan kegiatan masyarakat Desa Gunungjati kebanyakan mengarah kepada perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, untuk kebutuhan

infrastruktur lainnya kurang diperhatikan. Pengembangan jaringan Air bersih dengan memanfaatkan sumber daya yang ada hanya meliputi jalur utama dan dekat dengan sumber mata air, tetapi untuk dukuh yang jauh dari pusat mata air disamping perlu pembiayaan yang tidak sedikit juga alasan teknis operasional yang belum mampu untuk dilaksanakan.

TABEL III.12
RENCANA KEGIATAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN
(JALAN DAN AIR BERSIH)
DESA GUNUNGJATI MELALUI MUSRENBANGDES

Desa	No.	Jalan	Air bersih
Gunungjati	1	Peningkatan jalan lingkungan di Dukuh Masigit sepanjang 1,5 m x 200 m	Pengembangan jaringan ke dukuh Masigit dan Dukuh Karanganyar
	2	Pengerasan jalan tanah di Dukuh Karanganyar 2 m x 250m	
	3	Pengaspalan jalan desa menuju Desa Danasari 3 m x 1.000 m	
	4	Peningkatan jalan lingkungan di Dukuh Aren dari Depan Masjid 2 m x 500 m	
	5	Pengerasan jalan tanah di Dukuh Suta 2 m x 250 m	

Sumber : Data Musrenbangdes Desa Gunungjati dan Hasil Analisis, 2005

Sebagian besar masyarakat mengusulkan jalan lingkungan yang melewati dan merupakan akses mereka sehari-hari, dilihat dari segi ekonomi memang tidak menguntungkan, tetapi dilihat dari kebutuhan masyarakat desa maka jalan lingkungan sangat diperlukan dalam aktifitas mereka sehari-hari.

TABEL III.13
RENCANA KEGIATAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN
(LISTRIK, PERUMAHAN DAN IRIGASI)
DESA GUNUNGJATI MELALUI MUSRENBANGDES

Desa	No.	Listrik	Perumahan	Irigasi
Gunungjati	1	Pengembangan jaringan listrik ke Dukuh Masigit dan Dukuh Suta		Perbaikan saluran irigasi

Sumber : Data Musrenbangdes Desa Gunungjati dan Hasil Analisis, 2005

3.4.3 Desa Cerih

Sebagian besar penduduk bermatapencaharian sebagai petani, dan jarang penduduk yang bekerja di luar kota, dari 35 peserta yang diundang hampir keseluruhan hadir.

TABEL III.14
RENCANA KEGIATAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN
(JALAN DAN AIR BERSIH)
DESA CERI MELALUI MUSRENBANGDES

Desa	No.	Jalan	Air bersih
Cerih	1	Pengerasan jalan lingkungan di dukuh wisa 2 m x 1.150 m	Pengembangan jaringan air bersih perpipaan
	2	Pengerasan jalan lingkungan di dukuh Jrumat Tengah 2 m x 450 m	
	3	Pengaspalan jalan lingkungan dari dukuh cerih ke Dukuh Limut kidul 2 m x 1.500 m	
	4	Pengaspalan jalan lingkungan dari Dukuh Jrumat Tengah ke Dukuh Santajaya 2 m x 850 m	
	5	Pengaspalan jalan Desa ke Desa Mokaha 3 m x 2.000 m	

Sumber : Data Musrenbangdes Desa Cerih dan Hasil Analisis, 2005

Letak Desa Cerih yang jauh dari pusat kota memberikan keuntungan bagi Desa cerih untuk bisa berkembang menjadi pusat fasilitas pelayanan jasa ekonomi, kesehatan menjadi simpul kawasan dengan desa-desa di sekitarnya. Usulan kegiatan masyarakat juga mayoritas kearah perbaikan dan pembangunan fasilitas jalan, untuk air bersih diusulkan untuk pengembangan jaringan , kondisi irigasi yang kurang memadai sehingga jaringan yang ada perlu untuk diperbaik, diharapkan dengan jaringan irigasi yang baik pendapatan masyarakat akan meningkat. Untuk fasilitas air bersih di Desa cerih mempunyai banyak sumber mata air tinggal memperbaiki manajemen pengelolaan perpipaan dan bantuan dana untuk memparbaiki dan mengembangkan jaringan perpipaan.

TABEL III.15
RENCANA KEGIATAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN
(LISTRIK, PERUMAHAN DAN IRIGASI)
DESA CERIH MELALUI MUSRENBANGDES

Desa	No.	Listrik	Perumahan	Irigasi
Cerih	1	Pengembangan jaringan listrik ke Dukuh Santa jaya		Perbaikan saluran irigasi

Sumber : Data Musrenbangdes Desa Cerih dan Hasil Analisis, 2005

Jaringan listrik sudah menjangkau keseluruhan pemukiman penduduk, terutama di pedukuhan-pedukuhan, hanya pemukiman dan perumahan baru yang belum terjangkau, tinggal menambah jaringannya saja.

Saluran irigasi yang ada di Desa Cerih sudah tidak berfungsi, berbagai tinjauan lapangan, monitoring dilakukan tetapi realisasi pelaksanaan perbaikan dan pembangunan jaringan baru sampai sekarang belum dilaksanakan.

3.4.4 Desa Bojongsana

Masyarakat pantai di tepi jalur pantura mempunyai mobilitas tinggi, walaupun demikian perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desanya masih cukup tinggi.

Dengan melihat letak desa yang linier memanjang searah dengan jalur Pantura membawa keuntungan kepada Desa Bojongsana, karena fasilitas transportasi tidak mengalami kesulitan, walaupun demikian usulan kegiatan dalam Musrenbangdes lebih banyak mengarah kearah perbaikan dan pembangunan jalan. Di kawasan pesisir desa Bojongsana kualitas perumahan dan kebutuhan air bersih sangat dibutuhkan, tetapi untuk perbaikan dan pemugaran perumahan belum terlihat dalam hasil Musrenbangdes.

TABEL III.16
RENCANA KEGIATAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN
(JALAN , AIR BERSIH DAN IRIGASI)
DESA BOJONGSANA MELALUI MUSRENBANGDES

Desa	No.	Jalan	Air bersih	Irigasi
Bojongsana	1	Pengaspalan jalan desa 3 m x 2.000 m	Penyediaan tanki Air Bersih	Perbaikan saluran irigasi
	2	Pengerasan jalan lingkungan di Rt/w 02/03	Pembangunan saluran drainase perumahan di pesisir pantai 0,5 m x 100 m	
	3	Pengaspalan jalan lingkungan Rt/w 01/01 sepanjang 2 m x 250 m		

Sumber : Data Musrenbangdes Desa Bojongsana dan Hasil Analisis, 2005

Partitipasi masyarakat dalam perencanaan sudah berlangsung dalam rembug desa, pertemuan informal, ataupun secara swadaya dalam lingkup masyarakat yang lebih kecil, dana yang digunakan pun bermacam-macam tergantung dari kepentingan dan kegunaannya, dengan dana swadaya maupun bantuan dari pemerintah.

Dengan melihat ke empat lokasi tersebut diatas dengan kriteria lokasi wilayah yang berbeda-beda yaitu wilayah bertopografi pantai, rendah-menengah dan tinggi serta mempunyai 4 (empat) karakteristik bentuk desa, diharapkan akan dihasilkan suatu hasil penelitian perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui partisipasi masyarakat yang komprehensif berdasarkan analisis potensi wilayah pedesaan, dengan membandingkan tingkat partisipasi yang ada dan hasil analisis kebutuhan infrastruktur pedesaan sesuai dengan kajian potensi wilayah akan dihasilkan suatu kerangka sebagai arahan, acuan dan koridor usulan kegiatan musrenbangdes dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan wilayahnya.

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS MUSRENBANGDES DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DI KABUPATEN TEGAL

Setiap desa memiliki *geographical setting* dan *human effort*-nya masing-masing yang berbeda-beda (Daldjoeni, 1998), dalam rangka mendekati masyarakat dengan kebutuhan dan keinginannya, maka masyarakat harus diikutsertakan dalam perencanaan pembangunan, seperti yang diutarakan oleh (Grigg, 2000), bahwa partisipasi masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang memandang masyarakat dalam konteks dinamis yang mampu memobilisasi sumber daya sesuai dengan kepentingan, kemampuan dan aspirasi yang dimiliki, baik secara individu maupun komunal (Hall, 1986).

Dalam rangka menjembatani antara sumber-sumber daya diperlukan sistem pendukung yaitu sistem infrastruktur, dimana sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 2000).

Perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks tadi, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya yang lainnya (Jensen, 1995).

Dalam bab ini akan dibahas efektivitas Musrenbangdes melalui analisis kondisi geografis di lokasi penelitian, analisis perencanaan infrastruktur pedesaan

berdasarkan kondisi geografis dan potensi wilayah dan analisis proses Musrenbangdes kemudian dikomparasikan dan hasil perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes diukur efektivitasnya melalui indikator-indikator efektivitas berdasarkan kondisi dan potensi wilayah, dan kemudian dijadikan sebagai arahan (guidance) dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan dan perbaikan proses Musrenbangdes.

4.1 Analisis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

4.1.1 Analisis Unsur Geografis Desa

Unsur-unsur geografis desa ikut menentukan persebaran/perkembangan suatu desa, selain itu juga terdapat tiga pilar penting yang berperan dalam pengembangan desa yaitu sumber daya alam yaitu: tanah, tanaman, hewan, sumber daya air dan sumber daya manusia yaitu: warga desa serta kondisi lingkungan yaitu: tata kehidupan desa (Bintarto, 1998).

Dari hasil survey, empat unsur geografis desa yaitu lokasi, tanah dan iklim semuanya berperan cukup penting, tetapi unsur lokasi yang paling menentukan perkembangan wilayah pedesaan, karena berhubungan dengan letak fisik suatu wilayah sehingga berpengaruh terhadap kebutuhan infrastruktur sesuai dengan kondisi dan potensi pengembangan yang akan dilaksanakan. Iklim dan kondisi tanah juga membawa pengaruh terhadap kelangsungan produktifitas terutama di bidang pertanian sehingga berkaitan dengan pengembangan jaringan irigasi, walaupun tidak berhubungan dengan kebutuhan infrastruktur secara langsung, tetapi mendukung rencana pengembangannya. Letak desa juga ikut menentukan kondisi dan potensi lingkungan eksisting yang ada, sehingga turut

berperan terhadap optimalisasi sumber daya ataupun pengembangan potensi secara optimal sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

Kondisi-kondisi tersebut dapat terlihat di 4 (empat) desa yang menjadi lokasi penelitian yaitu Desa Kalibakung kecamatan Balapulang, Desa Gunungjati Kecamatan Bojong, Desa Cerih Kecamatan Jatinegara dan Desa Bojongsana Kecamatan Suradadi.

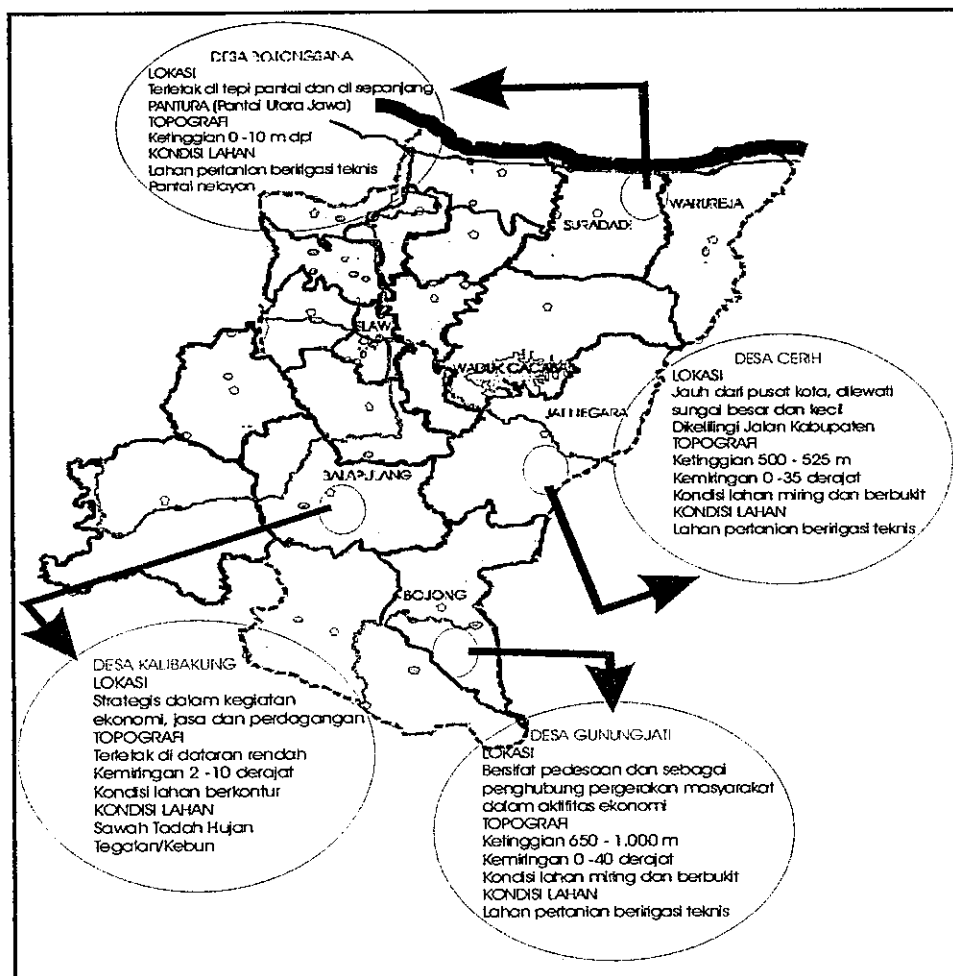
Dari semua analisis tersebut dihasilkan kondisi eksisting wilayah desa dan potensi wilayahnya, data yang ada serta pengamatan dilapangan maka dapat diketahui kondisi geografis desa tersebut seperti terdapat pada Tabel IV.1 dibawah ini:

**TABEL IV.1
LETAK GEOGRAFIS DESA**

Desa	Unsur Geografis Desa		
	Lokasi	Klim (topografi)	Tanah (kondisi)
Kalibakung	Strategis dalam kegiatan ekonomi, jasa dan perdagangan. Penghubung antara jalur utama kecamatan Balapulang dan Kecamatan Lebaksiu	Terletak di wilayah dataran rendah. Kemiringan 2-10 Kondisi lahan berkontur	Tegalan/kebun. Sawah Tadah Hujan
Gunungjati	Sangat bersifat pedesaan dan sebagai penghubung pergerakan masyarakat dalam aktifitas ekonomi. Jauh dari pusat aktifitas ekonomi dan jasa, Berbatasan dengan Kabupaten Pematang	Wilayah miring dan merupakan perbukitan Kemiringan 0%- 40% Ketinggian 650 m – 1.000 m dpl	Lahan pertanian beririgasi teknis
Cerih	Dikelilingi Jalan Kabupaten sebagai Jalur Primer dan lokasinya yang jauh dari pusat kota Dilewati oleh beberapa sungai baik yang relatif besar maupun sungai-sungai kecil. Simpul kegiatan dengan daerah sekitar	Kemiringan tanah 0 %- 35 % ketinggian 500 – 525 m (dpl).	Tanah pertanian Tadah hujan
Bojongsana	Terletak di Jalan Pantura (Pantai Utara Jawa) Berbatasan dengan Laut Jawa	Daerah : pantai Letak Desa Berhadapan dengan pantai Ketinggian 0-10 m (dpl).	Tanah pasir wilayah pantai, dan tanah pertanian beririgasi teknis

Sumber: Hasil Analisis, 2005

Dari Tabel IV.1 di atas dapat dijelaskan bahwa, dari keempat desa mempunyai kondisi geografis dan karakteristik wilayah yang berbeda-beda, hal tersebut dapat dilihat dari lokasi, iklim, tanah dan letak desa yang berbeda-beda. Masing-masing desa mempunyai perbedaan yang mendasar, dengan melihat perbedaan tersebut kita dapat melihat perencanaan infrastruktur pedesaan sesuai dengan karakteristik wilayah, lebih jelasnya gambaran tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini:



GAMBAR 4.1.
KONDISI DAN LETAK GEOGRAFIS LOKASI PENELITIAN

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Letak Desa Cerih, Desa Gunungjati dan Desa Kalibakung relatif dekat karena hanya berbeda kecamatan walaupun secara karakteristik kondisi dan potensi wilayahnya berbeda, hanya Desa Bojongsana yang agak jauh karena terletak di jalur pantura dan tepi Laut Jawa.

Dari hasil analisis terhadap lokasi, dihasilkan potensi wilayah yang berhubungan dengan orbitasi wilayah dengan kawasan di sekelilingnya sehingga bisa dilihat fungsi, peran dan posisi strategis desa tersebut untuk dikembangkan. Kondisi tanah dan Iklim berpengaruh terhadap mata pencaharian dan corak hidup serta adat istiadat masyarakatnya.

4.1.2 Analisis Bentuk dan Pola Desa

Dari hasil analisis geografis desa dapat dikategorikan masing-masing desa sesuai dengan bentuk desanya adalah sebagai berikut:

**TABEL IV.2
BENTUK DAN POLA DESA**

Desa	Bentuk dan Pola Desa			
	Bentuk menyusur pantai	Bentuk yang terpusat	Bentuk linier di dataran rendah	Bentuk mengelilingi fasilitas
Kalibakung	X	X	√	√
Gunungjati	X	√	X	√
Cerih	X	√	X	X
Bojongsana	√	X	√	X

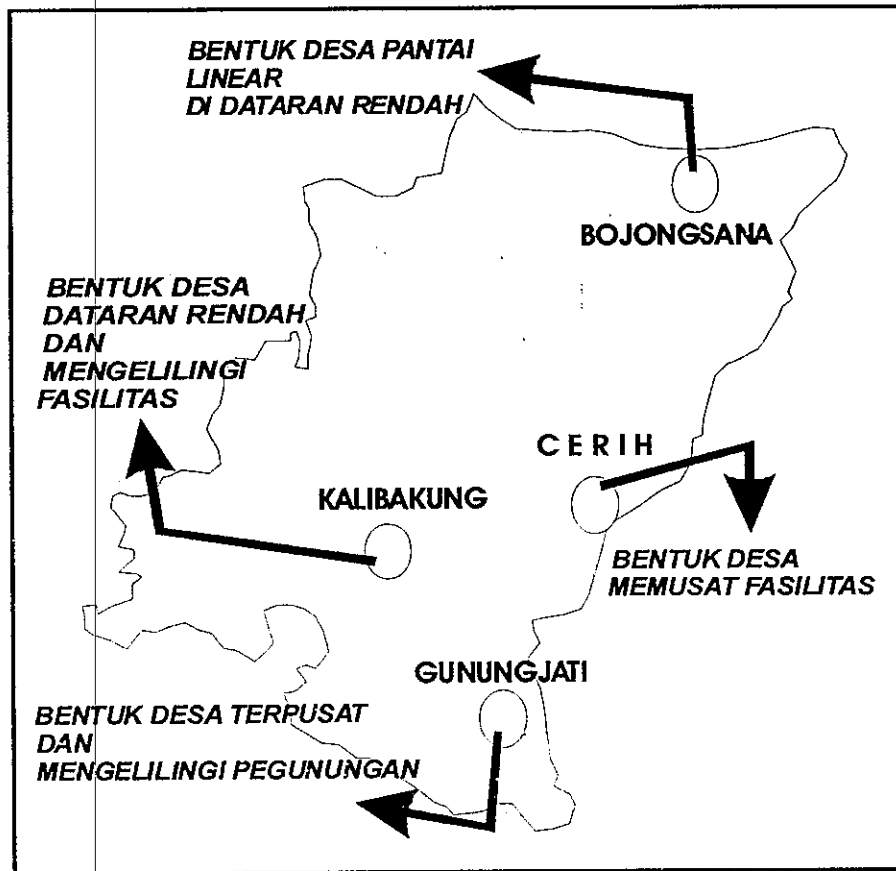
Sumber: Hasil Analisis, 2005

Dari kriteria bentuk dan pola desa yang ada, keempat desa di lokasi penelitian dapat dikategorikan menjadi 4 bentuk desa, walaupun kriteria-kriteria yang ada kurang mencukupi, tetapi melihat kondisi dan potensi yang ada keempat desa tersebut termasuk kedalam kategori masing-masing bentuk dan pola desa yang ada.

Dari Tabel IV.2 dapat dijelaskan, Desa Kalibakung termasuk bentuk desa yang linear di dataran rendah dan mengelilingi fasilitas hal ini berkaitan dengan letak desa yang strategis sebagai penghubung Kecamatan Bojong dan Kecamatan Balapulang, Desa Gunungjati karena terletak didataran tinggi dan secara topografis berbukit-bukit maka termasuk kategori Bentuk yang terpusat dan mengelilingi fasilitas untuk Desa Cerih karena letaknya yang jauh dari pusat-pusat pelayanan sehingga bentuknya memusat fasilitas dan Desa Bojongsana masuk kategori desa pantai linier didataran rendah

Dengan melihat lokasi, tanah yang ada (eksisting) di desa lokasi penelitian serta potensi pengembangan sumber daya yang ada, maka bentuk dan pola desa sangat beragam tergantung dengan kondisi geografis wilayah.

Kesimpulannya bahwa setiap desa memiliki *geographical setting* dan *human effort*-nya masing-masing yang berbeda-beda (Bintarto, 1998). Hal tersebut dipengaruhi oleh unsur-unsur geografis wilayah yang ditempati. Dari penjelasan berdasarkan data-data tersebut maka, bentuk desa di lokasi penelitian secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:



GAMBAR 4.2
BENTUK DAN POLA DESA

Sumber : Hasil Analisis, 2005

4.1.3 Analisis Kebutuhan Jenis Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan Kondisi wilayah

Kebutuhan pokok masyarakat di pedesaan pada khususnya dapat dibedakan menjadi 2 kelompok. Pertama, meliputi kebutuhan akan kecukupan tingkat rumah-rumah. Kedua, yang meliputi kebutuhan berupa sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat dalam makna luas, seperti: air minum, kesehatan, pendidikan, sanitasi lingkungan, angkutan umum (Daldjoeni, 1998).

Dalam tipologi dan klasifikasi tingkat perkembangan desa yang meliputi empat bagian, pada bagian keempat yaitu faktor pengembangan desa terdapat faktor tata ruang yang didalamnya membahas mengenai Prasarana dan Sarana Desa (Infrastruktur Desa) yang telah ada, dan variable didalamnya diantaranya Pelistrikan, Penyediaan Air Bersih, Perumahan Sehat Perhubungan an Komunikasi (jalan) dan Pengairan sawah. Untuk lebih memudahkan dalam penelitian maka penulis mengkategorikan menjadi 5 (lima) kebutuhan dasar Infrastruktur Pedesaan dengan tidak menutup kemungkinan adanya kategori yang lain, kebutuhan infrastruktur pedesaan tersebut adalah jalan, air bersih, listrik, perumahan dan irigasi.

Dari hasil survey dan data-data yang ada maka dapat dibedakan jenis-jenis Infrastruktur Pedesaan yang menonjol berdasarkan karakteristik wilayah, dari hasil analisis dapat dilihat bahwa walaupun mempunyai karakteristik bentuk desa yang berbeda tetapi kebutuhan jenis-jenis infrastruktur mempunyai banyak kesamaan, sebagai contoh hal tersebut dapat dilihat di infrastruktur jalan, kebutuhan yang diprioritaskan kebanyakan adalah pengerasan jalan baik, jalan lokal sekunder ataupun lingkungan, hal tersebut juga dipengaruhi kondisi jalan lokal primer yang cukup baik, sehingga kebutuhan berdasarkan karakteristik wilayah ditekankan kepada akses ke dalam lingkungan pedesaan.

Dari Kondisi dasar wilayah serta bentuk-bentuk desa dihasilkan kebutuhan infrastruktur, seperti terdapat pada Tabel IV.3 dibawah ini:

TABEL IV.3
JENIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN
BERDASARKAN KONDISI WILAYAH

Infrastruktur Pedesaan	Kondisi Wilayah			
	Dataran rendah (Kalibakung)	Memusat Gunung (Gunungjati)	Memusat Fasilitas (Cerih)	Pantai Bojongsana
1	2	3	4	5
Jalan	Pengembangan jaringan jalan lokal sekunder dengan perkerasan aspal	Pengembangan jaringan jalan lokal sekunder dengan perkerasan aspal	Peningkatan Jalan Lingkungan dengan aspal	Pengembangan jaringan jalan lokal sekunder dengan perkerasan aspal
Air Bersih	Pelayanan air bersih melalui PDAM	Saluran air bersih perpipaan	Pengembangan Saluran air bersih perpipaan	Pelayanan air bersih melalui PDAM
Listrik	Pengembangan distribusi jaringan bagi rumah yang belum terjangkau fasilitas listrik	Pengembangan distribusi jaringan bagi rumah yang belum terjangkau fasilitas listrik	Pengembangan distribusi jaringan bagi rumah yang belum terjangkau fasilitas listrik	Pengembangan distribusi jaringan bagi rumah yang belum terjangkau fasilitas listrik
Perumahan	Penataan lingkungan (sanitasi lingkungan)	Perbaikan rumah sederhana	Perbaikan rumah sederhana	Penataan lingkungan (sanitasi lingkungan)
Irigasi	Pembangunan jaringan	Pengelolaan jaringan	Perbaikan jaringan	Pemeliharaan jaringan

Sumber: Hasil Analisis, 2005

Terlepas dari kebutuhan-kebutuhan infrastruktur pedesaan, terdapat pula hambatan-hambatan berdasarkan kondisi dan karakteristik wilayah dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur pedesaan. Dari hasil survey dapat dijelaskan bahwa hambatan-hambatan yang ada dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur berdasarkan karakteristik wilayah adalah: untuk infrastruktur jalan, perumahan dan listrik lebih cenderung kepada kewenangan pengelolaan dan keterbatasan dana, untuk air bersih berkaitan dengan teknis pengelolaan sedangkan untuk irigasi berhubungan dengan ketersediaan infrastrukturnya, lebih jelasnya hambatan-hambatan tersebut dapat dilihat pada Tabel IV.4 dibawah ini:

TABEL IV.4
HAMBATAN -HAMBATAN PEMENUHAN INFRASTRUKTUR
PEDESAAN BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH

Infrastruktur Pedesaan	Karakteristik Wilayah			
	Dataran rendah (Kalibakung)	Memusat Gunung (Gunungjati)	Memusat Fasilitas (Cerih)	Pantai Bojongsana
Jalan	Status jalan diluar kewenangan kabupaten sehingga menjadi tanggung jawab desa dan dana Desa sangat terbatas	Status jalan diluar kewenangan kabupaten sehingga menjadi tanggung jawab desa dan dana Desa sangat terbatas	Status jalan diluar kewenangan kabupaten sehingga menjadi tanggung jawab desa dan dana Desa sangat terbatas	Status jalan diluar kewenangan kabupaten sehingga menjadi tanggung jawab desa dan dana Desa sangat terbatas
Air Bersih	Keterbatasan jaringan PDAM yang hanya tersedia di jalur utama	Terbatasnya debit air dan manajemen pengelolaan	Terbatasnya debit air dan manajemen pengelolaan	Keterbatasan jaringan PDAM yang hanya tersedia di jalur utama
Listrik	Mahalnya biaya pemasangan jaringan	Mahalnya biaya pemasangan jaringan	Mahalnya biaya pemasangan jaringan	Mahalnya biaya pemasangan jaringan
Perumahan	Terbatasnya Alokasi dana untuk sanitasi lingkungan	Banyaknya rumah yang harus mendapat perbaikan	Banyaknya rumah yang harus mendapat perbaikan	Terbatasnya Alokasi dana untuk sanitasi lingkungan
Irigasi	Tidak adanya jaringan irigasi	Wilayah terjal dan berbukit-bukit, sehingga kesulitan dalam mengelola alirannya	Tingkat kerusakan saluran irigasi yang parah sehingga perlu biaya yang besar	Terbatasnya jaringan irigasi,

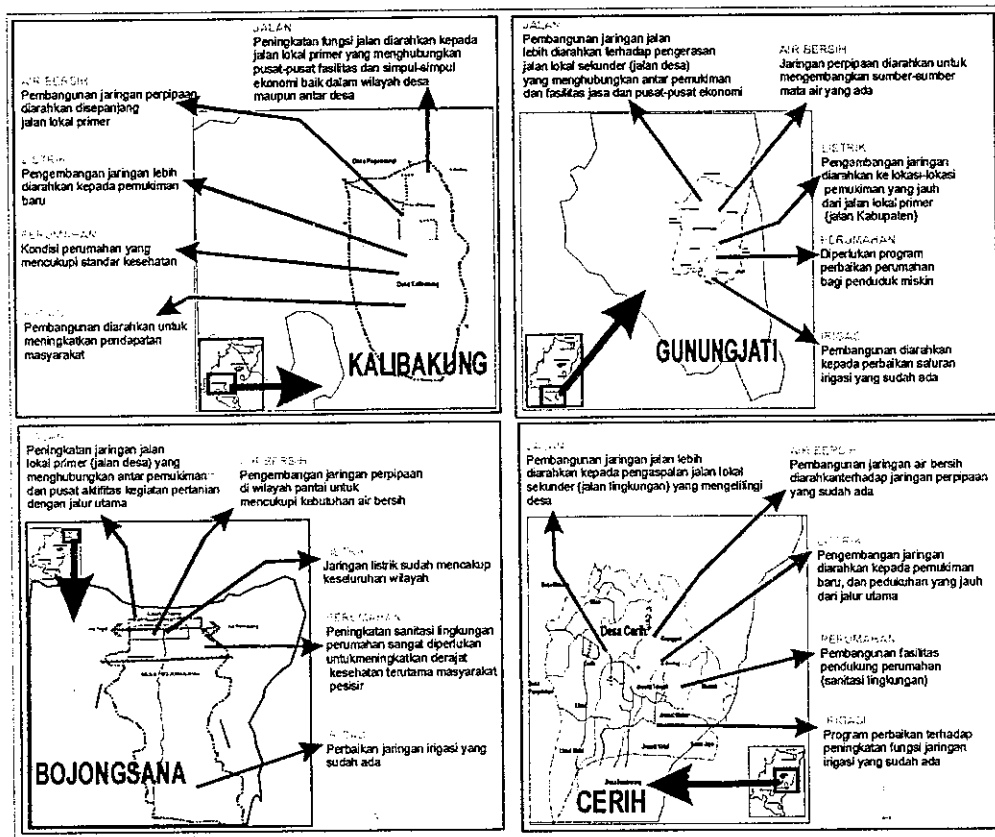
Sumber: Hasil Analisis, 2005

Kewenangan pembangunan jaringan listrik dan irigasi menjadi tanggung jawab kabupaten dan dinas teknis, hal tersebut berkaitan dengan fungsi dan tugas pemerintah, juga besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk pembangunannya. Luasnya cakupan wilayah yang memerlukan pembangunan infrastruktur dan keterbatasan dana membatasi kuantitas serta jenis infrastruktur yang hendak dibangun, pemerintah hanya membangun sebatas kewenangan dan

kemampuannya sehingga kebutuhan infrastruktur pedesaan belum bisa dilaksanakan keseluruhan.

4.1.4 Analisis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Berdasarkan Kondisi dan Potensi Wilayah.

Dari survey lapangan dapat dijelaskan, bahwa hasil perencanaan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah walaupun mempunyai karakteristik geografis serta potensi pengembangan yang berbeda-beda, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut ini:



GAMBAR 4.3
RENCANA INFRASTRUKTUR PEDESAAN BERDASARKAN KONDISI DAN POTENSI WILAYAH.

Sumber: Hasil Analisis, 2005

TABEL IV.5
PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN BERDASARKAN KONDISI DAN POTENSI WILAYAH

Potensi Wilayah		Infrastruktur Pedesaan				
		Jalan	Air bersih	Listrik	Perumahan	Irigasi
Kalibakung	Peningkatan fungsi jalan diarahkan kepada jalan lokal primer yang menghubungkan pusat-pusat fasilitas dan simpul-simpul ekonomi baik dalam wilayah desa maupun antar desa	Pembangunan jaringan perpipaan diarahkan jalan lokal primer	Pengembangan jaringan diarahkan kepada pemukiman baru	Kondisi perumahan yang mencukupi standar kesehatan	Pembangunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Perlu dibangun saluran irigasi,	
Gunungjati	Pembangunan jaringan jalan lebih diarahkan terhadap penerasan jalan lokal sekunder (jalan desa) yang menghubungkan antar pemukiman dan fasilitas jasa dan pusat-pusat ekonomi.	Jaringan perpipaan untuk mengembangkan sumber-sumber mata air yang ada.	Pengembangan jaringan diarahkan ke lokasi-lokasi pemukiman yang jauh dari jalan lokal primer (jalan kabupaten)	Diperlukan program perbaikan perumahan bagi penduduk berekonomi rendah	Pembangunan diarahkan kepada Perbaikan saluran irigasi yang sudah ada,	
Cerih	Pembangunan jaringan jalan lebih diarahkan kepada pengaspalan jalan lokal sekunder (jalan lingkungan), yang menggilingi desa.	Pembangunan jaringan air bersih diarahkan terhadap Jaringan perpipaan yang sudah ada,	Pengembangan jaringan diarahkan kepada pemukiman baru, dan dukuh yang jauh dari jalur utama	Pembangunan perumahan diarahkan kepada fasilitas pendukung	Program perbaikan diarahkan terhadap peningkatan fungsi jaringan yang sudah ada	
Bojongsana	Peningkatan jaringan jalan lokal primer (jalan desa) yang menghubungkan antar pemukiman dan pusat aktifitas kegiatan pertanian dengan jalur utama.	Pengembangan jaringan perpipaan di wilayah pantai untuk mencukupi kebutuhan air bersih	Jaringan listrik sudah mencakup keseluruhan wilayah	Peningkatan sanitasi lingkungan perumahan sangat diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan terutama masyarakat pesisir.	Perbaikan jaringan irigasi yang sudah ada.	

Sumber: Hasil Analisis, 2005

Dari Tabel IV.5 dapat dilihat bahwa, hasil perencanaan infrastruktur pedesaan baik jalan, air bersih, listrik, perumahan dan irigasi di 4 (empat) desa lokasi penelitian tidak terlalu jauh berbeda, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur di pedesaan pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan.

Dengan melihat kebutuhan-kebutuhan infrastruktur pedesaan dan kondisi geografis serta potensi wilayah, maka perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria-kriteria yang ada dan berdasarkan kondisi dan potensi desanya.

Jenis kebutuhan infrastruktur pedesaan yang hampir sama dari tiap-tiap desa penelitian walaupun kondisi geografisnya berbeda diindikasikan karena:

1. Kondisi infrastruktur jalan yang sudah diperkeras (eksisting) di pedesaan rata-rata baru sampai pada pemenuhan jalan kabupaten (jalan lokal primer).
2. Sumber kebutuhan air bersih pedesaan dipenuhi oleh sumur gali, sungai ataupun mata air yang ada, sehingga kebutuhan akan air bersih belum tercukupi.
3. Seluruh desa pada umumnya sudah terjangkau jaringan listrik.
4. Kondisi perumahan di desa masih banyak yang belum permanen dan kurang memenuhi standar kesehatan hal ini disebabkan tingkat pendapatan masyarakat desa yang rendah.
5. Mata pencaharian mayoritas adalah petani sehingga sangat dibutuhkan jaringan irigasi untuk pengairan.

Perencanaan pembangunan desa harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks tadi, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan

sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya yang lainnya (Jensen, 1995). Dalam konteks ini ia menyebutnya dengan istilah pembangunan *endogen*, atau dengan kata lain pembangunan yang berbasis potensi, perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarah kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antar sumber daya manusia dengan sumber daya lain, termasuk sumber daya alam dan lingkungan melalui investasi (Prisma, 1996).

Dapat dikatakan bahwa lingkungan alam merupakan pendukung dasar dari semua system yang ada. Peran infrastruktur sebagai mediator antara system ekonomi dan social dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting (Kodoatie, 2003).

Dengan demikian Infrastruktur pedesaan merupakan mediator masyarakat pedesaan terhadap kegiatan ekonomi dan sosial di wilayahnya, sehingga pemenuhan infrastruktur pedesaan merupakan skala prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

4.2 Perencanaan Partisipatif dalam Musrenbangdes

4.2.1 Pelaksanaan Musrenbangdes

Sesuai dengan tujuan Musrenbang, yaitu menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat dari musyawarah perencanaan ditingkat dibawahnya, maka mekanisme yang dilaksanakan dan dikembangkan di keempat

desa lokasi sesuai dengan petunjuk dan pelaksanaan yang sudah ada, adapun mekanisme pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan dari hasil observasi dan data-data primer yang terkumpul, secara umum pelaksanaan Musrenbangdes di tingkat desa adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa memberitahukan kepada Kepala Dusun/lingkungan/RW dan RT tentang akan diadakannya Musrenbangdes, diharapkan masing-masing Ketua RT dan RW/Kadus/Kaling mengusulkan kegiatan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayahnya.
2. Masing-masing RT mengadakan rapat warga tentang usulan kegiatan yang akan diajukan, dan dikoordinir oleh Ketua RW/Kadus/Kaling, kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas di masing-masing RT.
3. Sesuai dengan jadwal masing-masing Desa, Musrenbangdes dilaksanakan dengan dihadiri oleh Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM), Kelompok-kelompok yang ada di masyarakat (Pemuda, Wanita, Organisasi Masyarakat, Pengusaha, Kelompok tani dan lain-lain).
4. Dari proses Musrenbangdes tersebut kemudian dihasilkan:
 - a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa/Kelurahan.
 - b. Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa, secara swadaya maupun melalui pendanaan lainnya.
 - c. Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten dan APBD Propinsi.

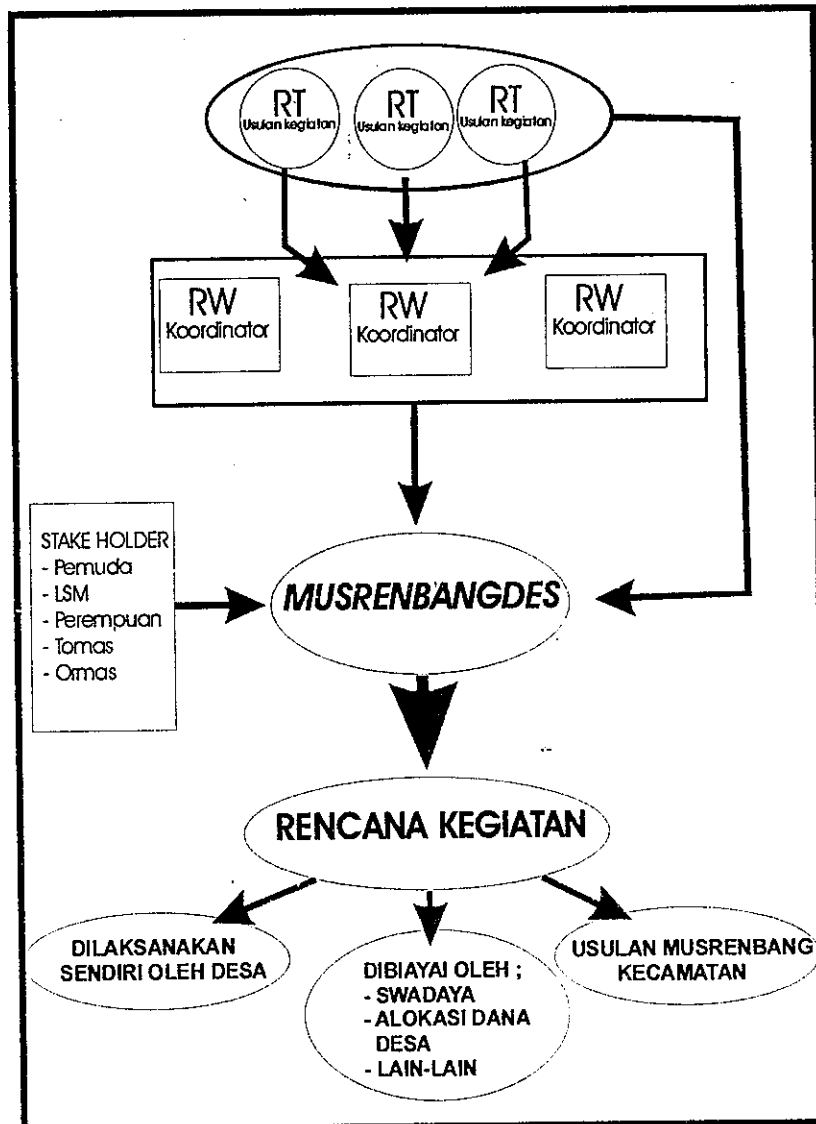
- d. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbangdes pada Forum Musrenbang Kecamatan.

Dari mekanisme pelaksanaan Musrenbangdes di 4 lokasi penelitian usulan-usulan dari tingkat RT yang diakomodir di tingkat RW hanya menghasilkan usulan-usulan yang belum mempunyai arahan dan hanya berkesan sebagai pelengkap administrasi saja, hal ini berkaitan dengan:

1. Belum jelasnya kegiatan yang akan dilaksanakan baik di tingkat RT, RW dan Desa.
2. Belum diketahui jumlah dan beban biaya yang akan dipakai apakah swadaya, desa atau biaya dari tingkat Kecamatan/Kabupaten.
3. Usulan dari tingkatan RT sebelum masuk dalam proses Musrenbangdes merupakan keputusan RW yang skala prioritasnya sangat tergantung dari pihak RW.
4. Proses Musrenbangdes belum menampung aspirasi masyarakat secara keseluruhan, sehingga rencana kegiatan yang dihasilkan kurang memberdayakan usulan di tingkat RT.

Sehingga untuk lebih mendekatkan perencanaan ke aspirasi masyarakat, salah satu usaha yang harus ditempuh adalah memberikan kejelasan tentang program-program yang hendak dilaksanakan, sehingga masyarakat benar-benar mengerti apa yang hendak dilaksanakan, besaran dana yang akan digunakan dan sumber pembiayaan yang akan digunakan, dan untuk hal tersebut perlu adanya perubahan terhadap mekanisme yang ada pada proses Musrenbangdes.

Lebih jelasnya mekanisme pelaksanaan Musrenbangdes di 4 lokasi penelitian adalah seperti pada gambar berikut:



GAMBAR 4.4
MEKANISME PELAKSANAAN
MUSRENBANGDES

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Musrenbangdes di wilayah pedesaan adalah sebagai berikut tertuang pada Tabel IV.6 dibawah ini:

TABEL IV.6
HAMBATAN PELAKSANAAN MUSRENBANGDES

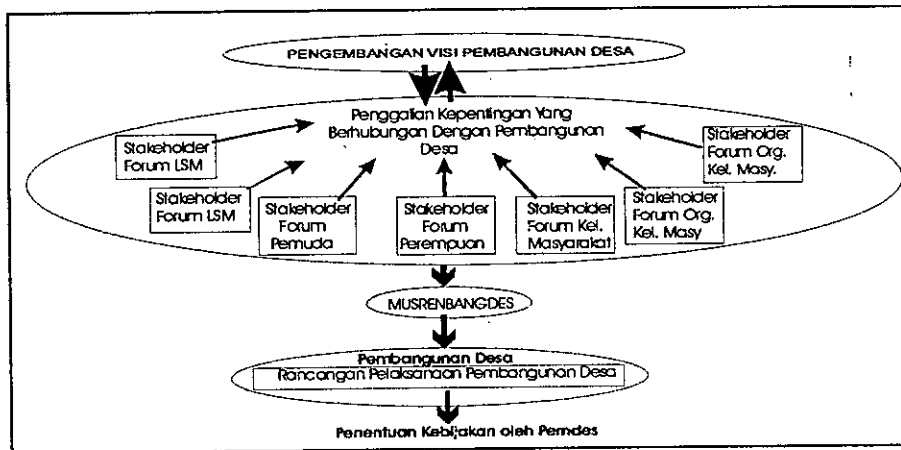
Pelaksanaan Musrenbang des	Kondisi Wilayah			
	Dataran rendah (Kalibakung)	Memusat Gunung (Gunungjati)	Memusat Fasilitas (Cerih)	Pantai (Bojongsana)
Hambatan	1. Dalam pem bahasan di tingkat RW, usulan –usulan kegiatan belum berdasarkan skala Prioritas 2. Usulan dari tingkat RT bersifat lokalitas	1. Keterbatasan perangkat RT, sehingga pe - nampungan aspirasi bermula di tingkat Dusun /RW 2. Kurangnya Ormas yang ada 3. Terbatasnya keterlibatan LSM sehingga usulan hasil kesepakatan kurang diakui	1. Kegiatan belum berdasarkan skala prioritas warga 2. Terbatasnya kewenangan masyarakat dalam ikut serta me - nentukan usulan kegiatan di tingkat Desa 3. Minimnya Keterlibatan LSM dan Ormas	1. Usulan dari tingkat RT bersifat lokalitas 2. Kegiatan belum berdasarkan skala prioritas warga 3. Terbatasnya kewenangan masyarakat dalam ikut serta menentukan usulan kegiatan di Desa

Sumber: Hasil Analisis, 2005

Adapun hambatan-hambatan yang ada bersifat non-teknis, yaitu terbatasnya kemampuan masyarakat untuk menyusun skala prioritas, usulan bersifat lokal yang hanya untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakannya, hal ini hampir sama seperti yang dikemukakan oleh (Chaskin, 2005) yaitu membuat hubungan yang erat dan produktif diantara gabungan anggota sangat susah dan memakan waktu yang lama disebabkan 3 (tiga) faktor yaitu: 1) perbedaan gaya komunikasi, 2) terkait pemisahan orientasi tujuan akhir dan dasar pengetahuan, 3) tegangan antara kesepakatan penelitian dan efisiensi pembuatan keputusan.

Berkaitan dengan kondisi geografis wilayah, hambatan-hambatan yang ada dalam proses Musrenbangdes berdasarkan analisis di lapangan adalah keaktifan perangkat desa dalam memfasilitasi pelaksanaannya, untuk di daerah pegunungan kegiatan lebih lama dan kualitas sumber daya manusianya lebih terbatas dibandingkan dengan daerah linier di dataran rendah.

Dari proses pelaksanaan Musrenbangdes di lokasi penelitian, secara sederhana alur pikir pelaksanaannya dapat digambarkan sebagai berikut pada Gambar 4.5:



GAMBAR 4.5
ALUR PIKIR PROSES MUSRENBANGDES

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Musrenbangdes merupakan proses penggalian kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan/kebutuhan masyarakat desa berdasarkan usulan dari stakeholder sehingga dihasilkan rancangan/rencana pelaksanaan pembangunan desa.

4.2.2 Pemanfaatan Sumber Daya Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangdes.

4.2.2.1 Individu

Peserta Musyawarah sangat menentukan kualitas hasil perencanaan, walaupun dalam Musrenbangdes masing-masing individu membawa usulan masing-masing sesuai dengan hasil musyawarah di tingkat RT/RW/Dusun, tetapi argumentasi untuk mengajukan dan mempertahankan usulan tersebut sangat

tergantung kepada tingkat sumber daya masing-masing individu yang membawanya.

TABEL IV.7
ANALISIS USIA DAN PENDIDIKAN
PESERTA MUSRENBANGDES

Kategori	Jenis kelamin		Usia			Pendidikan			
	L	P	20-30	31-40	41-50	SD	SMP	SM A	Akad/P T
Jml	90	2	3	57	30	5	23	53	9
%	97.8	2.2	3.3	62.0	32.6	5.4	25.0	59.6	10.1

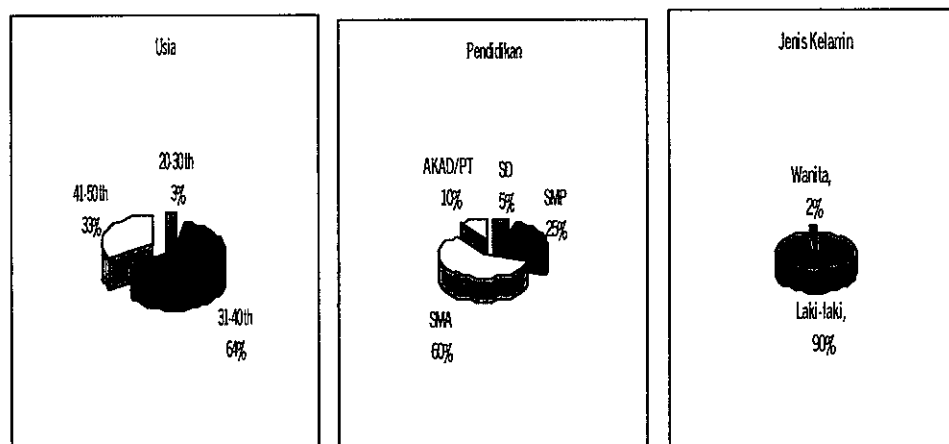
Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari data-data yang ada dapat dilihat pada Tabel IV.7 diatas, kemampuan individu peserta Musrenbangdes didasarkan pada kuesioner penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut, peserta Musrenbangdes sebagian besar adalah laki-laki presentasi wanita dalam proses Musrenbangdes ini sangat kecil yaitu hanya 2,2% dan 97,8% adalah laki-laki, dengan demikian maka kecenderungannya kelompok pria akan lebih banyak ikut dalam partisipasi (Soedarno, 1992). Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita.

Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda yang berbeda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan (Soedarno, 1992). Untuk peserta Musrenbangdes rata-rata berusia 31-

40 tahun sehingga dapat dikatakan bahwa golongan yang lebih muda yang lebih berperan.

Sejumlah 59,6% peserta Musrenbangdes berpendidikan SMA, salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha peran serta yang diberikan masyarakat dalam pembangunan (Litwin, 1986). Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya tentu mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan, sehingga dapat dikatakan dengan peserta Musrenbangdes rata-rata mempunyai tingkat pendidikan yang baik lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.6 dibawah ini:



GAMBAR 4.6
GRAFIK USIA, PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
PESERTA MUSRENBANGDES

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Mata pencaharian peserta Musrenbangdes sebagian besar adalah petani, hal ini dapat dilihat peserta Musrenbangdes yang bermatapencaharian petani mencapai 42,7%. Pendapatan atau berpenghasilan peserta Musrenbangdes

sebagian besar dibawah Rp. 1.000.000,- rupiah, yaitu dibawah Rp. 500.000,- (46,1%) dan Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000 (38%). Tingkat pendapatan juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, besarnya tingkat pendapatan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Suparlan, 1993).

TABEL IV.8
MATA PENCAHARIAN DAN TINGKAT PENDAPATAN PESERTA
MUSRENBANGDES

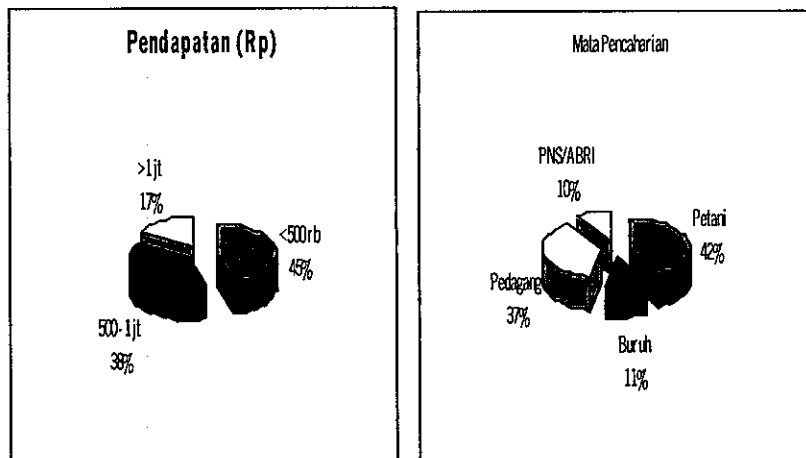
Kategori	Mata Pencaharian				Pendapatan		
	Petani	Buruh	dagang	PNS/ABRI	0-500 rb	500-1 jt	lebih 1 jt
Jml	38	10	33	9	41	34	15
%	42.7	11.2	37.1	10.1	46.1	38.2	16.9

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Mata pencaharian akan berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang, dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencaharian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti, diskusi dan lain sebagainya.

Faktor jenis mata pencaharian/pekerjaan berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi derajat aktifitas dalam kelompok dan mobilitas individu. (Slamet, 1994). Dengan demikian dilihat dari Pendapatan dan mata pencaharian maka peserta musrenbangdes secara individu belum optimal dan tergolong kurang potensial.

Lebih jelasnya tingkat pendapatan dan jenis matapencaharian peserta dapat dilihat pada gambar berikut ini:



GAMBAR 4.7
GRAFIK PENDAPATAN DAN MATA PENCAHARIAN INDIVIDU
PESERTA MUSRENBANGDES

Sumber : Hasil Analisis, 2005

4.2.2.2 Komunal/Kelompok

Keterlibatan kelompok dalam Musrenbangdes dari data yang ada dan hasil wawancara dengan nara sumber baik dengan perangkat desa, tokoh masyarakat dan peserta Musrenbangdes hanya di Desa Gunungjati Organisasi Masyarakatnya tidak terlibat dalam pelaksanaan Musrenbangdes, untuk Tokoh Masyarakat di 4 (empat) lokasi penelitian terlibat dalam proses Musrenbangdes.

TABEL IV.9
KELOMPOK MASYARAKAT PESERTA MUSRENBANGDES

Desa	Organisasi Masyarakat	Tokoh Masyarakat
Kalibakung	1	4
Gunungjati	0	2
Cerih	1	1
Bojongsana	1	2

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Keterlibatan komunal/kelompok berperan sebagai penyeimbang dan penyelaras karena merupakan perwakilan masyarakat terpilih yang mempunyai

sumber daya yang memadai, sedangkan tokoh masyarakat merupakan orang yang dituakan dan diikuti saran dan petunjuknya.

4.2.3 Analisis Keikutsertaan Masyarakat Dalam Kegiatan Musrenbangdes

4.2.3.1 Derajat Kesukarelaan

Derajat kesukarelaan berpengaruh terhadap tingkat keaktifan dan tingkat kehadiran peserta Musrenbangdes dalam proses Musyawarah, dengan keterlibatan aktif dan tingkat kehadiran akan mempengaruhi kualitas hasil perencanaan di tingkat Desa.

Dari data yang diperoleh terhadap peserta musrenbangdes melalui kuesioner, Desa Kalibakung dan Desa Bojongsana mempunyai derajat kesukarelaan yang tinggi yaitu 70% dan 83% sedangkan Desa Cerih tingkat kesukarelaan hanya mencapai 55%, hal ini menunjukkan bahwa peserta Musrenbangdes di desa-desa penelitian mempunyai derajat kesukarelaan yang cukup tinggi yaitu 66%.

TABEL IV.10
DERAJAT KESUKARELAAN PESERTA MUSRENBANGDES

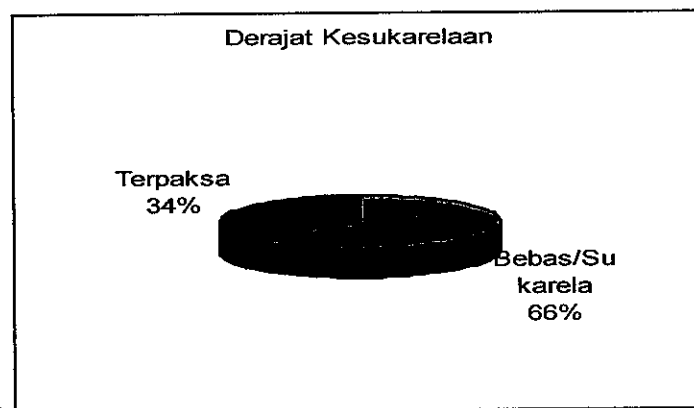
Desa	Bebas/Sukarela	%	Terpaksa	%
Kalibakung	16	70%	7	30%
Gunungjati	12	58%	9	42%
Cerih	13	55%	11	45%
Bojongsana	20	83%	4	17%
Jumlah	61	66%	31	34%

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Bentuk peran serta bebas ini terjadi apabila seseorang melibatkan dirinya dalam suatu kegiatan partisipatif dilakukannya dengan ketulusan dan keiklasan (secara sukarela). Pada peran serta ini dapat dilakukan secara spontan, seseorang melakukannya berdasarkan keyakinan dan tanpa dipengaruhi oleh pihak lain baik melalui ajakan ataupun penyuluhan maupun desakan lembaga lain (Slamet,1993).

Dari Gambar 4.8 dibawah ini dapat dilihat bahwa antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbangdes cukup tinggi, hal ini terlihat bahwa dari ke 4 (empat) lokasi penelitian (94 responden) yang masuk kategori Bebas/Sukarela mencapai 66%.

Hal ini berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk memajukan desanya melalui forum yang ada, karena selama ini desa mereka kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait terutama masalah jalan, air bersih dan irigasi, karena berkaitan dengan aktifitas mereka selaku masyarakat desa yang bermatapencaharian sebagai petani



GAMBAR 4.8

GRAFIK DERAJAT KESUKARELAAN PESERTA MUSRENBANGDES

Sumber : Hasil Analisis, 2005

4.2.3.2 Intensitas dan Frekuensi Kegiatan

Intensitas dan Frekuensi kegiatan menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam ikut merumuskan kegiatan-kegiatan yang dibahas dalam Musrenbangdes.

TABEL IV.11
TINGKAT KEHADIRAN PESERTA MUSRENBANGDES

Desa	Tingkat kehadiran			
	Hadir	%	Tdk Hadir	%
Kalibakung	21	93%	2	7%
Gunungjati	14	67%	7	33%
Cerih	19	78%	5	22%
Bojongsana	20	82%	4	18%
Jumlah	74	81%	18	19%

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dilihat dari tingkat kehadiran, para peserta Musrenbangdes termasuk kategori baik, hal ini terlihat dari tingkat kehadiran para peserta yang mencapai 81% kehadiran hal ini menunjukkan antusias mereka terhadap usulan kegiatan yang akan diperjuangkan dari hasil musyawarah di lingkungannya untuk dibahas dalam forum Musrenbangdes, tingkat kehadiran tertinggi terjadi di Desa Kalibakung dan terendah di Desa Gunungjati, hal ini terjadi di Desa Gunungjati karena banyak penduduk yang selain bercocok tanam untuk menambah pendapatannya mereka bekerja di kota, sehingga hanya pada waktu musim bercocok tanam baru kembali ke desanya.

Dari para peserta yang hadir dalam Musrenbangdes, hampir keseluruhannya aktif dalam dalam memperjuangkan usulan kegiatan yang dibawanya sebagai hasil musyawarah baik di tingkat RT/RW maupun dusunnya.

Hal ini terlihat dari 74 peserta Musrenbangdes yang hadir 93,2% berperan aktif di dalam mengikuti proses pengambilan keputusan kegiatan Musrenbangdes.

TABEL IV.12
TINGKAT KEAKTIFAN PESERTA MUSRENBANGDES

Desa	Keaktifan			
	Aktif	%	Tidak aktif	%
Kalibakung	18	95%	1	5%
Gunungjati	13	90%	1	10%
Cerih	17	89%	2	11%
Bojongsana	19	96%	1	4%
Jumlah	69	93,2%	5	5.8%

Sumber : Hasil Analisis, 2005

4.2.3.3 Motivasi keikutsertaan

Usulan yang diajukan dalam Musrenbangdes tidak terbatas dalam pembangunan fisik tetapi cakupannya sangat luas dari bidang sosial budaya, ekonomi, fisik prasarana ataupun kegiatan-kegiatan lain yang dibutuhkan di desa.

TABEL IV.13
MOTIVASI USULAN KEGIATAN PESERTA MUSRENBANGDES

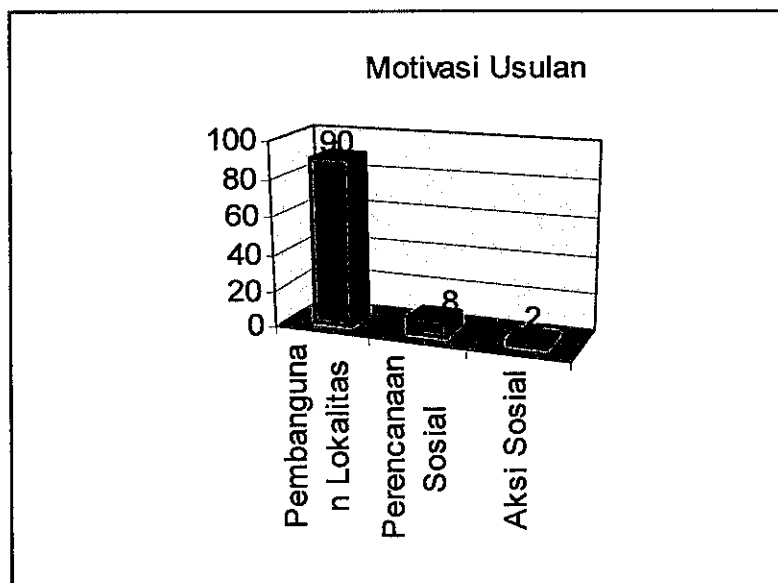
Desa	Pemb.	%	Perenc.	%	Aksi	%
	Lokalitas		Sosial		Sosial	
Kalibakung	19	85%	3	9%	1	6%
Gunungjati	21	100%	0	0%	0	0%
Cerih	22	90%	2	10%	0	0%
Bojongsana	21	87%	2	10%	1	3%
Jumlah	83	90%	7	8%	2	2%

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari hasil kuesioner, menghasilkan data bahwa hampir 90% usulan berkaitan dengan pembangunan lokalitas, yang artinya bahwa usulan yang

diajukan hanya terbatas pada kondisi eksisting lingkungan disekelilingnya tanpa diteliti dan dianalisis terlebih dahulu dan berkesan spontanitas.

Motivasi usulan berpengaruh terhadap kualitas usulan yang diajukan, semakin tinggi motivasi yang terjadi berarti argumentasi terhadap usulan kegiatan yang diajukan semakin baik.



GAMBAR 4.9
GRAFIK DERAJAT MOTIVASI USULAN KEGIATAN PESERTA
MUSRENBANGDES

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari Gambar 4.9 diatas menunjukkan bahwa derajat tertinggi dalam usulan Musrenbangdes merupakan rencana kegiatan yang bersifat pembangunan lokalitas mencapai 90%, hal ini menunjukkan bahwa rencana yang diajukan sebagian besar berdasarkan kebutuhan masyarakat pada saat itu (*eksisting*). Untuk perencanaan sosial dan aksi sosial masih sangat kecil prosentasenya, hal ini berkaitan dengan skala prioritas kebutuhan yang ada dalam masyarakat.

4.2.4 Analisis Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes

4.2.4.1 Cara keterlibatan

Cara keterlibatan dalam Musrenbangdes menunjukkan kekuatan motivasi usulan kegiatan yang diperjuangkannya, dengan keikutsertaan secara langsung berarti usulan yang diajukannya mempunyai arti penting dan bermanfaat bagi lingkungannya, dari hasil akumulasi data ke 4 desa yang menjadi lokasi penelitian menunjukkan bahwa peran serta secara langsung menjadi alternative pilihan terbanyak untuk mensukseskan aspirasi rencana yang diajukannya, hal tersebut ditunjukkan dengan peran serta masyarakat secara langsung mencapai 89%, dan hanya 10 orang (11%) yang berperan serta secara tidak langsung.

TABEL IV.14
TINGKAT KEAKTIFAN PESERTA MUSRENBANGDES

Desa	Peran serta			
	Langsung	%	tidak langsung	%
Kalibakung	21	93%	2	7%
Gunungjati	18	84%	3	16%
Cerih	22	91%	2	9%
Bojongsana	21	89%	3	11%
Jumlah	82	89%	10	11%

Sumber : Hasil Analisis, 2005

4.2.4.2 Keterlibatan Dalam Tahap Pada Proses Pembangunan

Dari hasil wawancara perangkat desa, tokoh masyarakat serta didukung oleh data-data kuesioner yang disebar terhadap para peserta Musrenbangdes, keterlibatan yang mendalam terhadap proses pembangunan adalah pada tahap perumusan dan penerimaan, selain dari kedua tahap tersebut para peserta

Musrenbangdes kurang terlibat, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel IV.23 dibawah ini:

TABEL IV.15
KETERLIBATAN DALAM TAHAPAN PEMBANGUNAN PESERTA
MUSRENBANGDES

Desa	Perumusan		Persetujuan		Penelitian		Penerimaan	
	Rsp	%	Rsp	%	Rsp	%	Rsp	%
Kalibakung	21	91.3	15	65.2	0	0.0	17	73.9
Gunungjati	14	66.7	12	57.1	0	0.0	12	57.1
Cerih	19	79.2	10	47.6	0	0.0	19	79.2
Bojongsana	20	83.3	18	75.0	0	0.0	20	83.3
Jumlah	74	80.4	55	59.8	0	0.0	68	73.9

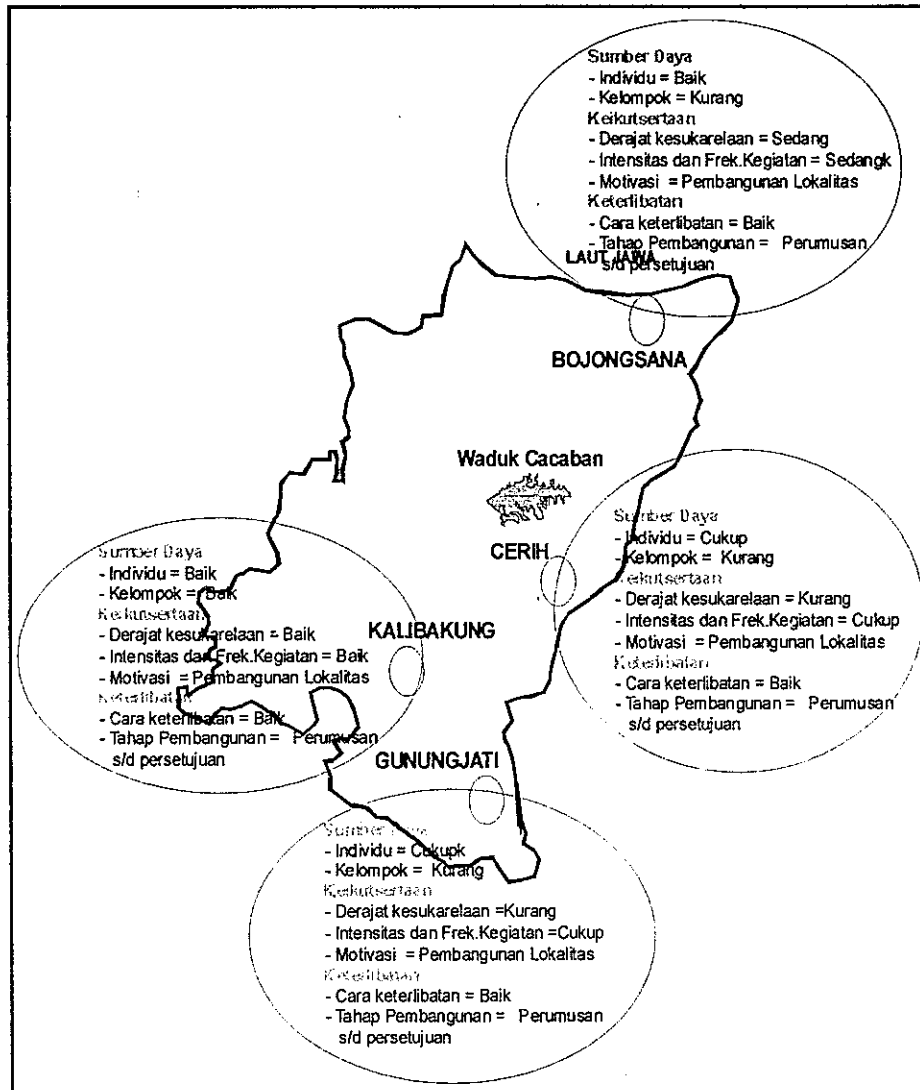
Sumber : Hasil Analisis, 2005

4.2.5 Pola Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Kondisi Wilayah

Dari hasil analisis perencanaan partisipasi masyarakat melalui indikator sumber daya masyarakat, Keikutsertaan Masyarakat dan Keterlibatan masyarakat dalam proses Musrenbangdes di 4 lokasi penelitian yang mempunyai kondisi geografis berbeda-beda, terdapat perbedaan tingkat partisipasi, tingkat partisipasi dihubungkan dengan lokasi geografis maka terbentuk suatu pola partisipasi

Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa masyarakat didataran rendah mempunyai pola partisipasi yang lebih baik dinilai dari sumber daya, keikutsertaan maupun keterlibatan di dalam Musrenbangdes, dilihat dari sumber daya lebih baik disebabkan karena banyak masyarakat yang pendidikannya sudah mengenyam bangku SMA hal ini berkaitan dengan tingkat pendapatan yang lebih baik, masyarakat banyak berdomisili didaerahnya, dan tingkat kesadaran terhadap pembangunan desanya lebih tinggi, tetapi terdapat pola partisipasi yang sama terhadap motivasi keikutsertaan dan keterlibatan dalam tahap pembangunan yaitu

pembangunan lokalitas dan tahap baru sampai pada perumusan dan persetujuan, lebih jelasnya dapat dilihat gambar berikut ini:



GAMBAR 4.10
POLA PARTISIPASI TERHADAP PERBEDAAN
KONDISI GEOGRAFIS

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Untuk lebih jelasnya pola partisipasi masyarakat yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah dapat dilihat pada tabel Tabel IV.16 dibawah ini:

TABEL IV. 16
POLA PARTISIPASI TERHADAP PERBEDAAN
KONDISI GEOGRAFIS

Pola partisipasi	Kondisi Wilayah			
	Dataran rendah (Kalibakung)	Memusat Gunung (Gunungjati)	Memusat Fasilitas (Cerih)	Pantai Bojongsana
1	2	3	4	5
Sumber daya 1. Individu (i) 2. Kelompok (K)	1. Baik 2. Baik	1. Cukup 2. Kurang	1. Cukup 2. Kurang	1. Baik 2. Kurang
Keikutsertaan 1. Derajat Kesukarelaan (Dk) 2. Intensitas dan Frekuensi Kegiatan (If) 3. Motivasi Keikutsertaan (Mk)	1. Baik 2. Baik 3. Pemb. Lokalitas	1. Kurang 2. Cukup 3. Pemb. Lokalitas	1. Kurang 2. Cukup 3. Pemb. Lokalitas	1. Sedang 2. Sedang 3. Pemb. Lokalitas
Keterlibatan 1. Cara keterlibatan (Ck) 2. Tahap Pembangunan (Tp)	1. Baik 2. Perumusan s/d Perse- tujuan	1. Baik 2. Perumusan s/d perse- tujuan	1. Baik 2. Perumusan s/d Perse- tujuan	1. Baik 2. Perumusan s/d Perse- tujuan

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Data diperoleh berdasarkan hasil kuesioner yang disebar ke 4 desa lokasi penelitian, kriteria Baik, sedang dan kurang diperoleh dari hasil akumulasi indikator-indikator partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes. hasil penghitungan terlampir.

4.2.6 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Melalui Musrenbangdes.

Dengan melihat hasil analisis perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan dan analisis perencanaan partisipatif dalam Musrenbangdes maka bisa dianalisis perencanaan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang diinginkan masyarakat melalui proses perencanaan partisipatif dan perencanaan kegiatan infrastruktur berdasarkan analisis bentuk, potensi dan kebutuhan wilayah pedesaan.

4.2.6.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Infrastruktur Pedesaan

Jalan, Air Bersih, Listrik, Perumahan dan Irigasi (JALPI).

Dari perencanaan kegiatan yang telah diusulkan pada tiap jenis infrastruktur pedesaan (JALPI) maka bentuk, tipe dan cara partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL IV.17
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR PEDESAAN (JALPI)

Infrastruktur Pedesaan	Kondisi Partisipasi		
	Bentuk Partisipasi (perencanaan-pelaksanaan)	Tipe Partisipasi (Penuh/sebagian)	Cara Partisipasi (Aktif/Pasif)
1	2	3	4
Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan pening katan dan perbaikan jalan 2. Menentukan skala prioritas pemb. 3. Membantu pendanaan secara swadaya murni 4. Menyumbangkan tenaga baik fisik maupun dana 5. Berperan aktif dalam setiap pertemuan warga 	Penuh	Aktif
Air Bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan pengembangan jaringan 2. Penyediaan perpipaan skala lokal 3. Pengelolaan jaringan 	Sebagian	Aktif
Listrik	Distribusi jaringan lokal	Sebagian	Pasif-
Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan perbaikan perumahan 2. Perbaikan sanitasi lingkungan 	Sebagian	Pasif
Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan pengembangan jaringan 2. Pemeliharaan jaringan 3. Pengelolaan jaringan 	Sebagian	Pasif

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Bentuk, tipe dan cara partisipasi masyarakat termanifestasi didalam setiap jenis infrastruktur pedesaan , tetapi partisipasi aktif masyarakat baru dapat

dilaksanakan terhadap infrastruktur yang mampu diakses oleh masyarakat di tingkat pedesaan, baik kemampuan teknik, finansial maupun pendanaan, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel IV.17 bahwa partisipasi aktif masyarakat cenderung kepada infrastruktur yang bisa ditangani oleh masyarakat seperti jalan dan air bersih.

4.2.6.2 Analisis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Melalui Musrenbangdes

Dari hasil rencana Musrenbangdes ke 4 (empat) desa, pola partisipasi serta bentuk partisipasi masyarakat terhadap perencanaan infrastruktur pedesaan dapat dianalisis kebutuhan rencana pengembangan infrastruktur pedesaan ataupun pembangunan infrastruktur pedesaan seperti tertuang pada Tabel IV.18 berikut ini:

TABEL IV.18
ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEDESAAN (JALAN, AIR BERSIH DAN LISTRIK)
MELALUI MUSRENBANGDES

Desa	Infrastruktur Pedesaan		
	Jalan	Air bersih	Listrik
1	2	3	4
Kalibakung (Dataran Rendah)	Pembangunan jalan di prioritas kepada jalan lokal sekunder (jalan lingkungan) yang menghubungkan antar permukiman yang memudahkan aksesibilitas mereka sehari-hari	Pembangunan sumur serapan agar sumber air yang ada dapat dipergunakan secara baik, Pembangunan jaringan air bersih dari sumber mata air yang ada	Kebutuhan jaringan listrik sudah tercukupi
Gunungjati (Memusat Gunung)	Peningkatan jalan lokal sekunder (jalan lingkungan) Pengerasan jalan tanah di permukiman	Jaringan perpipaan dari sumber mata air yang ada	Pengembangan jaringan yang jauh dari jalur utama

1	2	3	4
Cerih (Memusat Fasilitas)	Peningkatan jalan lokal sekunder (jalan desa) yang menghubungkan antar pedukuhan, sehingga memudahkan aktifitas jasa dan ekonomi	Pengembangan jaringan perpipaan yang sudah ada, dan pembinaan manajemen pengelolaan sumber daya air	Pengembangan jaringan ke pemukiman yang jauh dari jalur utama
Bojongsana (Pantai)	Peningkatan jalan lokal sekunder yang menghubungkan ke jalur utama	Pembangunan Jaringan air bersih di wilayah pesisir bagi masyarakat nelayan.	Jaringan sudah mencukupi

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari hasil usulan kegiatan di masing-masing lokasi penelitian dapat dianalisis bahwa untuk infrastruktur jalan lebih diprioritaskan dan perencanaan pembangunannya lebih ke intern desa yaitu mengarah ke jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan, sedangkan untuk Air bersih masyarakat lebih memakai sumber mata air yang ada, sedangkan untuk pengembangan sumber mata air melalui perpipaan hanya mengembangkan dan meneruskan jaringan yang sudah ada.

TABEL IV.19
ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEDESAAN (PERUMAHAN DAN IRIGASI)
MELALUI MUSRENBANGDES

Desa	Infrastruktur Pedesaan	
	Perumahan	Irigasi
Kalibakung	Peningkatan pemahaman terhadap tingkat kesehatan lingkungan perumahan	Pembangunan jaringan irigasi
Gunungjati	Perbaikan perumahan masyarakat miskin	Pengelolaan jaringan irigasi
Cerih	Perbaikan perumahan masyarakat miskin	Perbaikan jaringan irigasi yang sudah ada sehingga dapat berfungsi secara baik
Bojongsana	Perbaikan perumahan di wilayah pesisir dan pembangunan sanitasi lingkungan	Perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang sudah ada

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Ada tiga alasan utama mengapa peran serta mempunyai sifat yang sangat penting (Conyers, 1994):

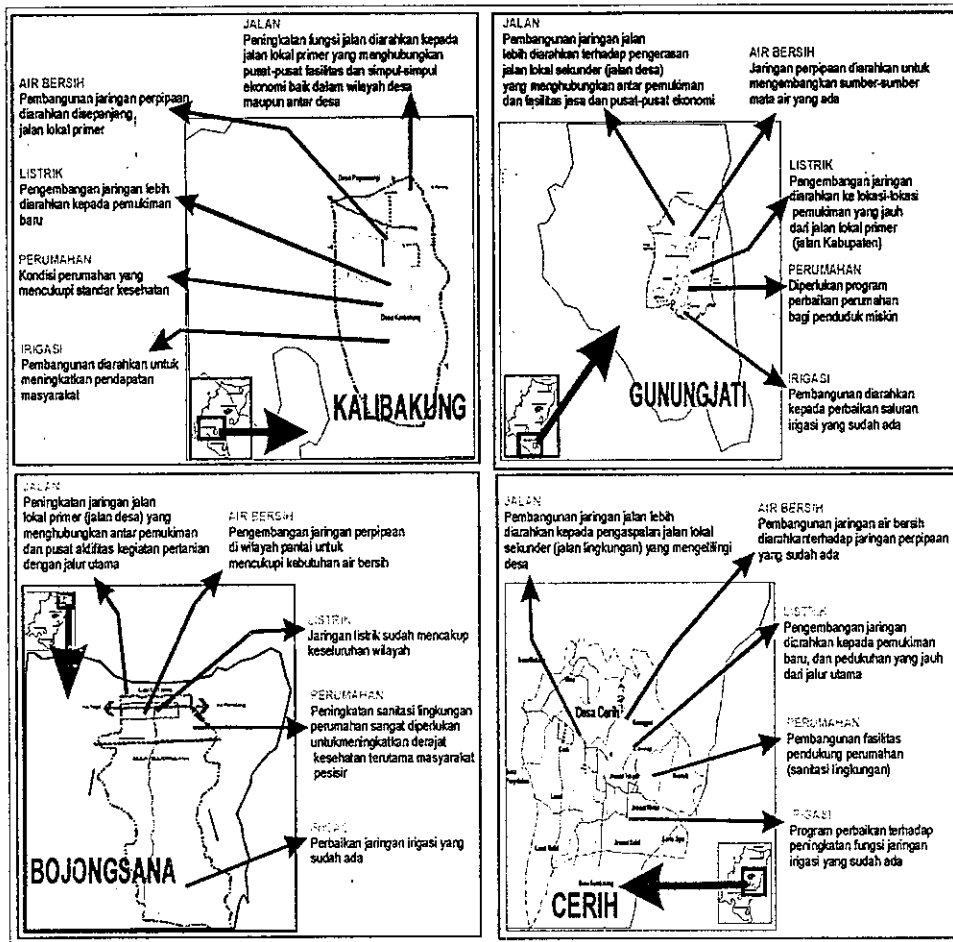
1. Peran serta masyarakat sebagai alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Masyarakat akan mempercayai proyek dan program pembangunan, jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibat dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Hal ini selaras dengan konsep "*man-centered development*", yaitu pembangunan yang diarahkan kepada perbaikan dan peningkatan nasib dan bukan hanya sekedar hiasan di bibir saja atau sebagai alat pembangunan.

Dengan berbagai usulan dan rencana pembangunan infrastruktur pedesaan yang diajukan oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang kondisi dan potensi wilayahnya, masyarakat dalam Musrenbangdes cenderung menghasilkan perencanaan yang mampu dan bisa ditanggulangi sendiri, sebagai contoh untuk perencanaan infrastruktur irigasi yang membutuhkan keahlian teknis masyarakat hanya mampu mengusulkan pembangunan atau perbaikan saja sedangkan untuk membangun sendiri tidak akan mampu selain pendanaan juga tidak mempunyai kemampuan teknis yang memadai.

Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan baik dalam proses perencanaan, perumusan dan penentuan tujuan

bermaksud agar masyarakat dilibatkan secara aktif sehingga akan mempunyai rasa ikut memiliki.



GAMBAR 4.11
RENCANA INFRASTRUKTUR PEDESAAN HASIL
MUSRENBANGDES

Sumber : Hasil Analisis, 2005

4.3 Analisis Rencana Kebutuhan Infrastruktur Pedesaan

4.3.1 Rencana Kebutuhan Berdasarkan Musrenbangdes

Kegiatan perencanaan tingkat daerah seharusnya berdasarkan isu yang dianggap relevan bagi pembangunan. Pemahaman terhadap proses perencanaan

partisipasi penting untuk mendorong pemerintahan daerah agar memiliki kesepahaman tentang mekanisme dan formulasi proses Musrenbang. Meskipun “Event Musrenbang” bukan merupakan barang baru bagi semua pihak di tingkat Kabupaten, namun kenyataannya menunjukkan bahwa sampai saat ini hanya 1–5% saja usulan dari bawah (hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan) yang tertuang dan diakomodir dalam APBD. Untuk itu penyegaran tentang Proses Musrenbang partisipatif yang efektif perlu dilaksanakan sebelum pra-Musrenbang dimulai. Sehingga ada kesamaan pandangan dan kebutuhan serta konsisten terhadap suatu proses partisipasi yang riil.

TABEL IV.20
RENCANA INFRASTRUKTUR PEDESAAN
BERDASARKAN HASIL MUSRENBANGDES

Infrastruktur Pedesaan	Kondisi dan Potensi Wilayah			
	Dataran rendah (Kalibakung)	Memusat Gunung (Gunungjati)	Memusat Fasilitas (Cerih)	Pantai Bojongsana
Jalan	Peningkatan jalan Lokal Sekunder (Jalan Desa dan Lingkungan)	Peningkatan jalan Lokal Sekunder (jalan Desa dan jalan lingkungan)	Peningkatan jalan lokal sekunder	Peningkatan jalan lokal sekunder
Air Bersih	Jaringan perpipaan pemanfaatan sumber air mata air	Jaringan perpipaan	Jaringan perpipaan	Penyediaan sumber air bersih
Listrik	Pengembangan jaringan	Pengembangan jaringan	Pengembangan jaringan	Sudah tercukupi
Perumahan	Pemugaran perumahan	Pemugaran perumahan	Pembangunan perumahan miskin	Perbaikan sanitasi lingkungan
Irigasi	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan	Pembangunan jaringan irigasi	Pembangunan saluran irigasi	Perbaikan jaringan irigasi

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Hasil usulan kegiatan melalui Musrenbangdes dihasilkan melalui individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat. Kualitas individu, motivasi keikutsertaan, keaktifan serta keterlibatannya dalam proses Musrenbangdes sangat berpengaruh dalam menghasilkan rencana kegiatan.

Dari hasil analisis rencana berdasarkan kebutuhan berdasarkan Musrenbangdes dihasilkan rencana infrastruktur pedesaan yang seragam yaitu usulan yang didasarkan kebutuhan lokal masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakatnya dari segi pembiayaan maupun dari segi teknis pelaksanaannya.

Hasil usulan rencana berdasarkan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbangdes cenderung mengarah ke pembangunan intern masyarakat.

4.3.2 Rencana Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah.

Program Pembangunan infrastruktur Pedesaan adalah merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat, bentuk konkritnya adalah tersedianya akses prasarana lokal yang lebih memadai, dapat dimanfaatkan secara langsung dan cepat oleh masyarakat, disamping itu manfaat lain yang dapat diperoleh adalah dalam bentuk peningkatan ketrampilan (human investment) didalam penyelenggaraan prasarana lokal.

Dari hasil analisis rencana berdasarkan kondisi dan potensi wilayah dihasilkan rencana infrastruktur pedesaan yang berbeda-beda, tetapi ada kesamaan tujuan dalam usulannya yaitu lebih menekankan ke pembangunan berdasarkan

kondisi infrastruktur yang ada dan pengembangannya berorientasi kepada sumber-sumber daya yang dimilikinya.

TABEL IV.21
RENCANA INFRASTRUKTUR PEDESAAN
BERDASARKAN ANALISIS KONDISI DAN POTENSI WILAYAH

Infrastruktur Pedesaan	Kondisi Wilayah			
	Dataran rendah (kalibakung)	Memusat Gunung (Gunungjati)	Memusat Fasilitas (Cerih)	Pantai (Bojongsana)
Jalan	Jalan Lokal sekunder	Jalan Lokal Primer	Jalan Lokal Primer	Jalan Lokal Sekunder
Air Bersih	Pengembangan dan pembangunan Jaringan perpipaan air bersih	Pengembangan Jaringan perpipaan dari sumber mata air	Pengembangan Jaringan perpipaan dari sumbermata air	Pengembangan Jaringan perpipaan dari hidran umum
Listrik	Pengembangan jaringan	Pengembangan jaringan	Pengembangan jaringan	Pengembangan jaringan
Perumahan	Pemugaran perumahan	Pemugaran perumahan	Pemugaran perumahan	Perbaikan sanitasi
Irigasi	Pembangunan jaringan irigasi	Perbaikan jaringan irigasi	Perbaikan jaringan irigasi	Pemeliharaan jaringan irigasi

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg,2000).

Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak, kegiatan social ekonomi meningkat, sehingga kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi meningkat.

4.3.3 Komparasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Melalui Musrenbangdes dan Potensi Wilayah

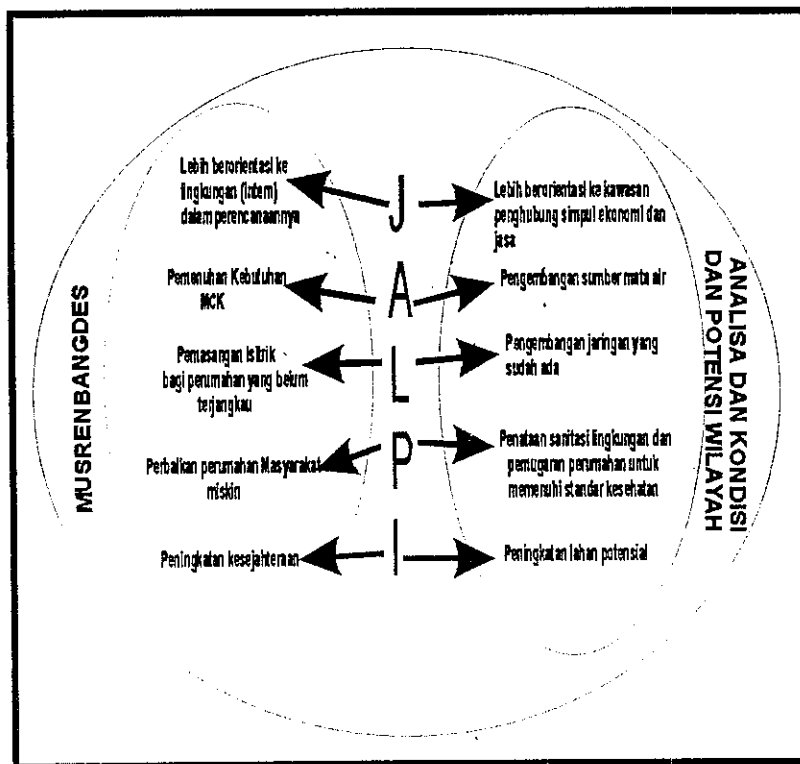
Dari hasil analisis rencana infrastruktur pedesaan baik melalui Musrenbangdes maupun berdasarkan kondisi dan potensi wilayah, hasil perencanaannya dapat dikomparasikan sebagai berikut pada tabel IV.22 dibawah ini:

TABEL IV.22
KOMPARASI PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN
BERDASARKAN KEBUTUHAN (MUSRENBANGDES)
DAN ANALISIS KONDISI POTENSI WILAYAH

Infrastruktur Pedesaan	Komparasi Infrastruktur Pedesaan	
	Kebutuhan (Musrenbangdes)	Analisis Kondisi dan Potensi Wilayah
1	2	3
Jalan	Lebih berorientasi ke lingkungan intern	Lebih berorientasi ke kawasan, penghubung simpul ekonomi dan jasa
Air Bersih	Pemenuhan kebutuhan Mandi Cuci Kakus (MCK)	Pengembangan Sumber Mata Air
Listrik	Pemasangan Listrik ke rumah yang belum terjangkau jaringan listrik	Pengembangan jaringan yang sudah ada
Perumahan	Perbaiki perumahan masyarakat miskin	Penataan sanitasi lingkungan dan pemugaran perumahan untuk memenuhi standar kesehatan
Irigasi	Peningkatan kesejahteraan	Peningkatan lahan potensial

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Apabila dikomparasikan usulan kegiatan Musrenbangdes cenderung berskala lokalitas, memenuhi kebutuhan yang ada sehari-hari, meningkatkan kesejahteraan dan berorientasi kearah peningkatan pelayanan. Sedangkan usulan kegiatan Berdasarkan Analisi Kondisi dan Potensi wilayah cakupannya lebih luas, berorientasi ke arah kemajuan desa dengan mengoptimalkan kondisi infrastruktur yang sudah ada, lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.12 dibawah ini:



GAMBAR 4.12
KOMPARASI PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN
BERDASARKAN ANALISA KONDISI POTENSI DAN
MUSRENBANGDES

Sumber : Hasil Analisis, 2005

4.3.4 Peran Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa.

Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan diatas meja, tanpa melihat kondisi realitas dilapangan. Data-data yang ada di lapangan sebagai data primer merupakan bagian penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Dalam pembangunan pedesaan haruslah merupakan *inner will*, yaitu suatu proses emansipasi diri, inisiatif dan partisipasi kreatif masyarakat dalam pembangunan karena keberhasilan pembangunan pedesaan adalah dengan mengembangkan potensi kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri,

sehingga peran Desa dalam Pembangunan khususnya dalam pembangunan infrastruktur Desa adalah:

1. Membuat suatu perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan berdasarkan pada fakta-fakta yang ada melalui mekanisme perencanaan partisipatif. (Musrenbangdes).
2. Membuat alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan pembiayaan perencanaan infrastruktur pedesaan yang akan dilaksanakan.
3. Menentukan tujuan yang hendak dicapai terhadap perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Menetapkan kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya perencanaan infrastruktur pedesaan harus memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang teguh pada azas skala prioritas (Bratakusumah,2004). Dengan demikian Perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks , sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya yang lainnya (Jensen, 1995).

Dengan kata lain perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan adalah pembangunan *endogen* yaitu pembangunan yang berbasis potensi., perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan desa yang melibatkan interaksi

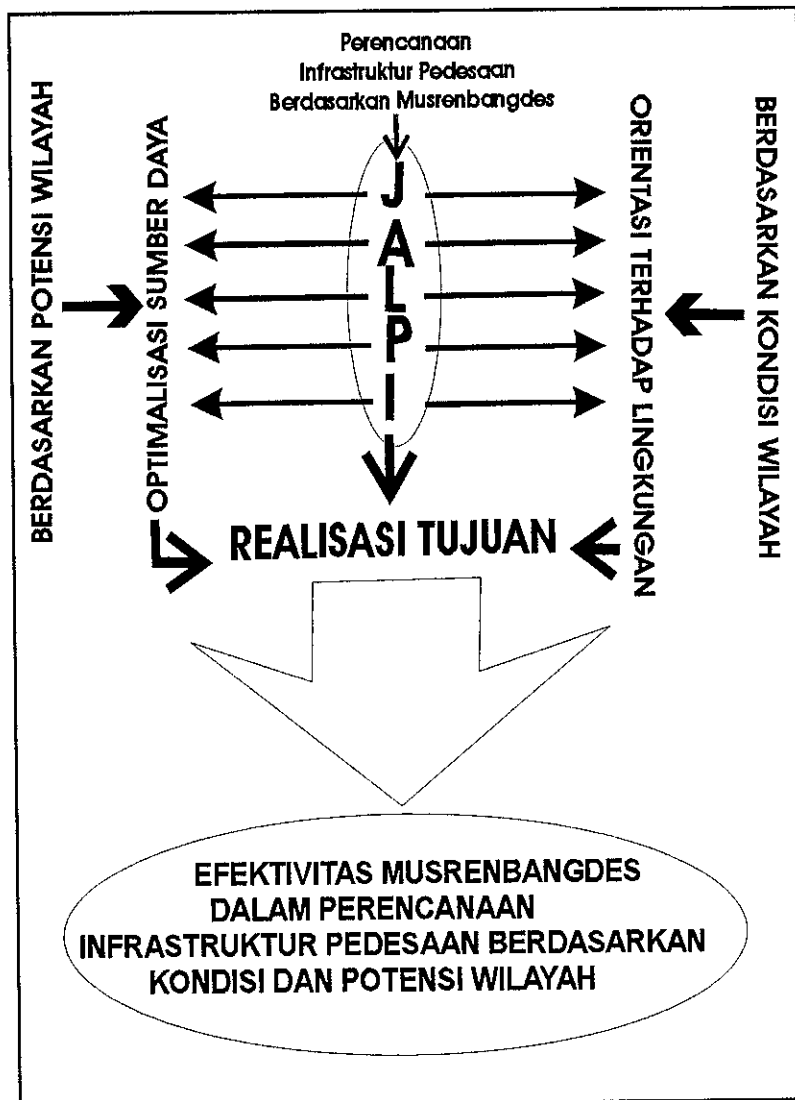
antar sumber daya manusia dengan sumber daya lain, termasuk sumber daya alam dan lingkungan melalui investasi.

4.4 Analisis Efektivitas Musrenbangdes dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah wilayah.

Analisis ini merupakan hasil dari Analisis Perencanaan Infrastruktur Pedesaan dan Analisis Perencanaan Partisipatif, karena Analisis Perencanaan Partisipatif merupakan manifestasi dari Musrenbangdes maka penilaian efektivitas Musrenbangdes dinilai berdasarkan dari hasil analisis Perencanaan infrastruktur Pedesaan.

Penilaian diberikan didasarkan dari hasil analisis, dengan melihat hasil dari 4 lokasi penelitian, apabila 3 atau 4 ($\sqrt{\quad} > 3$) desa dari 4 (empat) lokasi penelitian berdasarkan sesuai kategori infrastruktur pedesaan (JALPI) memenuhi indikator – indikator efektivitas yang ada yaitu 1) Orientasi terhadap lingkungan, 2) Optimalisasi Sumber Daya, dan 3) Realisasi Tujuan (Etzioni, 1980) indikator-indikator pengukuran berdasarkan Perencanaan Infrastruktur Pedesaan, maka perencanaan Infrastruktur Pedesaan Musrenbangdes tersebut dikatakan efektif, tetapi apabila kurang dari 3 ($\sqrt{\quad} < 3$) maka kategori infrastruktur pedesaan tersebut (JALPI) belum dikatakan efektif.

Perencanaan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes dikatakan efektif yaitu apabila perencanaan Infrastruktur Pedesaan tersebut (JALPI) masuk ke dalam 3 (tiga) indikator efektivitas. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.13 berikut ini:



GAMBAR 4.13
PENGUKURAN EFEKTIVITAS MUSRENBANGDES BERDASARKAN
KONDISI DAN POTENSI WILAYAH

Sumber : Hasil Analisis, 2005

4.4.1 Orientasi Terhadap Lingkungan

Orientasi terhadap lingkungan merupakan rencana pembangunan infrastruktur pedesaan yang didasarkan pada kondisi geografis desanya, kondisi jaringan ataupun infrastruktur pedesaan yang telah ada dan potensi desanya,

dengan kata lain yaitu bagaimana rencana Musrenbangdes yang telah ada dilihat berdasarkan pada kondisi eksisting wilayahnya.

Penilaian didasarkan dari hasil analisis, apabila dari 4 lokasi penelitian berdasarkan kategori yang ada (JALPI), 3 atau 4 ($\checkmark > 3$) lokasi penelitian sesuai dengan kondisi geografis, kondisi infrastruktur yang ada dan potensi wilayahnya maka perencanaan infrastruktur pedesaan Musrenbangdes tersebut berorientasi terhadap lingkungan, tetapi apabila kurang dari 3 ($\checkmark < 3$) maka belum masuk kategori berorientasi terhadap lingkungan.

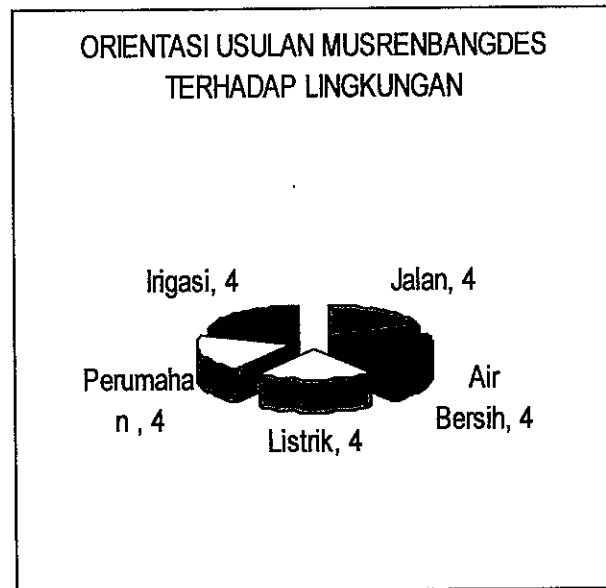
Untuk mengetahui hasil orientasi usulan Infrastruktur pedesaan hasil perencanaan Musrenbangdes terhadap lingkungan, dijelaskan pada lampiran C.1.1 S/D C.1.5 adapun hasilnya dapat dilihat pada Tabel IV.23 dibawah ini:

TABEL IV.23
ORIENTASI USULAN MUSRENBANGDES
TERHADAP LINGKUNGAN

Infrastruktur Pedesaan	Orientasi Terhadap Kondisi Wilayah			
	Dataran rendah (kalibakung)	Memusat Gunung (Gunungjati)	Memusat Fasilitas (Cerih)	Pantai (Bojongsana)
Jalan	√	√	√	√
Air Bersih	√	√	√	√
Listrik	√	√	√	√
Perumahan	√	√	√	√
Irigasi	√	√	√	√

Ket. √ : Sesuai, X : Tidak Sesuai
Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari hasil usulan Musrenbangdes berdasarkan kondisi wilayah pada pada Tabel IV.28 menunjukkan bahwa dari 5 (lima) kategori infrastruktur pedesaan (JALPI) semuanya masuk ke dalam kategori berorientasi terhadap lingkungan.



**GAMBAR 4.14
ORIENTASI USULAN MUSRENBANGDES
TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN**

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari Gambar 4.14 terlihat bahwa Usulan Infrastruktur Pedesaan melalui Musrenbangdes yaitu jalan, air bersih, listrik, perumahan dan irigasi hasil perencanaannya masing-masing berscore 4 (empat), berarti masuk kategori berorientasi terhadap lingkungan.

4.4.2 Alokasi Sumber Daya Secara Optimum

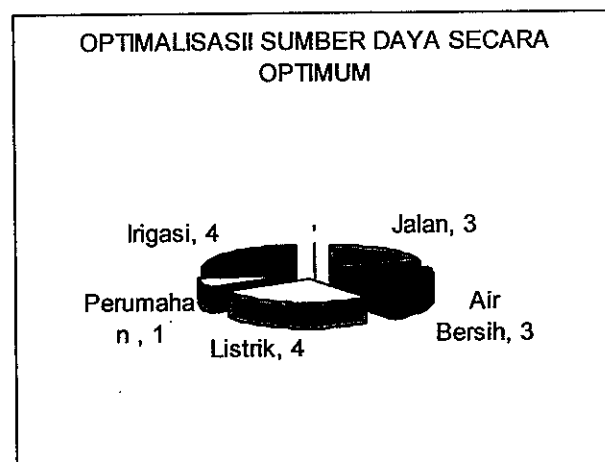
Alokasi sumber daya secara optimum adalah optimalisasi terhadap potensi yang ada di wilayah pedesaan, dalam hal ini adalah melihat apakah rencana Musrenbangdes sudah mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada sehingga infrastruktur pedesaan berfungsi secara optimal, untuk mengetahuinya dibahas pada lampiran C 2.1 sampai dengan C.2.5, dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel IV.24 dibawah ini :

TABEL IV.24
OPTIMALISASI SUMBER DAYA SECARA OPTIMUM

Infrastruktur Pedesaan	Kondisi Wilayah			
	Dataran rendah (kalibakung)	Memusat Gunung (Gunungjati)	Memusat Fasilitas (Cerih)	Pantai (Bojongsana)
Jalan	X	√	√	√
Air Bersih	X	√	√	√
Listrik	√	√	√	√
Perumahan	X	√	X	X
Irigasi	√	√	√	√

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Berdasarkan analisis data usulan Musrenbangdes berdasarkan potensi wilayahnya pada Tabel IV.34 menunjukkan bahwa dari 5 (lima) kategori infrastruktur Pedesaan (JALPI) semuanya masuk ke dalam kategori berorientasi terhadap lingkungan kecuali Perumahan., karena hanya menghasilkan score 1 (satu). Sedangkan jalan, air bersih, listrik dan irigasi mencapai score 3 (tiga) dan 4 (empat).



GAMBAR 4.15
OPTIMALISASI USULAN MUSRENBANGDES
TERHADAP POTENSI WILAYAH

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari Gambar 4.15 terlihat bahwa Usulan Infrastruktur Pedesaan melalui Musrenbangdes, irigasi dan listrik bernilai 4 (empat), sedangkan Jalan dan Air Bersih bernilai 3 (tiga) hanya perumahan yang bernilai 1 (satu) berarti hanya perumahan yang tidak termasuk mengoptimalkan sumber daya yang ada.

4.4.3 Realisasi tujuan

Dengan melihat usulan Musrenbangdes yang ada dan realisasi pelaksanaan kegiatan yang diterima dan dilaksanakan di masing-masing desa lokasi penelitian maka dapat dilihat apakah rencana yang ada direalisasikan atau hanya sekedar rencana saja.

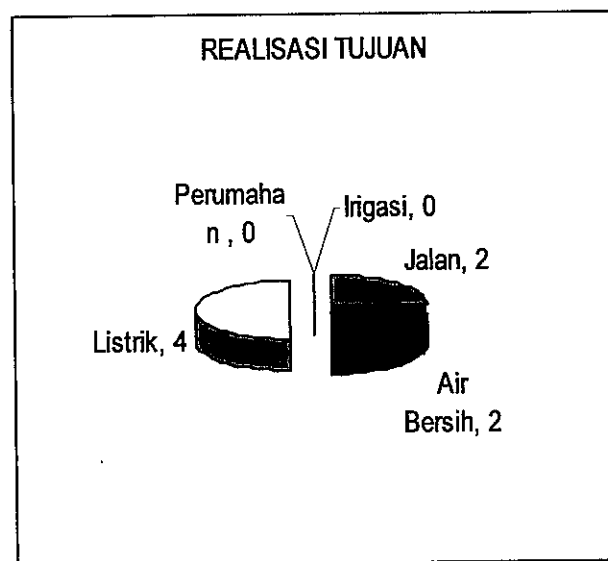
Realisasi tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari rencana pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes yang didasarkan pada analisis kondisi dan potensi wilayah, pembahasan dari masing-masing Infrastruktur Pedesaan (JALPI) dapat diketahui pada Lampiran C.3.1 sampai dengan C.3.5., dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel IV.25 dibawah ini:

**TABEL IV.25
REALISASI TUJUAN**

Infrastruktur Pedesaan	Kondisi Wilayah			
	Dataran rendah (kalibakung)	Memusat Gunung (Gunungjati)	Memusat Fasilitas (Cerih)	Pantai (Bojongsana)
1	2	3	4	5
Jalan	X	X	√	X
Air Bersih	X	√	√	X
Listrik	√	√	√	√
Perumahan	X	X	X	X
Irigasi	X	X	X	X

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari hasil analisis realisasi tujuan yang merupakan indikator efektivitas yang ketiga dari ke lima Usulan Infrastruktur Pedesaan hanya infrastruktur listrik memenuhi kategori. Hal tersebut menunjukkan bahwa usulan Musrenbangdes belum semuanya terealisasi menjadi sebuah kegiatan yang nyata, hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus, karena kebutuhan infrastruktur pedesaan sampai saat ini masih sangat terbatas dan kurang, sehingga perlu pemikiran lebih lanjut untuk rencana Musrenbangdes pada tahun berikutnya.



GAMBAR 4.16
REALISASI TUJUAN MUSRENBANGDES

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari Gambar 4.16 hanya listrik yang mendapatkan nilai 4 (empat) , sedangkan jalan bernilai 1 (satu) dan Air Bersih mendapatkan nilai 2 (dua), perumahan dan irigasi tidak mendapatkan nilai. Sehingga hanya Listrik yang usulannya melalui Musrenbangdes masuk kategori sesuai dengan realisasi tujuannya.

TABEL IV.26
EFEKTIVITAS MUSRENBANGDES DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN BERDASARKAN
KONDISI DAN POTENSI WILAYAH

Infrastruktur Pedesaan	Indikator Efektivitas		
	Orientasi terhadap lingkungan	Optimalisasi Sumber Daya	Realisasi Tujuan
Jalan	4	3	2
Air Bersih	4	3	2
Listrik	4	4	4
Perumahan	4	1	0
Irigasi	4	4	0
	(√)	(√)	(X)

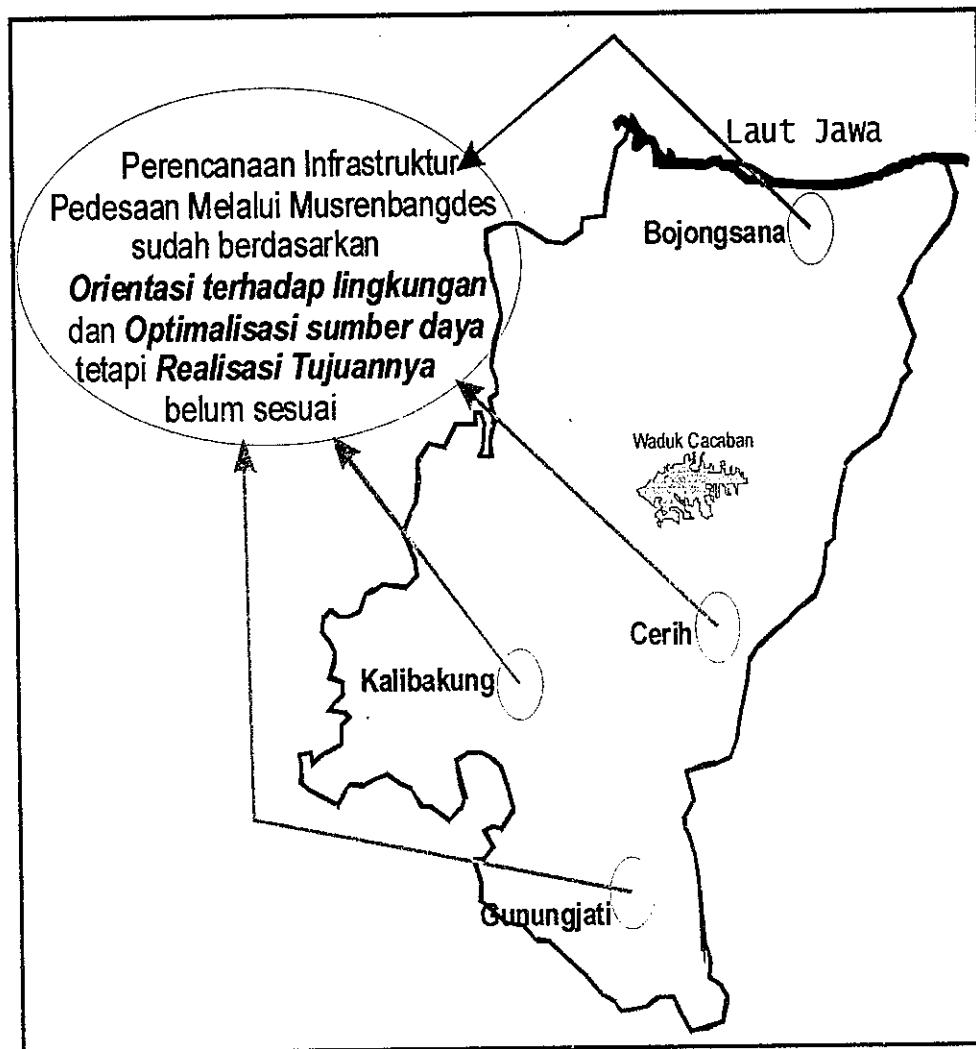
Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dari hasil analisis ketiga indikator efektivitas, hasilnya dapat dilihat pada Tabel IV.26, dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa rencana infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes dari ke 4 (empat) desa lokasi penelitian sesuai dengan kondisi geografisnya, hanya memenuhi kategori indikator Orientasi terhadap lingkungan dan Optimalisasi sumber daya, sedangkan untuk realisasi tujuan hanya Infrastruktur listrik yang memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil analisis di 4 (empat) desa lokasi penelitian perencanaan infrastruktur pedesaan yaitu meliputi jalan, air bersih, listrik, perumahan dan irigasi (JALPI) melalui Musrenbangdes dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan (*basic planning*) pembangunan infrastruktur di pedesaan, dan

menjadi acuan dalam tahapan perencanaan yang lebih tinggi (Musrenbangkec dan Musrenbangda).

Hasil penilaian berdasarkan indikator efektivitas lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.17 dibawah ini:



GAMBAR 4.17
PERENCANAAN MUSRENBANGDES BERDASARKAN KONDISI DAN
POTENSI WILAYAH

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Dapat disimpulkan bahwa perencanaan melalui Musrenbangdes sudah berdasarkan kondisi dan potensi wilayah apabila dilihat dari orientasi terhadap lingkungan dan optimalisasi sumber daya yang ada, tetapi belum sesuai apabila dilihat dari realisasi tujuannya, hal ini berkaitan dengan terbatasnya dana yang ada di desa sehingga untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pedesaan yang membutuhkan biaya yang besar pelaksanaannya hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dan dinas teknis yang bersangkutan.

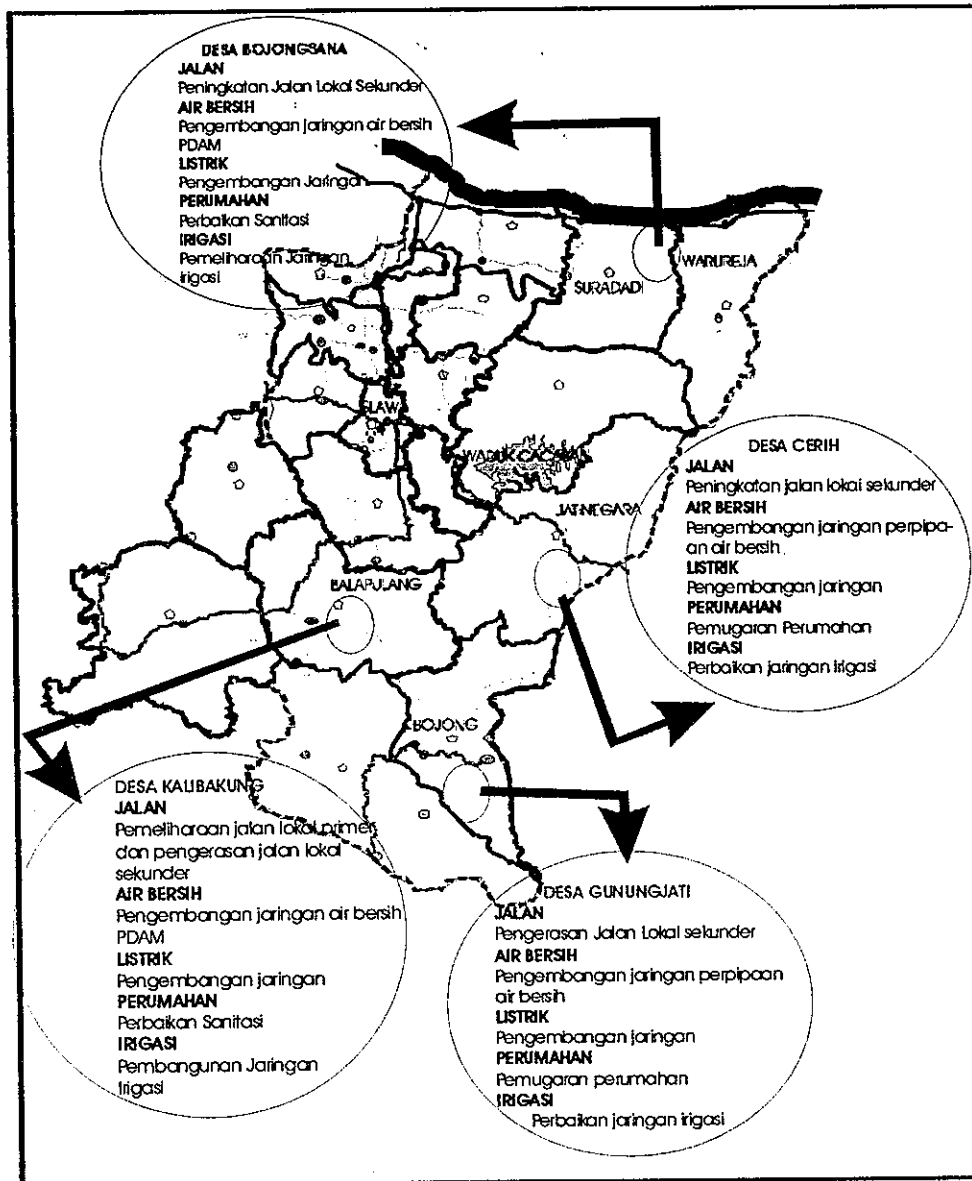
Dapat disimpulkan bahwa perencanaan melalui Musrenbangdes sudah efektif apabila dilihat dari orientasi terhadap lingkungan dan optimalisasi sumber daya yang ada, tetapi belum efektif apabila dilihat dari realisasi tujuannya, untuk mengetahui kenapa hal ini terjadi diperlukan penelitian lebih lanjut.

4.5 Frame Work serta Koridor usulan kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan berdasarkan analisis Musrenbang dan analisis kondisi wilayah.

Arahan (*guidance*) serta koridor dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat desa dan pihak-pihak yang berkepentingan khususnya dalam pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes agar usulan-usulan kegiatan yang diajukan lebih berdasarkan kepada kondisi lingkungan, potensi sumber daya dan kebutuhan masyarakat di pedesaan.

Dan sasarannya adalah untuk lebih mengoptimalkan perencanaan pembangunan Infrastruktur Pedesaan melalui Musrenbangdes sehingga

dihasilkan perencanaan infrastruktur pedesaan yang efektif dan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat desa maka arahan untuk perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan dapat dilihat pada Gambar 4.18 dibawah ini:



GAMBAR 4.18
ARAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PEDESAAN BERDASARKAN MUSRENBANGDES
SERTA KONDISI DAN POTENSI WILAYAH

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Pemanfaatan partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes berdasarkan hasil dari 4 desa lokasi penelitian sudah mencerminkan perencanaan yang berdasarkan kondisi dan potensi wilayahnya. Lebih jelasnya arahan perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan dapat dilihat pada Tabel IV.27 berikut ini:

TABEL IV.27
FRAME WORK KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PEDESAAN BERDASARKAN MUSRENBANGDES
SERTA ANALISIS KONDISI DAN POTENSI WILAYAH

Infrastruktur Pedesaan	Kondisi Wilayah			
	Dataran rendah (kalibakung)	Memusat Gunung (Gunungjati)	Memusat Fasilitas (Cerih)	Pantai (Bojongsana)
Jalan	Pemeliharaan Jalan Lokal Primer dan Pengerasan Jalan Lokal sekunder	Pengerasan Jalan Lokal sekunder	Peningkatan jalan lokal sekunder	Peningkatan jalan lokal sekunder
Air Bersih	Pengembangan Jaringan air bersih PDAM	Pengembangan Jaringan perpipaan air bersih	Pengembangan Jaringan perpipaan air bersih	Pengembangan Jaringan air bersih PDAM
Listrik	Pengembangan jaringan	Pengembangan jaringan	Pengembangan jaringan	Pengembangan jaringan
Perumahan	Perbaikan sanitasi	Pemugaran perumahan	Pemugaran perumahan	Perbaikan sanitasi
Irigasi	Pembangunan jaringan irigasi	Perbaikan jaringan irigasi	Perbaikan jaringan irigasi	Pemeliharaan jaringan irigasi

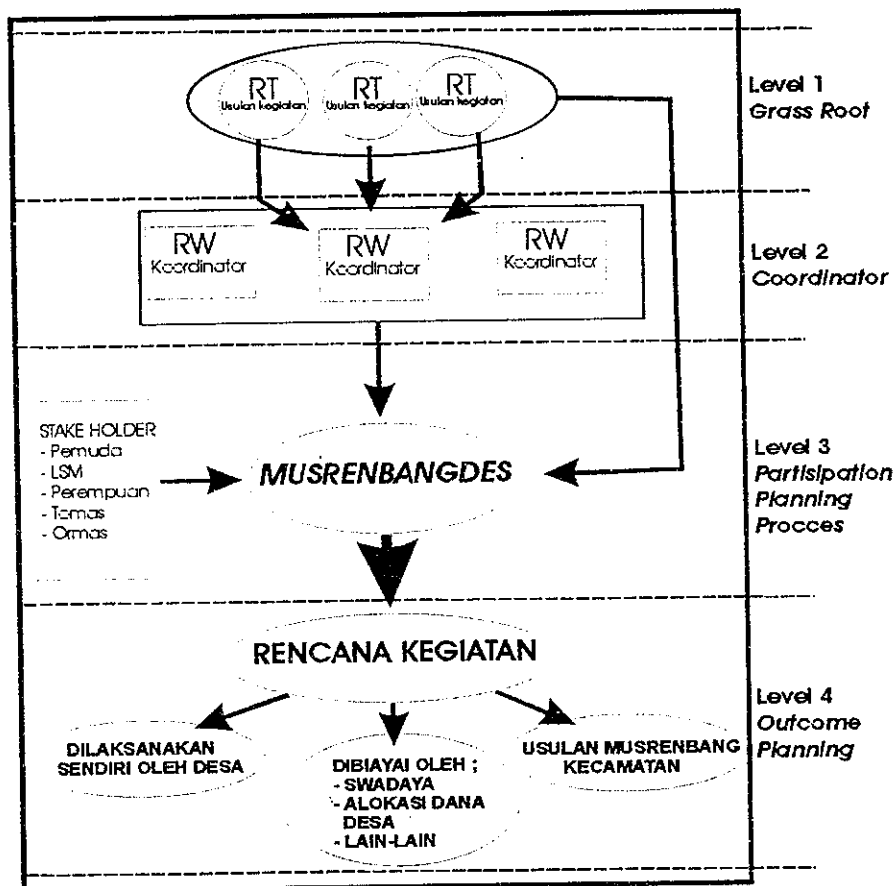
Sumber : Hasil Analisis, 2005

Untuk lebih mengedapankan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur pedesaan maupun kegiatan-kegiatan yang lain maka perlu ada perbaikan dalam proses pelaksanaan Musrenbangdes yang ada pada saat ini.

Proses partisipasi masyarakat melalui Musrenbang yang ada pada saat ini menempatkan posisi masyarakat hanya sebagai objek pelengkap, hal tersebut terjadi karena perumusan di tingkat RT, RW dan sampai di proses Musrenbangdes

belum memunculkan kejelasan skala prioritas kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan, sehingga penentu rencana pembangunan adalah perangkat desa ataupun orang-orang yang mempunyai kepentingan didalamnya.

Untuk memudahkan identifikasi proses perencanaan, tingkat perencanaan dalam Musrenbangdes dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan yaitu Level 1 (*Grass Root*), Level 2 (*Coordinator*), Level 3 (*Participation Planning Proses*) dan Level 4 (*Outcome Planning*), proses partisipasi melalui Musrenbang pada saat ini dapat dijelaskan pada Gambar 4.19 dibawah ini :



GAMBAR 4.19
PROSES APLIKASI MUSRENBANGDES DI LAPANGAN

Sumber : Hasil Analisis, 2005

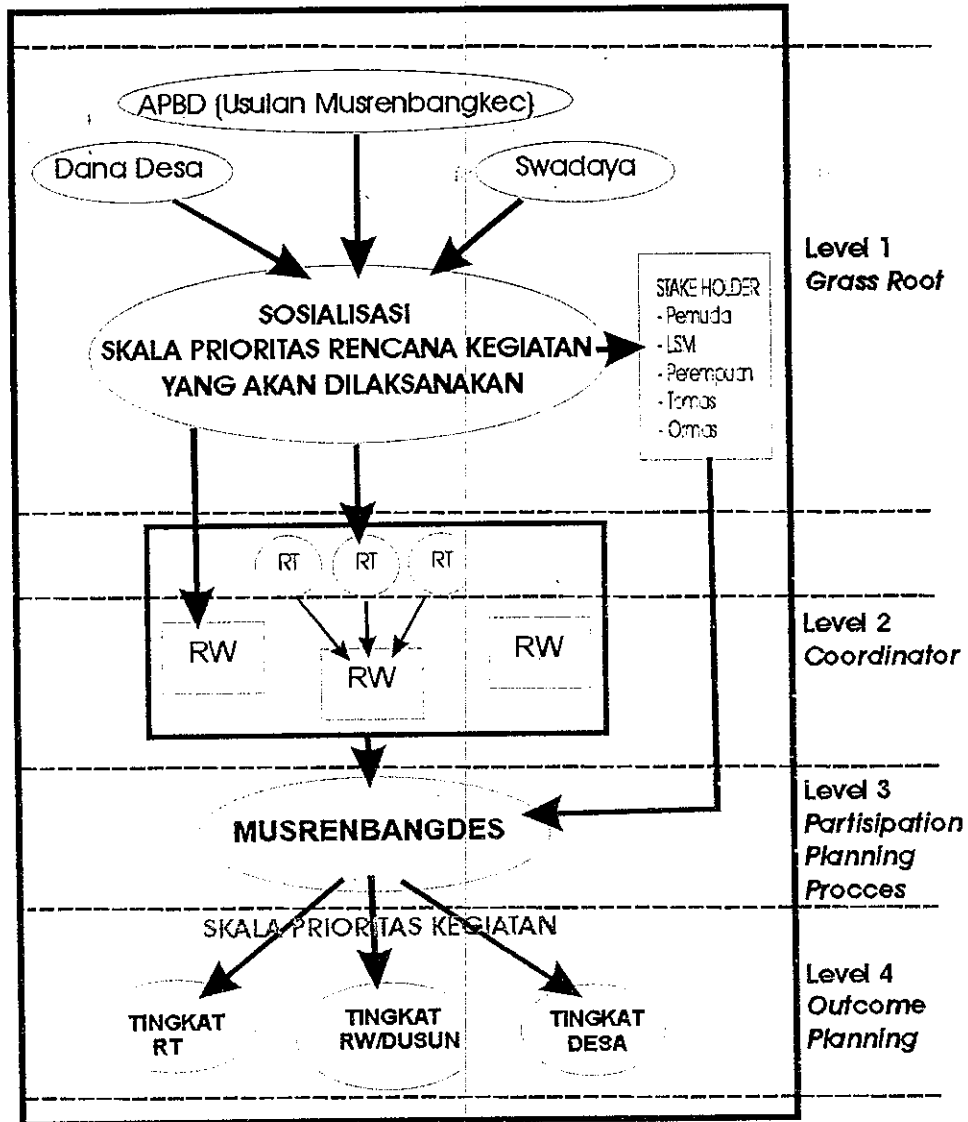
Dari mekanisme Musrenbangdes yang ada, untuk lebih mendekatkan aspirasi masyarakat ke dalam perencanaan diperlukan sedikit perubahan dalam mekanismenya, perubahan tersebut dapat dilihat pada Tabel IV 28 berikut:

TABEL IV.28
SARAN PERUBAHAN MEKANISME MUSRENBANGDES

Level of planning	Aplikasi di lapangan (diagram lama)	Saran (diagram baru)	Teori
Level 1 <i>Grass root</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi akan diadakannya Musrenbangdes • Tingkat RT mengusulkan kegiatan berdasarkan kebutuhannya masing-masing. • Penyusunan kegiatan didasarkan adanya pemberitahuan akan dilaksanakan Musrenbangdes. • Penyusunan usulan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi akan diadakannya Musrenbangdes • Sosialisasi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. • Sosialisasi skala prioritas kegiatan desa berdasarkan beban pembiayaan. • Penyusunan usulan kegiatan di tingkat RT berdasarkan skala prioritas, dan terpilah berdasarkan pembebanan pembiayaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan diartikan sebagai perwujudan kebutuhan dasar dari penduduk asli (Friedmann, 1987) • Pada umumnya keterbatasan masyarakat adalah mengembangkan dan melatih kemampuan mereka dan mengekspresikan kebutuhan, pemikiran dan perasaannya (Young, 1990) • Untuk merubah keadaan, keterbatasan tersebut dapat diwadahi melalui perencanaan (Hibbard and Lane, 2005)
Level 2 <i>Coordinator</i>	RW sebagai koordinator menampung usulan-usulan RT dan menyusun usulan kegiatan, yang akan diajukan dalam Musrenbangdes	RT dan RW bersamasama sebagai koordinator menghasilkan usulan kegiatan berdasarkan skala prioritas yang akan diajukan dalam Musrenbangdes berdasarkan pembebanan pembiayaan.	Aturan yang diterapkan oleh komitmen lokal dalam perencanaan dan kualitas rencana keduanya penting, tetapi komitmen lokal sebagai dasar tujuan dalam pemerintahan lokal lebih penting (Norton, 2005) Suara masyarakat bertambah kuat disebabkan dari meningkatnya penduduk asli/lokal yang diikuti (Chaskin, 2005)
Level 3 <i>Participation Planning Procces</i>	Musrenbangdes membahas usulan kegiatan tingkat RW dan stake holder	Musrenbangdes membahas skala prioritas kegiatan yang diusulkan dari tingkat RT, RW dan Desa serta stake holder terkait.	UU No. 25 Tahun 2004
Level 4 <i>Outcome Planning</i>	Rencana kegiatan Desa hasil Musrenbangdes.	Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat RT,RW dan Desa berdasarkan skala prioritas dan pembebanan pembiayaan.	Dibutuhkan kejelasan tentang keinginan dan harapan masyarakat dalam proses partisipasi dan pemerintah meningkatkan,meningkatkan dukungan kepada masyarakat agar perencanaan partisipatif lebih efektif (Chaskin, 2005)

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Lebih jelasnya saran perubahan mekanisme pelaksanaan Musrenbangdes dapat dilihat pada Gambar 4.20 dibawah ini:



GAMBAR 4.20
SARAN PERUBAHAN PROSES MUSRENBANGDES

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Saran perubahan terhadap aplikasi Musrenbangdes yang ada di lapangan yaitu:

1. Adanya kejelasan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di tingkat RT,RW dan Desa.
2. Adanya sosialisasi pembiayaan kegiatan yang akan dilaksanakan, dari Kecamatan/Kabupaten, Dana Desa atau Swadaya Masyarakat
3. Tingkat RT diharapkan mampu mengusulkan kegiatan berdasarkan skala prioritas.
4. Tingkat RW diharapkan mampu mengkoordinasikan usulan dari tingkat RT yang sudah baik
5. Skala Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat RT, RW dan Desa hasil perencanaan RT, RW dan Musrenbangdes, sehingga kualitas perencanaan kegiatannya akan lebih berkualitas.

Pelaksanaannya adalah sebelum dilaksanakan Musrenbangdes, pemerintah desa memberikan sosialisasi skala prioritas rencana kegiatan yang hendak dilaksanakan di tingkat RT, RW dan desa yang dibiayai oleh APBD, dana swadaya dan dana desa lainnya kepada peserta Musrenbangdes (RT, RW, *Stake Holder*), sehingga terdapat kejelasan kegiatan yang hendak dilaksanakan dan setelah masing-masing tingkatan (RT,RW, Stake holder) membuat skala prioritas berdasarkan hasil sosialisasi kemudian dilaksanakan Musrenbangdes.

Walaupun secara nominal keuangan secara pasti belum diketahui tetapi masyarakat mendapat kejelasan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di desanya, sehingga pelaksanaan Musrenbang benar-benar menempatkan masyarakat sebagai penentu perencanaan pembangunan di desanya.

Diharapkan dengan adanya perubahan (modifikasi) perencanaan pembangunan infrastruktur di pedesaan dapat diartikan bahwa Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) adalah suatu proses penyusunan perencanaan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

4.6 Temuan Studi

Intervensi masyarakat bentuknya berbeda-beda, mencakup berbagai perpaduan dari pembangunan, organisasi, advokasi dan perencanaan, pelayanan, penetapan dan koordinasi (Rothman, 1995; Drierr, 1996).

Walupun berbeda dalam strategi, cakupan dan organisasinya, kebanyakan dalam praktek penyelesaiannya dipecahkan dari tingkat rumah tangga sampai kepada koorporasi pemberdayaan masyarakat (Community Development Cooperations atau CDCs) untuk memandu pelaksanaannya, termasuk didalamnya prinsip *Focus Geographic* di dalam masyarakat lokal (Chaskin, 2005).

Masyarakat di dalam merumuskan perencanaannya belum mempunyai kemampuan teknis sebagai dasar usulan rencananya, walaupun dari hasil penelitian di 4 (empat) desa lokasi penelitian yang mempunyai perbedaan geografis, perencanaan yang dihasilkan sudah berdasarkan kondisi dan potensi wilayahnya tetapi untuk lebih memantapkannya perlu bantuan para ahli dalam bidangnya, seperti yang diutarakan oleh (O'Connor, 1999, Halpernn, 1995), di dalam usaha untuk mewedahi secara menyeluruh kebutuhan-kebutuhan manusia dalam masyarakat, dan fokus kepada partisipasi warga masyarakat, perlu

didampingi para ahli dalam perencanaan dan penerapan sebagai usaha perubahan masyarakat.

Perencanaan partisipasi masyarakat melalui Musrenbang menghasilkan perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan yang mencakup berbagai perpaduan dari pembangunan, organisasi, advokasi dan perencanaan, pelayanan, penetapan dan koordinasi kebutuhan dan keinginan aliran pergerakan grass root. Musrenbangdes merupakan korporasi pemberdayaan masyarakat demokrasi lokal yang dilakukan oleh pergerakan "*grass root*" dan tindakan suka rela.

Perencanaan pembangunan Infrastruktur yang dihasilkan melalui Musrenbangdes belum sepenuhnya terealisasi didalam pelaksanaannya, serta kurang mendapat respon yang baik dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dari indikator efektivitas yang ketiga yaitu indikator realisasi tujuan, perencanaan pembangunan infrastruktur melalui Musrenbangdes yang berdasarkan kondisi dan potensi wilayahnya belum bisa diwujudkan, disebabkan karena pelaksanaan program/proyek yang dikucurkan ke desa merupakan kewenangan pemerintah, sehingga program/proyek yang diturunkan cenderung menggunakan pendekatan birokrasi di dunia pemerintahan. Sehingga terjadi perbedaan kerangka pikir antara keinginan masyarakat dan birokrasi pemerintahan.

Dasar dari ketegangan ini adalah antara prakarsa dan kepercayaan yang terjadi diatas 2 (dua) konflik kerangka pikir dalam pelaksanaannya, yang melekat dalam struktur organisasi dan proses perencanaan yang melingkupinya. Di salah satu sisinya sebagai ideologi dari hubungan tindakan dan demokrasi lokal yang dilakukan oleh pergerakan "*grass root*" dan tindakan suka rela, disisi lainnya

sebuah kesetiaan pada perencanaan yang rasional, dan essensinya dilakukan oleh pendekatan birokrasi di dunia pemerintahan, philantropi dan keahlian (Chaskin, 2005).

Diperlukan usaha keras untuk memadukan kedua kepentingan tersebut, bagaimanapun, usaha untuk menerapkannya masih menjadi bagian problematika sebab ada perbedaan ukuran yang mendasar antara rencana (design) dan penerapannya (Kubisch, 1997). Sehingga diperlukan titik temu diantara dua kerangka yang berlawanan yang dilaksanakan yang berlaku di dalam struktur organisasi dan proses perencanaan yang mengaturnya (Chaskin, 2005).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut menurut (Chaskin, 2004) ada tiga hal penting yang harus dilaksanakan yaitu: 1) Dibutuhkan kejelasan tentang keinginan dan harapan-harapan masyarakat dalam partisipasinya, 2) Penguatan dan peningkatan dukungan kepada masyarakat dalam berpartisipasi agar perencanaan partisipatif tersebut lebih efektif, 3) Kepemimpinan yang dapat menjembatani perbedaan dan penengah antara masyarakat dan yang lainnya.

Akhirnya diharapkan dengan terjadinya kesepahaman dan berkurangnya perbedaan mendasar tersebut dapat dihasilkan perencanaan partisipatif yang lebih efektif.

BAB V P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Dari seluruh uraian analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

1. Kondisi geografis wilayah serta bentuk-bentuk desa menghasilkan perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan dalam kategori jalan, air bersih, listrik, perumahan dan irigasi (JALPI) yang berbeda-beda.
2. Rencana pembangunan infrastruktur pedesaan mempunyai banyak kesamaan walaupun mempunyai karakteristik wilayah dan bentuk-bentuk desa yang berlainan.
3. Perencanaan Infrastruktur Pedesaan yang dihasilkan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah mempunyai cakupan wilayah yang luas, berorientasi ke pengembangan desa dan mengoptimalkan kondisi infrastruktur pedesaan yang sudah ada.

b. Perencanaan Partisipatif

1. Pada pelaksanaan Musrenbangdes terdapat beberapa kendala yaitu:
 - a) Terbatasnya kemampuan masyarakat untuk menyusun skala prioritas,
 - b) Masih kurangnya kemampuan individu peserta Musrenbangdes,
 - c) Kurang tersosialisasinya program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah.

2. Perencanaan partisipatif masyarakat secara umum sangat baik hal ini diwujudkan dengan keikutsertaan dan keaktifan masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes.
3. Pola partisipasi masyarakat dikaitkan dengan perbedaan karakteristik geografis wilayah dan bentuk-bentuk desa adalah bahwa masyarakat didataran rendah mempunyai pola partisipasi yang lebih baik, dinilai dari variable sumber daya, keikutsertaan serta keterlibatan di dalam Musrenbangdes, tetapi terdapat pola partisipasi yang sama terhadap variabel tahapan pembangunan dan tahap partisipasi.
4. Perencanaan Infrastruktur Pedesaan yang dihasilkan melalui Musrenbangdes perencanaan pembangunannya bersifat intern desa yaitu mengarah ke pembangunan lokal desa, dengan kata lain bahwa Perencanaan Infrastruktur Pedesaan yang dihasilkan dalam Musrenbangdes adalah Infrastruktur yang dibutuhkan serta dapat diakses kesehariannya oleh masyarakat di tingkat pedesaan.
5. Perbedaan kondisi geografis wilayah tidak terlalu berpengaruh terhadap usulan rencana yang diajukan melalui Musrenbangdes, karena bagi masyarakat desa usulan perencanaan jenis-jenis infastruktur pedesaan cenderung ke arah pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhannya.
6. Hambatan-hambatan yang ada dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes adalah kewenangan pengelolaan keahlian teknis, dan keterbatasan dana.

c. Efektivitas Musrenbangdes

1. Ada perbedaan prinsip antara perencanaan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes dan berdasarkan kondisi dan potensi wilayah yaitu usulan kegiatan Musrenbangdes cenderung ke arah pembangunan intern desa, mencukupi kebutuhan masyarakat, sedangkan usulan kegiatan berdasarkan kondisi dan potensi lebih mengarah kepada peningkatan serta pengembangan desa menjadi desa yang lebih berkembang dengan memanfaatkan infrastruktur pedesaan yang ada.
2. Perencanaan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes sudah berdasarkan orientasi terhadap lingkungan (kondisi geografis) dan optimalisasi sumber daya yang ada (potensi wilayah), tetapi realisasi tujuannya belum terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes sudah efektif bila dilihat dari orientasi terhadap lingkungan dan optimalisasi sumber daya yang ada, tetapi belum efektif apabila dilihat dari realisasi tujuannya.

5.2 Rekomendasi

a. Rekomendasi Untuk Pemerintah

1. Keterbatasan dana desa dan banyaknya kebutuhan infrastruktur pedesaan yang harus segera ditangani, sehingga diperlukan titik temu dan pembagian kewenangan yang jelas, transparan dan memihak masyarakat antara Pemerintahan atau dinas teknis lainnya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di desa, ada 2 (dua) alternatif untuk mengatasi hal tersebut

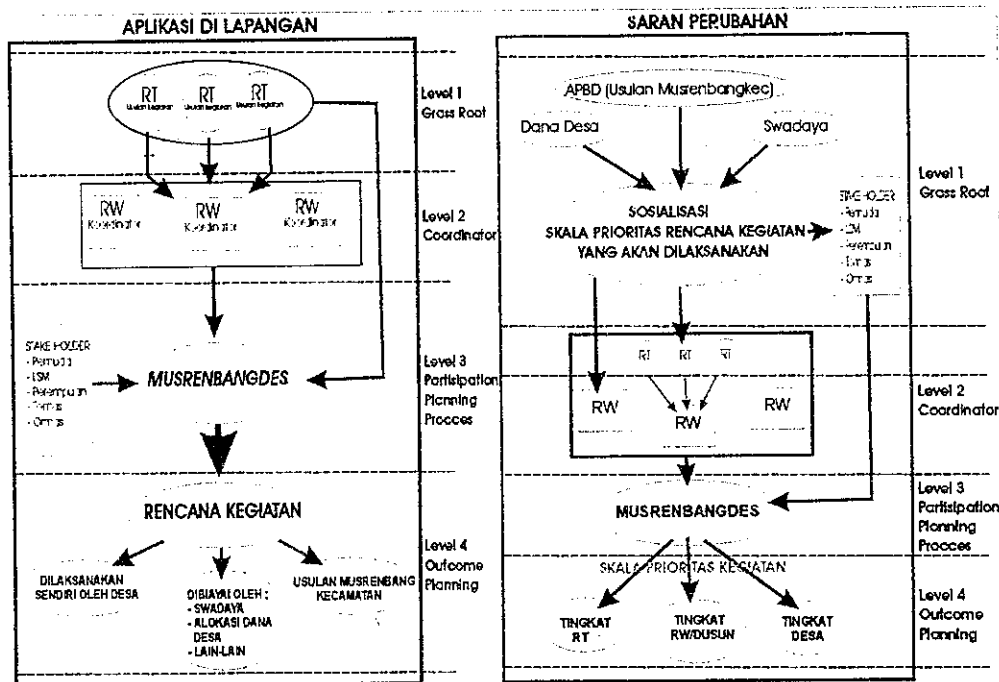
- a). Adanya perimbangan keuangan antara Desa dan Kabupaten yang diperhitungkan dengan besarnya DAU (Dana Alokasi Umum) sehingga desa mampu mencukupi kebutuhannya, terutama kebutuhan infrastruktur pedesaan.
- b). Desa diberikan dana yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur pedesaan melalui ADD (Alokasi Dana Desa), dan dana khusus bagi desa-desa yang benar-benar tertinggal kondisi infrastrukturnya.
2. Dalam rangka mengoptimalkan perencanaan pembangunan Infrastruktur Pedesaan melalui Musrenbangdes sehingga dihasilkan perencanaan infrastruktur pedesaan yang efektif dan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat desa maka arahan untuk perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan adalah sebagai berikut:

TABEL V.1
ARAHAN KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PEDESAAN DALAM MUSRENBANGDES

Infrastruktur Pedesaan	Kondisi Wilayah			
	(Dataran rendah)	Memusat Gunung	Memusat Fasilitas	Pantai
Jalan	Pemeliharaan Jalan Lokal Primer dan Pengerasan Jalan Lokal sekunder	Pengerasan Jalan Lokal sekunder	Peningkatan jalan lokal sekunder	Peningkatan jalan lokal sekunder
Air Bersih	Pengembangan Jaringan air bersih PDAM	Pengembangan Jaringan perpipaan air bersih	Pengembangan Jaringan perpipaan air bersih	Pengembangan Jaringan air bersih PDAM
Listrik	Pengembangan jaringan	Pengembangan jaringan	Pengembangan jaringan	Pengembangan jaringan
Perumahan	Perbaikan sanitasi	Pemugaran perumahan	Pemugaran perumahan	Perbaikan sanitasi
Irigasi	Pembangunan jaringan irigasi	Perbaikan jaringan irigasi	Perbaikan jaringan irigasi	Pemeliharaan jaringan irigasi

Sumber : Hasil Analisis, 2005

3. Hasil perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes di lokasi penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan perencanaan pembangunan infrastruktur di pedesaan pada tahap perencanaan lebih lanjut.
4. Untuk mengoptimalkan dan lebih mengedepankan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur pedesaan maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya di tingkat perencanaan terendah maka perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan Musrenbangdes, proses yang ada pada saat ini menempatkan posisi masyarakat hanya sebagai objek pelengkap sehingga penentu rencana pembangunan adalah perangkat desa ataupun orang-orang yang mempunyai kepentingan di dalamnya.



GAMBAR 5.1

SARAN PERUBAHAN PROSES PELAKSANAAN MUSRENBANGDES

Sumber : Hasil Analisis, 2005

Saran perubahan proses Musrenbangdes ini diharapkan akan menempatkan masyarakat sebagai penentu perencanaan pembangunan di desanya. Untuk lebih jelasnya rekomendasi terhadap perubahan proses Musrenbangdes yang ada selama ini dapat dilihat pada Gambar 5.1 diatas. Dapat dijelaskan bahwa perubahan yang mendasar adalah adanya sosialisasi skala prioritas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat tidak hanya tahu akan dilaksanakan Musrenbangdes tetapi mengerti juga skala prioritas yang akan dilaksanakan pada tingkat RT, RW dan Desa.

b. Rekomendasi Penelitian lanjutan

Pelaksanaan proyek/program pembangunan yang ada di desa sebagai hasil proses perencanaan Musrenbangdes belum bisa dibuktikan secara empiris, hal ini menjadi keterbatasan studi.

Rekomendasi kepada peneliti yang akan meneliti perencanaan partisipatif melalui Musrenbangdes yaitu:

”Bagaimana kontinuitas usulan perencanaan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes (perencanaan partisipatif) dari proses perencanaan sampai dengan realisasi menjadi proyek pembangunan di desanya”.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1985, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara, Jakarta.
- Asy'ari, Sapari Imam, Drs, 1993, *Sosiologi Kota Dan Desa* , Usaha Nasional, Jakarta
- Burke, Edmund M, 2004, *Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan Kota*, Yayasan Sugiyanto Sugiyoko, Bandung
- Davey, Kenneth J, 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Daldjoeni N, 1998, *Geografi Kota dan Desa*, Alumni, Bandung.
- Effendi Anwar dan Setia Hadi, 1996, *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*, Majalah Prisma, Jakarta.
- Friedmann, John, 1987, *Planning in the Public Domain*, Princeton., University Press.
- Hasibuan SP, Malayu, 1998, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta
- Hadi, Sutrisno, 1984, *Metodologi Research P*, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hadari Nawawi, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Jenssen, Bernd (edt), 1998, *Planning as a Dialogue, District Development Planning and Management Countries*, Spring Research Series University of Dortmund, Germany
- Kartasasmita, Ginanjar, 1997 *Administrasi Pembangunan : Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Lawton, Alan dan Rose, Aidan G., 1994, *Organization and Management In Public Sector*, Second Edition Editor, Pitman Publishing, London.
- Moekijat, 1990, *Asas-Asas Perilaku Organisasi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Muhadjir, H. Noeng, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari, 1983, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Ndraha, Taliziduhu, 1987, *Desain Riset dan Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Osborne, David dan Ted Gaebler, Cetakan Kelima Mei 1999, *Mewirauahakan Birokrasi, Mentransformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik*, Penerbit PT.Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Osborne, David dan Peter Plastrik, Agustus 2000, *Memangkas Birokrasi, Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, Penerbit PPM, Jakarta.
- Parsons, Talcot, 1985, dalam Amitai Etzioni, *Organisasi-Organisasi Modern*, (alih bahasa Suryatim), Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1991, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta.
- Pratikno, 2001, *Mata Kuliah Birokrasi Indonesia*, Fisipol UGM, Kamis, 22 Maret 2001 Semester Genap.
- Riwu Kaho, Josef, 1991, "*Prospek Otonomi Daerah di Negara R.P*", CV. Rajawali, Jakarta.
- Riyadi & Deddy Supriady Bratakusumah, (2004), *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siagian, S.P, (1994), *Manajemen Modern: Bunga Rampai*, CV. Masagung, Jakarta.
- _____, (1995), *Manajemen Strategik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Slamet, Y, (1993), *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, 1985, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 1983, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi* PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Sarantakos, Sotirios, 1993, *Social Research*, Macmillan Education, Australia.
- Surakhmad, Winarno, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 1998, *Manajemen Penelitian*, edisi baru, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta,

Jurnal/Modul

- Chaskin, Robert J, 2005, Democracy and Bureaucracy in a Community Planning Process, *Journal of Planning Education and Research*, 24 :408-419, Association of College Schools of Planning.

Hibbard Michael & Lane Marcus B, 2005, Doing It for Themselves, Transformative Planning bi Indigenous Peoples, *Journal of Planning Education and Research*, 25 :172-184, Association of College Schools of Planning.

Norton Richard. K, 2005, Local Commitment to State-Mandated Planning n Coastal North Carolina, *Journal of Planning Education and Research*, 25 :149-171, Association of College Schools of Planning.

Modul Diklat Perencanaan Pembangunan Wilayah, LAN RI-DSE Jerman, Jakarta 1999.

Manfred. Poppe, *Inventarisasi Sumber Daya Daerah dan Pengkajian Potensi Pembangunan Daerah*, Makalah Diskusi No. 2 PRODA-NT Feb. 2001.

Denis Goulet, *Partisipasi dalam pembangunan suatu terobosan baru*, , Analisis CSIS Th. XIX, No. 2, 1990,

Kabupaten Tegal dalam Angka tahun 2003

Kabupaten Tegal Dalam Angka Tahun 2004

Profil Kemiskinan Tahun 2002

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

Surat Edaran Bersama MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS DAN MENTERI DALAM NEGERI No. 0259/M.PPN/1/2005 dan 050/166/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan MUSRENBANG 2005